

EDITOR:  
MURADI, LEO AGUSTINO, IDIL AKBAR, NANANG SURYANA

# COVID19

A photograph showing a person's hands in blue nitrile gloves. One hand holds a clear glass vial containing a blue liquid, while the other hand holds a syringe. The background is blurred, showing what appears to be hands being washed under a stream of water, suggesting a medical or laboratory setting.

## NEGARA & KEBIJAKAN

*Penanganan Pandemi Covid-19*

LEO AGUSTINO, MONA SYLVIANA, ENDI HARYONO, MUTIA KARTIKA ANDALUS, CLAUDIA SYARIFAH, BIMA ANDRIANTO PAMBUDI, NANANG SURYANA, SONGGA AURORA ABADI, ASRINALDI, HARITS HIJRAH WICAKSANA, JONAH SILAS, INDRA PURNAMA, TEDY NURZAMAN.

# NEGARA & KEBIJAKAN

## PENANGANAN PANDEMI COVID-19

**Editor:**

Muradi  
Leo Agustino  
Idil Akbar  
Nanang Suryana

**Penulis:**

Leo Agustino  
Mona Sylviana  
Endi Haryono  
Mutia Kartika Andalus  
Claudia Syarifah  
Bima Andrianto Pambudi  
Nanang Suryana  
Songga Aurora Abadi  
Asrinaldi  
Harits Hijrah Wicaksana  
Jonah Silas  
Muchamad Indra Purnama  
Tedy Nurzaman

Cetakan Pertama, Maret 2022  
PT. Tubagus Lima Korporat

# NEGARA & KEBIJAKAN

## PENANGANAN PANDEMI COVID-19

**Editor:**

Muradi, Leo Agustino, Idil Akbar, Nanang Suryana  
Cetakan Pertama, Maret 2022

**Penulis:**

Leo Agustino  
Mona Sylviana  
Endi Haryono  
Mutia Kartika Andalus  
Claudia Syarifah  
Bima Andrianto Pambudi  
Nanang Suryana  
Songga Aurora Abadi  
Asrinaldi  
Harits Hijrah Wicaksana  
Jonah Silas  
Muchamad Indra Purnama  
Tedy Nurzaman

**ISBN: 978-623-99459-0-9**

**Diterbitkan oleh:**

PT. Tubagus Lima Korporat  
Jl. Tubagus Ismail VIII Nomor 5 Bandung

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan tujuan apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# PRAKATA

Tujuan penerbitan buku ini yaitu untuk memahami sekaligus menilai kebijakan negara dalam menangani pandemi Covid-19. Sudah lebih dari 1,5 tahun Indonesia mengalami dan menangani kasus Covid-19. Dari pendekatan yang bersifat pembatasan mobilitas masyarakat, hingga pelaksanaan vaksinasi bagi hampir semua kelompok umur, sudah dilakukan untuk menangani Pandemi Covid-19.

Indonesia sudah mengalami gelombang kritis pada Juni hingga Agustus 2021. Masa-masa itu ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus paparan dan kematian, rontoknya rumah-rumah sakit karena dibanjiri pesakit, “hilangnya” oksigen, antrian panjang di pemakaman, hingga berita-berita yang mengelirukan (infodemik). Tentu buku ini tidak berpretensi untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Meski terdapat rekomendasi dan saran jalan keluar yang ditulis oleh masing-masing Penulis, tapi arah buku ini tidak ke sana. Buku ini hanya berusaha memotret bagaimana negara hadir dalam menangani pandemi. Ada banyak kekurangan, pasti terjadi. Itulah yang harus dibenahi untuk mengantisipasi wabah lain yang menakutkan seperti Covid-19.

Ada sembilan tajuk yang ditulis oleh ramai Penulis (mayoritas di antaranya adalah akademisi dan peneliti). Skopnya beraneka ragam. Mulai dari perbandingan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di kawasan dalam menangani Covid-19, hingga persoalan elektabilitas kepala daerah pada Pilkada tahun 2020. Perbincangan lain seperti pilihan kebijakan, kapabilitas politik luar negeri dalam hal vaksin, kohesivitas sosial, tumbuhnya solidaritas warga, mitigasi, serta penanganan kasus Covid-19 di daerah pun, turut diteropong oleh buku ini. Kami tidak ingin menyarikan satu-satu artikel yang ada di buku ini. Justru Kami serahkan semua kesimpulan dan makna yang ada di buku ini pada Dewan Pembaca yang terhormat. Akhir sekali, selamat membaca dan semoga buku ini dapat mewarnai wacana teoretis dan praktis di tanah air.

Bandung, Maret 2022

Muradi, Leo Agustino, Idil Akbar, Nanang Surya

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK.....	vi
1. PERBANDINGAN PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA DAN VIETNAM .....	1
2. PILIHAN KEBIJAKAN INDONESIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DAN KRITIKNYA.....	35
3. KAPABILITAS POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI NASIONALISME VAKSIN DI MASA PANDEMI.....	50
4. KOHESIFITAS SOSIAL DAN KEGAGALAN NEOLIBERALISME SAAT PANDEMI COVID-19.....	66
5. TUMBUHNYA SOLIDARITAS WARGA DI TENGAH PANDEMI: GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL.....	77
7. LANGKAH MITIGASI TERHADAP DAMPAK EKONOMI ATAS PENYEBARAN VIRUS CORONA.....	87
8. TRANSISI PEMERINTAHAN DAERAH, GAYA KEPEMIMPINAN DAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMATERA BARAT.....	94
9. PROGRAM SEMBAKO SEBAGAI KEBIJAKAN DISTRIBUTIVE DALAM PENANGANGAN PANDEMIC COVID 19 DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN).....	115
10. ELEKTABILITAS KEPALA DAERAH & PANDEMI COVID-19.....	137

# DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Instrumen untuk KPM.....	123
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen untuk Agen.....	123
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas .....	124
Tabel 4 Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konvensi Mutu, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	125
Gambar 1 Quadral-loop Learning.....	8
Gambar 2 Contoh Gambar/ Poster Propaganda di Vietnam .....	17
Gambar 3 Pemetaan Tambahan Jaring Pengaman Sosial.....	121
Gambar 4 Hasil Survey berdasarkan keluarga penerima manfaat dan penilaian atas agen e-warong .....	128
Gambar 5 Tingkat Digitalisasi di Indonesia.....	143
Grafik 1 Rasio Tes per 1 Juta Penduduk di ASEAN (4 Mei 2020).....	23
Grafik 2 Keadaan Rumah Tangga Sekarang Dibanding Sebelum Adanya COVID-19.....	119
Grafik 3 Hasil Survei SMRC Periode Maret 2020 – Mei 2021.....	138
Grafik 4 Hasil Survei Indikator Periode Februari 2020 – April 2021.....	138

# PERBANDINGAN PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA DAN VIETNAM

Leo Agustino<sup>1</sup>  
Mona Sylviana<sup>2</sup>

## PENDAHULUAN

Di awal tahun 2021, satu tahun sejak Direktur Jenderal WHO mendeklarasikan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hampir semua pemerintah di dunia masih terus berjuang mengatasinya. Virus korona yang pertama kali diberitakan di Wuhan, China, pada Desember tahun 2019 itu menyebar sangat cepat dan memiliki daya mematikan. Hingga WHO membuat sub-web khusus dalam portal utama mereka<sup>3</sup> dan pada Maret 2020 WHO mengeluarkan *Strategic Preparedness and Response Plan* (WHO, 2020) untuk mendukung pemerintah negara-negara di dunia mengantisipasi penyebaran Covid-19. Dokumen tersebut menginformasikan temuan pengetahuan terakhir virus dan menerjemahkan temuan itu ke dalam tindakan strategis sebagai panduan mengembangkan rencana operasional sesuai konteks di masing-masing negara (regional).

Beberapa negara berhasil menurunkan kurva penyebaran virus. Sebagian lainnya belum berhasil, termasuk Indonesia salah satunya. Merujuk laman [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) (2021) tampak kurva paparan infeksi virus korona di Indonesia terus naik; bahkan memunculkan gelombang Covid-19 kedua pada Juli 2021. Ketidakberhasilan ini tentu ada penjelasannya. Mengutip Agustino (2020a), ada tiga hal yang menyebabkan hal itu terjadi, yakni: pertama, narasi negatif dan lambannya respons pemerintah atas penyebaran Covid-19. Narasi-narasi yang disampaikan oleh elit pemerintahan terutama sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya *sense of crisis* dan *urgency* sehingga kebijakan yang dihasilkan pun menjadi tidak tepat sasaran. Kedua, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada pengendalian virus korona terkatung-katung. Ketiga, ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga

---

<sup>1</sup> Dosen di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Email: [leo.agustino@untirta.ac.id](mailto:leo.agustino@untirta.ac.id)

<sup>2</sup> Peneliti Senior di Institut Nalar, Bandung. Email: [wajahterakhir@yahoo.com](mailto:wajahterakhir@yahoo.com)

<sup>3</sup> <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

atas himbauan pemerintah untuk menjalankan instruksi atau protokol kesehatan.

Sementara Mietzner (2020) menyatakan bahwa ketidakberhasilan pemerintah Indonesia melandaikan kurva paparan Covid-19 disebabkan oleh perilaku anti-sains, sikap keagamaan yang konservatif, polarisasi pasca-pemilihan umum tahun 2019, dan korupsi. Hal ini sejalan dengan temuan Soderborg & Muhtadi (2020) yang menjelaskan perilaku masyarakat yang tidak patuh atas arahan pemerintah. Penggunaan masker, mencuci tangan, *social distancing*, dan arahan untuk tinggal di rumah pun tidak diindahkan terutama oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial-ekonomi. Karena itu, tidak heran apabila lembaga nirlaba *Deep Knowledge Group* ([www.dkv.global](http://www.dkv.global), 2020; [www.analytics.dkv.global](http://www.analytics.dkv.global), 2020a; 2020b), mendudukkan Indonesia diperingkat ke-97 dari 100 negara dalam penanganan Covid-19.

Berbeda halnya dengan Vietnam. Pada 23 Februari 2021, Vietnam berhasil menekan angka infeksi Covid-19 dengan kasus kumulatif terkonfirmasi sebanyak 2.432 kasus dengan total korban meninggal dunia sebanyak 35 orang ([ncov.moh.gov.vn](http://ncov.moh.gov.vn), 2021). Menurut Ha *et al.* (2020), kecepatan merupakan kuncinya. Seminggu setelah kasus pertama, pada 30 Januari, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan kontrol Covid-19 yang terdiri dari 24 anggota berasal dari 23 kementerian, komite, perwakilan media; di bawah kepemimpinan Wakil Perdana Menteri, Vu Duc Dam. Di antara semua anggota Satgas yang memegang kendali adalah Kementerian Kesehatan (*Ministry of Health*, MoH). Selain itu, *Emergency Public Health Operations Center* (EPHOC) memandu seluruh *Center for Diseases Control* (CDC) untuk melakukan tindakan epidemiologis: deteksi kasus, isolasi, pelacakan kasus. Meskipun terjadi beberapa kasus kesalahan dalam bertindak (La *et al.*, 2020), tetapi Vietnam cepat bangkit untuk memperkuat atau mengubah kebijakannya.

Upaya antisipasi dan mitigasi pandemi Covid-19 di setiap negara berbeda-beda. Dalam konteks formulasi kebijakan, misalnya, Pemerintah China langsung melakukan karantina 11 juta penduduk Kota Wuhan (23 Januari 2020), dan memperluas karantina ke kota-kota di sekitarnya yang total berjumlah 55 juta orang (Van Nguyen *et al.*, 2021). Karantina dilakukan secara ketat, setiap wilayah hanya mempunyai satu pintu keluar-masuk sehingga memungkinkan pemantauan yang mudah dan keharusan semua orang untuk mengunduh aplikasi yang memungkinkan pihak berwenang memantau mobilitas, interaksi, serta situasi kesehatan mereka.



Berbeda dengan Pemerintah Taiwan. Negara yang sangat dekat dengan episentrum virus itu, sama sekali tidak melakukan karantina. Pemerintah Taiwan melalui Kementerian Kesehatan dan industri kesehatan bergerak cepat memproduksi masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *Personal Protective Equipment* (PPE) dalam jumlah massal. Tidak hanya itu. Pemerintah Taiwan pun mengarahkan Kementerian Pariwisata untuk menutup jalur-jalur masuk ke negara tersebut terutama dari negara China, serta memanfaatkan semua platform komunikasi agar warga yang sehat maupun yang terpapar terkawal dengan sangat pasti (Hui, 2020; Wei, 2020). Bahkan dalam konteks keuangan, Kementerian Keuangan Taiwan menganggarkan dana yang sangat besar senilai NT\$19,6 Miliar (atau setara dengan Rp10,6 Triliun) untuk penyediaan layanan kesehatan seperti pemeriksaan pasien, isolasi pasien, pembelian alat kesehatan, dan lainnya (Lin, 2020).

Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada satu pun strategi respons terbaik yang berlaku untuk semua. Satu kebijakan belum tentu bisa diterapkan sama di negara atau wilayah lainnya. Banyak faktor yang melatarinya. Situasi pandemi Covid-19 menjebak negara-negara ke dalam krisis yang saling berkelindan dalam situasi ketidakpastian berkepanjangan (Dunlop *et al*, 2020). Kesungguhan penanganan pandemi virus korona harus dilakukan secara cepat dengan menempatkan kesungguhan pemerintah sebagai motor penggerak dalam menanganinya. Kebijakan pemerintah harus menjadi ujung tombak dalam menghadapi pandemi Covid-19. Maka, di sinilah pentingnya *policy learning* (pembelajaran kebijakan) sebagai jalan keluar dari situasi krisis. Meskipun tidak jarang situasi krisis membuat pengalaman pembelajaran menjadi sangat mahal. Pembelajaran kebijakan penting untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengelola situasi krisis dan untuk mengambil tindakan adaptif dalam menghadapi situasi yang terus berubah.

Pembelajaran kebijakan sebagaimana dikatakan Moynihan (2009: 189), "*the collective identification and embedding of practices and behaviors that improve crisis response*," juga sejalan dengan penjelasan Dunlop & Radaelli (2018: 257), "... *the updating of beliefs based on lived or witnessed experiences, analysis or social interaction*." Tapi itu tidak mudah, dalam proses pembelajaran selalu muncul ketidaklengkapan. Kemampuan yang terbatas untuk menilai semua aspek situasi masalah atau mengumpulkan dan memproses semua informasi yang relevan muncul, sehingga informasi masalah membanjiri kapasitas kognitif atau kemampuan perilaku aktor. Pembelajaran akan semakin berat dalam situasi krisis yang tidak pasti,

berisiko, dan ambiguitas yang tinggi, akan melahirkan banyak hambatan dalam proses pembelajaran. Di luar itu semua, yang terpenting locus pembelajaran tidak eksklusif untuk pemerintah. Kepentingan dan tindakan pemangku kepentingan yang beragam, tumpang tindih, atau konflik akan menciptakan ketegangan, yang niscaya menghambat evaluasi dan pemahaman situasi (Langenberg & Wesseling, 2016).

Artikel ini menganalisis pembelajaran kebijakan (*policy learning*) penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Indonesia dan Vietnam. Analisis komparatif *policy learning* memiliki potensi untuk menjelaskan mekanisme kausal dalam proses pembelajaran dan memberikan implikasi desain kebijakan yang dapat ditransfer (Dunlop & Radaelli, 2020). Selain itu pula, artikel ini bertujuan menjelaskan perbedaan pendekatan kedua negara dalam menangani pandemi Covid-19 dengan fokus pada *policy learning*. Indonesia dan Vietnam dipilih secara purposif, di mana kedua negara itu memiliki beberapa kesesuaian sehingga dapat dilihat secara komparatif. Kedua negara ini memiliki iklim yang relatif sama. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi dapat membantu memperlambat penyebaran virus, walaupun hubungan antara iklim dan Covid-19 menunjukkan bahwa situasi cuaca seperti kelembaban, presipitasi, radiasi, suhu, dan kecepatan angin memainkan peran sekunder dalam penyebaran virus (Briz-Redón & Serrano-Aroca, 2020).

Indonesia dan Vietnam pula dipilih karena pernah mengalami beberapa wabah penyakit menular, seperti SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*), H1N1pdm09 virus (flu babi), MERS-CoV (*Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus*), dan flu burung (*Avian Influenza, AI*). Komparasi kedua negara juga menarik karena perbedaannya. Vietnam dianggap negara rentan terpapar pandemi virus korona dibandingkan dibandingkan Indonesia karena (i) secara geografis Vietnam memiliki perbatasan sepanjang 1.400 Km dengan China dengan perlintasan perjalanan dan perdagangan yang ramai (Islam *et al.*, 2020); (ii) Vietnam negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan sumber daya terbatas (Le, 2020); dan (iii) berdasarkan penilaian Global Health Security Vietnam menduduki peringkat ke-50 dari 195 negara dan Indonesia berada di peringkat ke-30 (John Hopskin Center for Health Security, 2019).

## KERANGKA KONSEPTUAL

Secara konseptual, kebijakan yang antisipatif dan tanggap dianggap mampu mereduksi akibat negatif dari suatu situasi krisis – seperti COVID-19 saat ini (Nair & Howlett, 2017; Rose, 2005; Weible & Heikkila, 2017). Dalam studi

kebijakan, dikenal pendekatan inkremental yang berupaya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada agar dapat dioptimalkan atau dikembangkan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang hadir belakangan (Agustino, 2020b: 118). Model inkremental menempatkan *policy learning* dalam *policy formulation* dan *policy implementation* (Barberio, 2014; Dunlop & Radaelli, 2018). Dalam arti kata lain, model inkremental mengedepankan “pembelajaran kebijakan” (*policy learning*) – dalam konteks artikel ini bertujuan untuk menangani masalah Covid-19.

Jika ditarik ke belakang, studi kebijakan publik sebenarnya sudah membincangkan, mendebatkan, dan mengembangkan konsep *policy learning* (Deutsch, 1963; Heclo, 1974; Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Deutsch (1963) sebagai misal (meski tidak menggunakan istilah *policy learning*) menjelaskan bahwa kebijakan adalah hasil dari proses pembelajaran dan pembangunan rasionalitas yang diterjemahkan oleh para pembuat kebijakan dalam bentuk regulasi. Artinya, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan suatu hasil dari proses pembelajaran para pembuat keputusannya berdasar pada umpan balik (*feedback*) dan arahan (*steering*) yang diperolehnya secara terus-menerus. Tentu proses pembelajaran ini mengalami pengayaan dan penyesuaian searah dengan dengan situasi lingkungan, budaya, dan karakter di mana kebijakan tersebut akan diformulasi dan diimplementasi. Sejalan dengan itu, Heclo (1974) menerangkan pula bahwa *policy learning* adalah upaya para pembuat keputusan untuk mengkreasi, mengasimilasi, dan mengorganisasikan pelbagai informasi yang diperolehnya dari memahami, meniru, atau mereplikasi kebijakan-kebijakan pihak lain dalam rangka menyelesaikan masalah atau meminimalisir ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pada tahun 1990-an, Sabatier & Jenkins-Smith (1993) mentakrifkan *policy learning* dalam versi mereka, di mana mereka menyatakan bahwa “pembelajaran kebijakan” adalah *incremental policy change* yang dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan para aktor kebijakan atas situasi yang terus menerus berubah. Oleh karena perubahan ini berkelindan dengan ketidakpastian, maka para aktor kebijakan perlu merefleksi dan belajar bahkan meniru kebijakan dari tempat atau negara lain (dan disesuaikan dengan situasi di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan) guna menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Titik tekan *incremental policy change* adalah upaya melakukan proses pembelajaran melalui *trial and error* kebijakan sebab tidak

ada satu panduan tunggal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan semua masalah di dunia ini. Meski begitu, untuk menekan error dari proses “pembelajaran kebijakan” tersebut, maka O’Donovan (2017) mensyaratkan waktu yang tepat dalam menerapkan kebijakan (*timely decision*) dan pemilihan atas kebijakan itu sendiri. Upaya meniru atau mereplikasi kebijakan pada periode awal diistilahkan dengan nama *critical frame reflection* (Schön & Rein, 1994), namun kini lebih dikenal dengan istilah *policy learning* (Dunlop, 2017; Dunlop *et al.*, 2018).

Proses saling belajar dari kebijakan-kebijakan yang ada di wilayah atau negara lain sudah banyak dikaji. Studlar (2015) misalnya, menjelaskan bagaimana kebijakan pengendalian rokok di Irlandia berhasil direplikasi di negara-negara Eropa sehingga rokok menjadi sesuatu yang dilarang di tempat kerja dan tempat umum lainnya. Ada lima faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran kebijakan tersebut: (i) agenda (yang rencanakan secara spesifik), (ii) setting sosio-ekonomi (termasuk mendorong opini publik untuk menentang rokok), (iii) jaringan (kerja antar-para pemangku kepentingan), (iv) lembaga (penggerak), dan (v) tentunya dukungan data dan informasi yang bersifat saintifik. Hal serupa juga dianalisis oleh González-López (2019) dengan kasus yang berbeda.

González-López (2019) meneliti mengenai kapasitas pemerintah daerah di Wilayah Galicia, Spanyol Utara. Awalnya, Pemerintah Daerah di Galicia dianggap tidak inovatif dan kompeten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Namun secara perlahan, Galicia berubah dan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Apa kunci keberhasilannya? Satu yang utama adalah *policy learning* dari daerah-daerah yang telah berhasil. Tapi tidak hanya itu. Para pembuat keputusan Galicia melakukan imitasi dari pemerintah pusat agar bekerja optimal, termasuk dalam hal *policy formulation* (*policy-making*). Selain itu, agar hal ini diterima oleh birokrat yang sudah terlalu nyaman dengan situasi di Galicia, maka perlu ada rasionalitas baru yang ditanamkan pada diri birokrat di wilayah yang berbatasan dengan Portugal itu. Hasilnya sangat menggembirakan. Pemerintah di Galicia menjadi sangat inovatif dan kompeten dalam menjalankan peran pemerintahan.

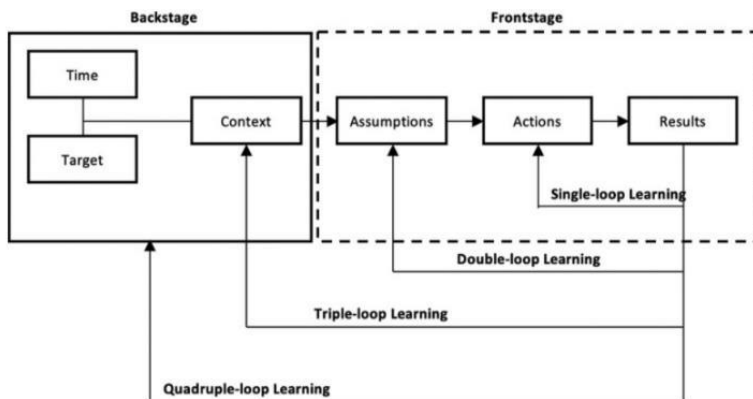
Salah satu kajian menarik *policy learning* juga dibahas oleh Kay (2017) di bidang kesehatan dengan kasus di Australia. Menurutnya, sebuah “kebijakan yang baik” bagi suatu wilayah/daerah tidak bisa begitu saja direplikasi atau diimitasi. Apabila hal ini tidak diindahkan, maka *policy failures* lebih sering muncul dari pada keberhasilannya. Oleh sebab itulah, Kay (2017) menilai perlu ada pemilihan kebijakan yang sesuai, penerapan nilai (*value*)

yang disesuaikan dengan situasi dan situasi wilayah yang akan mereplikasi, serta waktu (*timing*) yang tepat untuk menerapkan kebijakan. Selain itu, keberhasilan proses pembelajaran kebijakan perlu ditopang pula oleh “pembentukan” pemahaman warga atas tujuan kebijakan (Boeren, 2016; Dunlop, 2017b; 2017a). Artinya, *policy learning* bukanlah suatu pendekatan yang sederhana. Tetapi memerlukan penilaian dan penyesuaian agar bisa diterapkan pada suatu situasi wilayah tertentu. Termasuk juga perihal internalisasi nilai atau ide agar publik menerima dan menjalankan kebijakan baru tersebut. Sebab, menurut Dunlop (2017a; 2017b), jika nilai, ide, atau gagasan yang hendak diterapkan gagal dipahami oleh publik, maka *policy failures* lebih mudah muncul daripada sebaliknya. Karena itulah, proses sosialisasi, kampanye, hingga advokasi harus benar-benar berjalan dengan baik. Minimnya proses-proses tersebut menjadi biang keladi dari kegagalan kebijakan (*policy failures*).

*Policy learning* dari studi organisasi memperkaya kajian ini. Sebagaimana *policy learning* yang dikembangkan oleh Lee et al. (2020) dalam melihat negara mengatasi situasi krisis: model pembelajaran quadruple-loop. Model ini mengembangkan pembelajaran organisasi yang mengatakan bahwa proses pembelajaran dalam suatu organisasi bukanlah fenomena satu kali, melainkan terjadi melalui beberapa *loop* (Argyris, 1976). Pertama, pembelajaran *single-loop* yaitu hubungan antara tindakan dan hasil mengatasi masalah dengan cara dangkal. Aktor hanya fokus pada apakah mereka melakukan hal yang benar untuk membuat segala sesuatunya bekerja. Dalam pembelajaran *double-loop*, aktor mengatasi masalah dengan solusi permanen dan otentik yang lebih baik dengan menjelaskan perubahan asumsi yang memungkinkan aktor menghindari konsekuensi negatif dari pembelajaran *single-loop*. Pembelajaran *double-loop* tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan di lingkungan eksternal organisasi. Maka, pembelajaran *triple-loop* secara khusus menekankan pentingnya tanggapan aktif organisasi terhadap perubahan di lingkungan eksternal yang melibatkan penilaian kembali budaya, prinsip, bahkan paradigma. Dengan metode ini, organisasi mengembangkan strategi untuk merespons dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang dinamis (Kusters et al., 2017). Namun, pembelajaran *triple-loop* tidak memasukkan mekanisme pembelajaran berkelanjutan, yang merupakan elemen penting dalam mencari solusi dalam situasi krisis yang tidak pasti dan kompleks di mana lingkungan eksternal dan organisasi berinteraksi satu sama lain tanpa henti sampai suatu masalah dapat diselesaikan.

Model pembelajaran *quadruple-loop* diperlukan ketika sifat masalah dan konteks baru, serta pengalaman masa lalu, secara simultan mempengaruhi organisasi dalam menemukan solusi. Memahami sifat yang khas dari situasi krisis penting untuk pembelajaran organisasi karena sering kali menentukan strategi yang relevan (Kim & Moon, 2015). Kemudian, berbagai karakteristik konteks sosial dan politik yang jadi determinan dalam proses pembelajaran penting untuk memahami bagaimana pemerintah menangani situasi krisis. Terakhir, kebijakan yang lahir dari pengalaman masa lalu terkait erat dengan memori kelembagaan (Hardt, 2018). Model ini mampu memeriksa komponen penting yang memfasilitasi pembelajaran, termasuk proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransfer pengetahuan yang berada di luar organisasi (Lee *et al.*, 2020). Lebih lanjut, Lee *et al.* (2020) menambahkan bahwa target, konteks, dan waktu yang berada di luar organisasi merupakan bagian belakang (*backstage*) panggung pembelajaran organisasi yang penting untuk membentuk bagian depan (*frontstage*) (Lihat Gambar di bawah). Kedua komponen itu saling mempengaruhi dan pembelajaran dilanjutkan dari waktu ke waktu sampai organisasi mendapatkan solusi yang rasional dan lengkap.

Gambar 1 Quadral-loop Learning



Sumber: Lee *et al.* (2020)

Berangkat dari paparan sebelumnya, artikel ini mendiskusikan penanganan Covid-19 yang dilakukan Indonesia dan Vietnam dengan

menumpukan pada *policy learning* model pembelajaran *quadruple-loop*. Model ini adalah mekanisme pembelajaran yang komprehensif dan berkelanjutan yang menggabungkan pengalaman masa lalu, konteks politik dan sosial, dan karakteristik khusus dari masalah baru untuk menemukan solusi akhir. Artikel ini akan menganalisis komponen penting dari *policy learning* yaitu determinan internal organisasi (sebagai bagian belakang panggung atau backstage), termasuk proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransfer pengetahuan. Ini karena perkembangan organisasi, sebagaimana dikatakan Argote (2011: 450), “*a process of creating, retaining, and transferring knowledge within an organization*”; diperoleh dari pembelajaran organisasi dengan merefleksikan kegagalan masa lalu, mengumpulkan faktor keberhasilan dan kegagalan, dan berbagi informasi untuk bekerja lebih baik dan mengurangi kemungkinan kegagalan di masa mendatang.

Perihal backstage akan melihat bagaimana pengalaman wabah penyakit menular dijadikan landasan perubahan asumsi atau paradigma untuk membentuk kebijakan/strategi mengenai sistem kesehatan. *Backstage* kemudian keluar ke depan panggung (*front-stage*) menjadi kebijakan dan strategi selama menangani pandemi Covid-19; lalu kembali lagi ke belakang panggung, dan seterusnya (Lee *et al*, 2020). Artikel membatasi analisis tiga strategi/kebijakan dari masing-masing negara, 3T yaitu *Testing* (pengujian), *Tracing* (pelacakan kasus), dan *Treatment* (dalam kontes artikel ini adalah isolasi); sebagai standar penanganan Covid-19 (WHO, 2020). Ketiga aspek tersebut harus menjadi kesatuan strategi yang saling berinteraksi, saling memperkuat, untuk bisa efektif menangani pandemi Covid-19. Isu lain seperti strategi komunikasi, teknologi komunikasi, partisipasi masyarakat, alokasi anggaran, hubungan internasional, dan lainnya; sedikit saja akan disentuh bila relevan.

## **BAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Pembelajaran dari Masa Lalu**

Sebelum pandemi Covid-19, Vietnam selama 20 tahun bergelut dengan pengalaman berbagai penyakit menular, di antaranya SARS pada tahun 2003-2004, H5N1 (flu babi) pada tahun 2008, A1/H1N1 (flu burung) tahun 2009 yang masih terus berlangsung dalam jumlah kecil (2018). Setelah wabah SARS yang menginfeksi puluhan petugas kesehatan dan ribuan warga meninggal, Vietnam meningkatkan investasi untuk infrastruktur kesehatan masyarakat. Pada 2013, Vietnam mendirikan *General Department of Preventive Medicine* (GDPM), sebuah lembaga di lingkungan Kementerian Kesehatan (MoH) yang

mengeluarkan kebijakan kesehatan masyarakat dan arahan strategis kegiatan kesehatan masyarakat. GDPM menaungi *Public Health Emergency Operations Centers* (PHEOCs) untuk operasional situasi pandemi penyakit menular yang dimotori para epidemiolog terlatih keluaran Field Epidemiology Training Program, sebuah program kerja sama pemerintah dengan CDC AS dan WHO.

Kini, Vietnam telah memiliki 4 lembaga regional sejenis (Utara, Selatan, Pantai Tengah, dan Dataran Tinggi Tengah) yang secara teknis kuat dengan kapasitas laboratorium yang cukup maju. Para epidemiolog terlatih itu yang mengelola lembaga regional dan secara jaringan menjalankan latihan serta pelatihan untuk mempersiapkan pemangku kepentingan membantu pemerintah mengelola kesiapsiagaan dan upaya tanggap terkait wabah atau pandemi (Pollack *et al.*, 2020).

Pada 2016, Vietnam dengan bantuan CDC AS melakukan uji coba program pengawasan kesehatan berbasis kejadian (*event-based surveillance*, EBS) pada 6 rumah sakit di 2 provinsi. EBS penting untuk mendeteksi secara dini kemunculan wabah penyakit dan kejadian kesehatan akut masyarakat dengan sistem pengumpulan data secara berjenjang, mulai dari *Commune Health Station* (CHS) di tingkat komunitas, *District Health/Preventive Medicine Centre* (DPMC) di tingkat distrik, provinsi, daerah, hingga ke GDPM di tingkat nasional. Program ini ditingkatkan secara nasional pada 2018 dengan terbagi menjadi dua sektor yang paralel namun saling terkait; sektor kuratif dan preventif (Otsu *et al.*, 2020). EBS mengharuskan semua sektor kuratif, yang meliputi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (baik pemerintah maupun swasta), melaporkan temuan penyakit dan kejadian ke database pusat untuk memastikan MoH dapat melacak perkembangan epidemiologi di seluruh negeri secara *real-time*. Sektor kuratif berkoordinasi dengan bidang preventif di tingkatnya masing-masing yang memberdayakan anggota masyarakat, termasuk guru, apoteker, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bahkan tabib obat tradisional; untuk melaporkan kejadian kesehatan masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi kelompok orang yang memiliki gejala serupa yang mungkin menunjukkan munculnya wabah (Otsu *et al.*, 2020).

Pengalaman yang kemudian memperkuat komponen internal organisasi, dalam hal ini sistem kesehatan masyarakat di Vietnam, merupakan salah satu faktor keberhasilannya merespons pandemi Covid-19. Dalam penelitian Otsu *et al.* (2020), EBS terbukti sudah telah melembaga di Vietnam dengan satu contoh kasus di Rumah sakit Binh Thuan. Staf rumah sakit itu mendeteksi pasien dengan pneumonia dengan *subviral particles* (SVP) pada 7



Maret 2020. Pasien tersebut baru melakukan perjalanan dari Kota Ho Chi Minh ke Amerika Serikat dengan transit di Incheon, Korea Selatan, pada 22 Februari 2020, dan melakukan perjalanan kembali ke Ho Chi Minh dari Washington DC, AS, melalui Qatar pada 2 Maret. Staf rumah sakit mencurigai kasus ini sebagai kasus Covid-19 karena pasien memenuhi semua kriteria klinis, meskipun pasien tersebut tidak memenuhi kriteria riwayat perjalanan pada saat itu (lokasi-lokasi yang dikunjungi pasien di luar negeri, pada saat itu, tidak ditetapkan sebagai daerah yang terkena wabah oleh otoritas Vietnam). Kecurigaan itu disampaikan ke *Provincial Centre of Disease Control* (PCDC) untuk meminta saran perlu tidaknya mengambil sampel pasien. Setelah disarankan untuk mengambil sampel dan terbukti pasien dinyatakan positif Covid-19, PCDC Binh Thuan segera melakukan investigasi kasus dan pelacakan kontak, yang akhirnya mengidentifikasi 8 kasus tambahan (anggota keluarga dan kontak bisnis).

Indonesia pun mengalami pelbagai macam wabah. Antara lain, SARS pada 2003 yang ditetapkan sebagai Penyakit Pernafasan Gawat Mendadak oleh Pemerintah Indonesia. Ketika itu terdapat 7 kasus suspek (seseorang dengan gejala tertentu) dan 2 kasus probable (seseorang dengan gejala tetapi hasil pemeriksaan). Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan perwakilan WHO di Jakarta, lalu mengaktifkan Kelompok Kerja Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan dengan membuka Pos Koordinasi (Posko) SARS dan pelayanan Hotline Services serta menyiapkan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianto Saroso sebagai rumah sakit rujukan SARS. Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*) dibagikan kepada seluruh penumpang transportasi yang datang dari negara terjangkit SARS. Dengan pertimbangan intensitas arus penumpang dari dan ke luar negeri yang tinggi, maka pengamatan terhadap kemungkinan masuknya SARS difokuskan kepada 16 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Indonesia. Komunikasi dan langkah-langkah koordinasi ditingkatkan dengan seluruh jajaran Dinas Kesehatan provinsi di Indonesia, seluruh rumah sakit di ibu kota provinsi, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk mengambil langkah menangkal masuknya SARS ke Indonesia. Komunikasi dan koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian Luar Negeri, serta menyiapkan rencana operasional dan dukungan logistik kesehatan. Tak kurang dari tujuh buku pedoman disusun membentuk empat tim (investigasi, verifikasi, pakar, dan advokasi) (Dzulfaroh, 2020a).

Kasus Flu Burung atau Avian Influenza (A H5N1) muncul di tahun 2005 dengan kematian pertama 3 warga Tangerang dan dinyatakan positif terinfeksi dari hasil sampel yang diteliti di laboratorium rujukan WHO di Hong Kong. Setelah itu, sebanyak 44 rumah sakit disiagakan untuk menangani penderita yang diduga terinfeksi. Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan, ada 200 laporan kasus dengan 168 kematian hingga tahun 2018 yang tersebar di 15 provinsi dan 58 Kabupaten/Kota. Kasus kematian yang cukup tinggi itu diwartakan WHO sebagai kasus kematian terbesar di seluruh dunia, dari 349 kematian akibat flu burung di seluruh dunia sejak 2003, 155 di antaranya terjadi di Indonesia (BBCNews, 2012). Pemerintah, dalam keterangan di laman sehatnegeriku kemkes (2012), melakukan upaya komprehensif baik pada hewan (antara lain *biosecurity*) maupun pada manusia dengan penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari kontak dengan unggas sakit; membiasakan cuci tangan pakai sabun, menjaga kesehatan, dan berobat saat tubuh mulai menunjukkan gejala tanda sakit. Selain itu, kesiapan fasilitas dan kewaspadaan dari para petugas kesehatan dipersiapkan dan ditingkatkan. Pada kasus MERS di tahun 2012, Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan travel warning, tetap mengizinkan WNI melakukan perjalanan ke negara Semenanjung Arab dan sekitarnya, dengan imbauan untuk memeriksakan diri ke dokter apabila ada gejala batuk dan sesak napas dalam kurun waktu 14 hari. Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melakukan pemantauan ketat terhadap laporan suspek dari daerah, laboratorium program dengan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) ke WHO *Collaborating Center* dengan hasil 100% disiagakan 24 jam untuk memeriksa sampel dari daerah-daerah (Dzulfaroh, 2020a).

Dalam menangani wabah penyakit menular, Indonesia memiliki beberapa regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan, dan Undang-Undang Bencana Nomor 24 Tahun 2007. Akan tetapi, regulasi itu sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan wabah penyakit menular dan kondisi mutakhir, misalnya, belum ada pengaturan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah karena undang-undang tersebut lahir sebelum diberlakukannya otonomi daerah pada 1999; tidak secara spesifik mengatur dan menetapkan ruang lingkungannya (objek yang diatur), dan tidak bisa mewadahi perkembangan penyakit baru (*new emerging disease*) maupun yang muncul kembali (*re-emerging disease*) (Sugiyatmi, 2020). Hal yang sama disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Doni

Monardo yang menyoroti Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan (Bnpb.go.id, 2020). Dikatakannya, regulasi itu hanya mengatur 4 pilihan karantina (karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB), tetapi belum dilengkapi penjelasan bagaimana upaya pencegahan, termasuk bilamana karantina itu diberlakukan.

Kenyataannya, Kementerian Kesehatan bersama 24 Kementerian dan Lembaga pada Desember 2019 mengeluarkan “Dokumen Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan Indonesia tahun 2020-2024” (*National Action Plan for Health Security*, NAPHS), yang menurut Menteri Kesehatan, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad(K), memuat panduan bagi seluruh Kementrian/Lembaga dalam meningkatkan kapasitas ketahanan kesehatan nasional (kemkes.go.id, 2019). Dokumen tersebut, lanjutnya, bersifat sebagai *living document* dan merupakan perihal yang penting dan strategis untuk segera diimplementasikan serta menjadi acuan untuk menyusun kegiatan teknis di Kementerian/Lembaga masing-masing. Penulis belum bisa menemukan atau mengakses dokumen tersebut untuk dapat melakukan analisis, dan mungkin, pandemi Covid-19 kadung datang tidak bisa dibendung oleh dokumen yang baru saja diluncurkan menjelang pandemi. Tidak adanya sistem kesehatan masyarakat, termasuk sistem mengantisipasi pandemi seperti Covid-19, membuat Indonesia menanganinya dengan kebijakan atau langkah-langkah fragmentasi, seperti, pembentukan lembaga atau Posko, imbauan dan reaksi sesaat ketika kasus mencuat; tanpa mengubah asumsi atau paradigma dalam pengelolaan penyakit menular.

### **B. Pembelajaran di Belakang Panggung (Backstage): Perubahan Paradigma**

Berdasarkan pengalaman menangani wabah di masa lalu, maka terdapat perbedaan signifikan bagaimana Indonesia dan Vietnam merespons kabar WHO mengenai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Respons pemerintah yang tampak dari narasi-narasi yang keluar dari elit pemerintah merupakan implikasi policy learning di mana pembelajaran kebijakan dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan para aktor kebijakan atas situasi yang terus menerus berubah (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993) untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada agar dapat dioptimalkan atau dikembangkan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang hadir belakangan (Agustino, 2020b). Analisis narasi-narasi elit ini dapat menggambarkan konstruksi berpikir pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan (Furst *et al.*, 2016; Gottweis, 2007; Leavy,

2017; Olson *et al.*, 2020) dan bagaimana implikasinya terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Indonesia sudah melakukan langkah-langkah sebelum kasus pertama diumumkan pada 3 Maret 2020 (Kemenlu.go.id, 2020), tetapi langkah-langkah itu bukan kesatuan strategi atau turunan dari suatu sistem kesehatan dalam menangani pandemi. Sebagai misal, pada Februari 2020, ketika WNI (238 orang) dipulangkan dari Wuhan dan dikarantina selama 14 hari di Pulau Natuna, pemerintah belum memiliki sistem dalam menangani wabah virus dengan prosedur 3T. Maka, langkah diambil pemerintah tidak konsisten. Pengujian WNI dari Wuhan yang tanpa gejala tidak lakukan, tetapi 188 WNI dari kasus kapal pesiar World Dream seluruhnya diuji. Pada saat itu, untuk negara yang demikian luas, Indonesia hanya melakukan pengujian di Institut Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Rochmyaningsih, 2020). Kasus tersebut merupakan pantulan ketidakseriusan Pemerintah Indonesia menanggapi penyebaran virus korona. Bahkan cenderung menganggap remeh. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan elit pemerintah yang disampaikan kepada publik. Pada Januari 2020, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menyatakan, “Masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus korona, enjoy saja” (Satria, 2020). Setelah pernyataan Menkes tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, (meski dinyatakan dalam berkelakar) yang mengatakan, “Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus korona pun tak bisa masuk [ke Indonesia]” (Garjito & Aditya, 2020). Nada yang sama pun dikatakan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia kebal Covid-19 karena doyan nasi kucing (Saubani, 2020a). Hingga pertengahan Februari 2020 tidak ada satu pun kebijakan yang diformulasi Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Covid-19.

Ketika seorang epidemiologis dari Universitas Harvard, Profesor Marc Lipsitch, menyatakan bahwa virus korona telah menyebar di Indonesia. Dia juga menilai bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal mendeteksi kehadiran Covid-19 didasarkan atas kajiannya tentang migrasi penumpang dari China ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia (Aida, 2020). Pernyataan itu tidak ditanggapi serius oleh ada satu pun elit pemerintah. Malah ditentang dari Menteri Kesehatan, “Itu namanya menghina, wong peralatan kita kemarin di-fixed-kan dengan Duta Besar Amerika Serikat. Kita menggunakan kit-nya dari AS” (Saubani, 2020b). Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, merespons dengan pernyataan yang anti-sains bahkan cenderung absurd. Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab mengapa virus korona tidak

masuk ke Indonesia adalah berkat doa para ulama yang selalu membaca doa Qunut (Maranda, 2020). Lain halnya dengan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo. Ia memperkenalkan kalung “Anti-Virus Corona Eucalyptus” yang dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) pada awal Juli 2020. Dengan sangat bangga, ia menyatakan bahwa kalung tersebut dapat membunuh virus korona hingga 42% dalam tempo 15 menit, dan akan membunuh virus korona sebanyak 80% jika kalung tersebut dipakai selama 30 menit (Prabowo, 2020). Pernyataan ini tentu mendapat protes keras dari Guru Besar Farmasi UGM, Profesor Suwijiyono Pramono, yang menyatakan bahwa penggunaan eucalyptus bermanfaat untuk melegakan pernapasan pada mereka yang mengalami gejala sesak napas dan mengencerkan dahak, tetapi tidak untuk membunuh virus korona. Oleh karena itu, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (UI), dr. Tri Yunus Miko Wahyono menegaskan bahwa yang diproduksi oleh Balitbangtan hanyalah sekadar jamu atau obat herbal bukan obat/vaksin virus korona.

Pernyataan anti-sains lainnya justru keluar dari pernyataan Presiden Jokowi sendiri. Pada Rapat Terbatas di Istana Bogor pada 28 Juli 2020, Presiden mengimbau menteri-menternya untuk lebih waspada akan datangnya gelombang kedua (*second wave*) Covid-19. Imbauannya ini kembali dikatakannya saat Presiden menghadiri Kongres Luar biasa Partai Gerindra pada 8 Agustus 2020. Kendati sebenarnya, pernyataan ini bukan baru kali itu saja disampaikannya. Salah satunya pada saat ia melakukan kunjungan kerja ke Posko Penanganan Covid-19 di Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Juni 2020. Kala itu, Presiden menyatakan (dikutip secara verbatim), “Kita tahu ancaman Covid belum berakhir ancamannya masih tinggi, situasinya juga masih berubah-ubah, masih sangat dinamis Oleh sebab itu kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua, muncul *seconde wave*” (Tambun, 2020). Pernyataan *second wave* tentu merupakan hasil dari pembelajaran para pembuat kebijakan atas refleksi mereka mengenai gelombang kedua yang terjadi di China, Korea, dan beberapa negara di Eropa. Namun malangnya pernyataan ini keliru sebab untuk kasus Indonesia gelombang pertama belum kelihatan puncaknya dan belum dilalui sehingga penyebutan *second wave* tidak tepat. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga belum berhasil mengatasi gelombang pertama yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Persoalannya sekarang, mengapa Presiden bisa menyampaikan informasi yang salah mengenai gelombang kedua tersebut? Jawaban singkatnya, Presiden tidak mendasari pernyataannya pada sains atau ilmu pengetahuan.

Berbeda halnya dengan Vietnam, menurut Van Nguyen *et al.* (2021), salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Vietnam adalah pola pikir para elit pemerintahnya. Tanggapan awal Pemerintah Vietnam, bahkan mulai sedari kabar tersiar dari Wuhan, adalah pengakuan bahwa virus corona sebagai penyakit menular yang mematikan. Sementara banyak negara memperdebatkan antara kesehatan dan pilihan ekonomi, Pemerintah Vietnam membuat keputusan tegas untuk memprioritaskan kesehatan daripada pertumbuhan ekonomi. Sejak Januari 2020, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc menyatakan “*chống dịch như chống giặc*” (memerangi pandemi seperti memerangi musuh) dan headline media massa serentak mewartakan “Kami akan menang atas virus ini, seperti yang telah kami lakukan atas banyak musuh sebelumnya.” Sistem pengeras suara, yang didirikan pada 1960-an khusus untuk tujuan memperingatkan warga tentang serangan dan pemboman langsung selama Perang Vietnam, mulai digunakan untuk mengkomunikasikan dan melakukan pembaruan informasi terkait Covid-19.

Menjadikan pandemi Covid-19 sebagai musuh dalam metafor “perang” bukan tanpa tantangan yang meneguhkan anggapan dominasi otoriter Partai Komunis Vietnam (Nguyen, 2020). Anggapan otoritarianisme sebagai satu-satunya katalisator keberhasilan Vietnam, tidak memperhitungkan kompleksitas di balik pesan pemerintah yang dibarengi mitigasi yang tepat dan cepat. Nguyen (2020) menambahkan, Pemerintah Vietnam sengaja membuat narasi yang berakar pada sejarah dan memori budaya negara itu untuk mendorong solidaritas dan aksi kolektif. Dengan sumber daya terbatas, Vietnam sangat bergantung pada warganya untuk bekerja sama, maka penggunaan kampanye bergaya propaganda untuk memastikan setiap orang menanggapi pandemi dengan serius. Penggunaan metafor “perang” dilandasi dua alasan, pertama, pesan yang kuat, konsisten, dan sumber yang dapat diandalkan; terbukti memobilisasi respons yang lebih terfokus dan meningkatkan motivasi.

Metafora perang juga berfungsi sebagai alat kognitif bagi warga untuk menghubungkan konsep yang dapat dikenali dengan konsep yang lebih abstrak dan asing. Alasan kedua adalah bahwa sebagian besar imajinasi budaya Vietnam dibangun atas persatuan nasional melawan “penjajah asing.” Sehingga metafor “perang” memungkinkan pemerintah Vietnam untuk membangkitkan asosiasi dengan situasi krisis saat ini; hambatan baru dibingkai oleh ingatan terkini, identitas bersama dan tradisi, dipasangkan dengan pesan yang konsisten, menghasilkan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi pada negara. Hal ini terbukti dengan survei yang dilakukan pada

akhir Maret oleh sebuah perusahaan riset opini publik menemukan bahwa 62 persen orang di Vietnam percaya bahwa tingkat tanggapan pandemi Covid-19 pemerintah “tepat” (La *et al.*, 2020).

Kepercayaan kepada pemerintah menarik kelompok-kelompok masyarakat terlibat jauh tanpa pamrih, misalnya komunitas seni (France-Presse, 2020). Kreativitas mereka memenuhi jalan-jalan di beberapa kota dengan poster bergaya propaganda, mirip dengan yang beredar di Perang Vietnam, antara lain gambar petani dan tentara digantikan pekerja kesehatan yang berdiri dengan latar belakang tangan terangkat (lihat Gambar di bawah). Slogan di beberapa poster ini berbunyi, “Mencintai negaramu berarti tetap di rumah.” Lebih mengejutkan lagi, di awal Maret 2020, lagu pop “Ghen” (Cemburu) dirilis Kementerian Kesehatan dalam bentuk video animasi dengan lirik yang mengajak masyarakat Vietnam “melawan virus Corona, Corona” ramai diperbincangkan di dunia maya (viral). Generasi muda Vietnam tidak ketinggalan melibatkan diri. Melalui aplikasi TikTok yang ditandai tagar dari pemerintah *#ghencovychallenge* tarian dan musik pun viral. Video asli seorang penari dan selebgram, Qang Dang, telah ditonton lebih dari 1,1 juta kali (France-Presse, 2020).

Gambar 2 Contoh Gambar/ Poster Propaganda di Vietnam



Sumber: mesin pencari google.com (2021)

### C. Vietnam di Depan Panggung: Serius dalam *Policy Learning*

Dalam menangani pandemi Covid-19, Vietnam terbagi dalam 4 Fase, Fase 1 sebelum 23 Januari 2020 (sebelum kasus pertama ditemukan), Fase 2 dari 23 Januari–5 Maret 2020, Fase 3 dari 6 Maret–25 Juli, dan Fase 4 dari 26 Juli. Di Fase 1 fokus pemerintah menganalisis ancaman yang mungkin ditimbulkan

Covid-19 untuk mengembangkan kebijakan yang tepat. Di saat yang sama, perbatasan Vietnam-China diperketat, mewajibkan karantina 14 hari untuk semua orang yang dari China (selanjutnya diperluas ke negara-negara lain). Sejak awal pun Pemerintah Vietnam telah memutuskan karantina (karantina mandiri, karantina di tempat nonmedis, dan karantina di fasilitas kesehatan) atau isolasi sebagai strategi melawan Covid-19 (Van Nguyen, *et al.*, 2021). Sebagai misal, pada 13 Februari 2020, pemerintah mengisolasi sebuah desa di provinsi Vinh Phuc Utara dengan populasi 10.600 orang selama 20 hari setelah 6 orang di desa itu dinyatakan positif terinfeksi virus (La *et al.*, 2020).

Strategi awal ini dilakukan melalui mobilisasi militer, karantina, dan agresif melakukan komunikasi dengan masyarakat, terutama melalui jejaring militer, media massa (cetak, elektronik, daring), akademisi, dan peneliti (La *et al.*, 2020). Pada akhir Januari 2020, dengan diinisiasi oleh Kementerian Sains dan Teknologi, pemerintah mengadakan pertemuan dengan virolog dari seluruh negeri. Pertemuan itu meyakinkan pemerintah pentingnya pengujian ke semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki gejala (asimtomatik), untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pengujian diperlukan untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi agar mereka cepat mengisolasi diri sehingga mencegah kemungkinan menginfeksi yang lain. Selain itu, mereka akan cepat diobati untuk mengurangi keparahan penyakit atau risiko jangka panjang lain, bahkan kematian. Pemerintah mendorong lembaga-lembaga sains pengembangan tes diagnostik. Dalam pertemuan itu, Institute of Military Medicine (IMM), VietNam Academy of Science and Technology (VAST), University of Technology (UOT) Hanoi; ditugaskan untuk mengembangkan alat pengujian (test kit) dalam waktu singkat. Lembaga-lembaga itu berhasil melakukannya dengan bantuan “subjek uji” (RNA COVID-19) dari National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) yang berhasil mengisolasi dan menumbuhkan Covid-19 di laboratorium dari sampel pasien (Thai *et al.*, 2020).

Keberhasilan NIHE dalam mempelajari dan mengembangkan sampel dari semua data masyarakat yang terinfeksi virus berkat sistem databasenya sudah berjalan dengan baik. Dalam hitungan minggu, tim peneliti telah menghasilkan alat tes yang andal (kit UOT pada awal Februari dan kit VAST dan IMM pada minggu pertama bulan Maret).<sup>4</sup> Selanjutnya, perusahaan swasta

---

<sup>4</sup> Test kit UOT Hanoi (peneliti utama Dr. Hoa Le dan Dr. Ha Nguyen): metode pengujian RT-LAMP (Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification, biaya US \$ 15, waktu pengujian: 70 menit. Test kit VAST (peneliti utama: Dr. Quyen Dong dan Dr. Khang Dinh: metode pengujian: real time RT-PCR (Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction), biaya: kurang dari US \$ 21, waktu pengujian: 80 menit sejak sampel diterima. Test kit IMM (peneliti utama Kolonel Dr. Son Ho): diproduksi oleh Viet A, biaya US \$ 19- \$ 25, metode pengujian: RT-PCR dan RT-PCR real-time, waktu pengujian: lebih dari satu jam (lebih cepat 2 langkah



(Viet A dan Thai Duong) memproduksi kit RT-LAMP dan kit RT-PCR dan diluncurkan pada 28 Februari. Setidaknya kini sudah terdapat 110 laboratorium di seluruh Vietnam yang dapat melakukan pengujian PCR real time dengan kapasitas 27.000 sampel per hari. Pada 30 April, Vietnam telah melakukan 261.004 tes, dengan 967 tes per kasus positif atau 2691 tes per satu juta populasi (Van Nguyen, *et al.*, 2021).

Pengujian digunakan sebagai detektor pelacakan kontak, peta jalan bagi petugas medis untuk menangani semua jaringan dan mencegah menyebar lebih jauh. Strategi pelacakan kontak di Vietnam menonjol karena komprehensif dan aspek penting dari pelacakan adalah mengidentifikasi dan mengkarantina kasus yang dicurigai berdasarkan risiko epidemiologis infeksi (jika mereka melakukan kontak dengan kasus yang dikonfirmasi atau melakukan perjalanan ke negara yang terkena Covid-19), bukan apakah mereka menunjukkan gejala (Pollack *et al.*, 2020). Masa inkubasi antara kontak virus dan gejala yang timbul rata-rata lima hari dan penularan dimulai dua hari sebelum gejala. Oleh karena itu, hanya ada waktu tiga hari dari titik kontak untuk menemukan dan mengkarantina kasus sebelum mereka berpotensi menulari ke orang lain. Sangat penting untuk bergerak cepat, memobilisasi peralatan pelacak kontrak, dan menemukan kontak. Berdasarkan itu, pemerintah membagi penelusuran kontak dalam tingkatan F0 sampai F5 dengan proses (Nguyen, 2020): (i) mengidentifikasi dengan pasien Covid-19 (F0) dengan siapa mereka berhubungan dan mungkin terinfeksi dalam 14 hari terakhir; (ii) semua kontak dekat (F1), yang didefinisikan sebagai orang-orang yang berada dalam jarak sekitar 2 meter atau melakukan selama 30 menit atau lebih, dikonfirmasi melalui test, jika F1 positif mengidap virus langsung diisolasi di rumah sakit, jika F1 negatif dikarantina di pusat karantina yang dikelola pemerintah selama 14 hari; (iii) Kontak dekat dari F1 (F2) diminta untuk mengisolasi diri di rumah selama 14 hari; dan seterusnya. Di sinilah pentingnya pejabat daerah dan petugas medis berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, mengidentifikasi tempat-tempat yang pernah dikunjungi F0 dan kegiatan yang mereka ikuti selama seminggu atau lebih sebelum dinyatakan positif.

Riwayat perjalanan dan aktivitas pasien yang dikonfirmasi tersedia untuk umum di situs pemerintah, artikel berita, dan media sosial. Pada 10 Maret pemerintah meluncurkan NCOVI, aplikasi “sistem pengawasan lingkungan” yang dilengkapi pelacakan kontak berupa peta kasus yang

---

dari pada protokol Charité tetapi memiliki kapasitas pengujian empat kali jumlah sampel sebagai kit CDC (Nguyen, 2020).

terdeteksi dan kelompok infeksi serta memungkinkan pengguna menyatakan status kesehatan mereka sendiri, melaporkan kasus yang dicurigai, dan memantau pergerakan real time orang-orang yang di karantina (Pollack *et al.*, 2020). Jejak epidemiologi semacam itu juga memungkinkan setiap orang memeriksa apakah mereka berisiko atau untuk memperingatkan orang lain di sekitar mereka. Persoalan privasi memang tidak bisa dihindari dan mencuat, tetapi banyak orang dengan senang hati menyerahkan beberapa informasi pribadi jika itu berarti menyelamatkan nyawa (Nguyen, 2020).

Nguyen (2020) menggarisbawahi bahwa Pemerintah Vietnam bukan tidak pernah salah langkah. Pada Fase 2 ada beberapa kesalahan yang terjadi (La *et al.*, 2020). Pertama, keterlambatan mendeteksi kasus pertama (seorang laki-laki 65 tahun dari Wuhan yang mengunjungi anaknya di Ho Chi Minh). Kedua, ketika Vietnam National Administration of Tourism menarik wisatawan asing masuk dengan “*Vietnam: Safe Haven*” di saat pandemi Covid-19 masih di tahap awal yang menyebabkan pasien ke-17, seorang wisatawan asing. Ketiga, kesalahan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan yang menutup sekolah selama satu minggu kemudian diperpanjang lagi hingga berminggu-minggu. Akibatnya, siswa, orang tua, dan pengajar berada dalam ketidakpastian setiap minggunya. Hal lain, kementerian gagal memberi panduan mengenai pembelajaran di rumah, sehingga alih-alih tinggal di rumah, banyak dari keluarga yang berlibur.

Kesalahan-kesalahan sangat mungkin terjadi di situasi krisis, hanya saja proses pembelajaran kebijakan situasi krisis menuntut perulangan perumusan strategi dari masalah yang timbul secara terus-menerus sampai masalah terselesaikan (Lee *et al.*, 2020). Dengan kata lain, pembelajaran quadruple-loop terjadi melalui proses pembelajaran berkelanjutan di mana serangkaian interaksi ganda dari belakang panggung dan depan panggung terjadi saat organisasi menemukan informasi atau pengalaman baru dari situasi baru dalam mengatasi masalah kebijakan tertentu (Lee *et al.*, 2020). Setelah ada kasus baru, setelah Fase 3 di mana selama 22 hari tanpa kasus, yakni pasien ke-17 akibat terbukanya pariwisata, Pemerintah Vietnam masuk di Fase 4 dengan semakin meningkatkan kewaspadaan. Peningkatan kewaspadaan itu melalui langkah-langkah, antara lain, penangguhan sementara penerbitan visa untuk semua orang asing selama 30 hari (efektif pada 18 Maret); wajib karantina 14 hari di fasilitas terpusat; penutupan semua sekolah untuk jangka waktu lama; semua organisasi keagamaan diminta menghentikan pertemuan massal, juga semua kegiatan budaya, olahraga, hiburan di tempat umum; penerbangan masuk ke Vietnam dihentikan dan

pembatasan perjalanan dalam negeri. Pada 1 April 2020, Vietnam melakukan penguncian (lockdown) selama 15 hari, kemudian ditambah menjadi 21 hari, di 28 provinsi dari 63 provinsi. Merujuk itu semua dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Vietnam melakukan penanganan Covid-19 secara serius dengan berkaca pada pentahapan fase penanggulangan virus mematikan tersebut.

#### **D. Indonesia di Depan Panggung: *Trial and Error?***

Setelah mengkonfirmasi kasus pertama, 3 Maret 2020, Indonesia membuat sejumlah kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, di antaranya dengan membentuk lembaga penanganan Covid-19 (Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19, selanjutnya disebut SPPC) yang di dalamnya adalah aktor-aktor dari lembaga eksekutif dan sederajat. Kebijakan pembentukan lembaga tersebut beberapa kali mengalami revisi atau perubahan, termasuk pencabutan: (i) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ter tanggal 13 Maret 2020; (ii) Keppres Nomor 9 tahun 2020 Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ter tanggal 20 Maret 2020; (iii) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ter tanggal 20 Juli 2020; dan (iv) Perpres Nomor 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 10 November 2020.

Terlepas persoalan regulasi, yang sebenarnya berarti paradigma negara dalam menangani wabah penyakit menular, persoalan lain yang penting melekat di SPPC adalah para aktor yang ditunjuk Presiden Jokowi bukan mereka yang kompeten masalah sistem kesehatan wabah penyakit menular. Jokowi menempatkan aktor militer dan kepolisian sebagai kunci-kunci penentu kebijakan dalam menangani Covid-19: Menteri Kesehatan, yang menjadi pusat penanggulangan wabah Covid-19 adalah seorang jenderal militer, Letnan Jenderal (Purn.) Terawan Agus Putranto dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 seorang jenderal bintang tiga, Letnan Jenderal Doni Monardo. Demikian pula dengan para deputinya yang merupakan Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kepala Polisi Republik Indonesia – keduanya adalah jenderal bintang dua. Ketika SPPC berada di bawah koordinasi Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), ketua dipegang oleh seorang

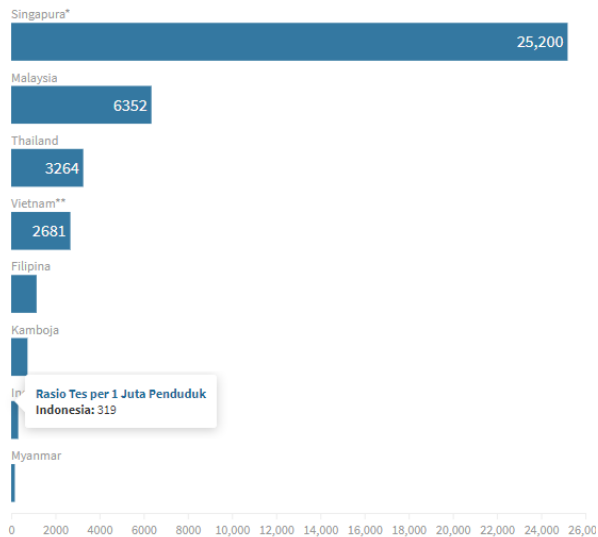
pengusaha yang sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Sementara wakilnya tetap dipegang oleh jenderal bintang empat, yakni: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa. Tidak ada satu pun pakar dari lembaga penelitian virus, mikrobiologi, epidemiologi, atau kesehatan – yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengambil peran menyelesaikan wabah – duduk di dalam struktur SPPC.

Ketidaktepatan para aktor di SPPC berbanding lurus dengan ketidaktepatan dalam membuat strategi penanganan yang mengakibatkan kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak pernah melandai. Dalam soal pengujian, pemerintah lambat melakukannya karena beberapa faktor. Pertama, birokrasi yang tidak adaptif dengan situasi krisis. Hal ini terkait dengan lambatnya pengesahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/214/202010 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 yang menjadi dasar hukum bagi keterlibatan beberapa laboratorium di seluruh Indonesia untuk melakukan fungsi pemeriksaan. Ini berawal dari regulasi, UU Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan (Pasal 5 Ayat 1): “Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan wilayah secara terpadu.” Selanjutnya (Pasal 11 Ayat 1): “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat ....” Regulasi ini menentukan lokasi pemeriksaan spesimen virus “hanya boleh” dilakukan di Jakarta, yakni di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes). Pemusatan ini tentu membuat pengambilan tindakan menjadi berjarak, berjenjang, dan membuat waktu semakin lama.

Pada Mei 2020, rasio pengujian di Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,4 per 1.000 penduduk, jika dibandingkan dengan Vietnam yang tercatat 2,7 orang per 1.000 penduduk dan terus meningkat di akhir Maret 2020 (lihat Gambar 3). Data lainnya, dari sekitar 8.000 orang yang diperiksa, Vietnam menemukan 1 kasus positif Covid-19. Sedangkan Indonesia, dari 7 orang diperiksa, 1 kasus positif langsung ditemukan (Uly, 2020). Artinya, bila Vietnam mengatakan kasus baru telah turun akan lebih meyakinkan karena mereka berusaha lebih keras untuk menemukan satu kasus positif saja, sedangkan di Indonesia, satu kasus positif ditemukan cukup dengan memeriksa 7 orang (Uly, 2020). Pada bulan Juli 2020, pengujian masih berada di angka 30.000 per hari dan di penghujung tahun 2020, tingkat pengujian mingguan telah meningkat menjadi 0,903 per 1.000 penduduk (tepat di bawah tingkat yang

direkomendasikan WHO yakni 1,0 per 1.000).<sup>5</sup> Akan tetapi, persoalannya kemudian, terjadi perbedaan signifikan pengujian antara Jawa dan luar Jawa. Misalnya, provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah masing-masing dapat menguji 6,9, 1,5, dan 1,4 per 1.000 orang, namun setidaknya 16 provinsi di luar pulau Jawa sedang berjuang untuk memenuhi target 1,0 per 1.000.

Grafik 1 Rasio Tes per 1 Juta Penduduk di ASEAN (4 Mei 2020)



Sumber: Gusman (2020)

Selain jumlah pengujian yang masih rendah, lamanya hasil pengujian berdampak pada efektifitas program pelacakan kasus yang sangat besar berpengaruh untuk menghentikan laju penyebaran virus corona (Dzulfaroh, 2020b). Jarak waktu antara sampel diambil dengan hasil pemeriksaan, dalam beberapa kasus, bisa mencapai 14-20 hari (bandingkan dengan standar WHO: 24-48 jam). Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas laboratorium dalam menguji hasil tes, tidak ada produk pengujian dalam negeri sehingga biaya mahal, dan keterbatasan jumlah ahli laboratorium (BBCNews, 2020). Selaras dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/9847/2020, pada Februari 2021 sudah terdapat 685

<sup>5</sup> Hal ini masih jauh dari standar minimum WHO yang menetapkan standar berdasarkan jumlah penduduk, maka jumlah minimal tes di Indonesia adalah 270.000 per minggu atau 54.000 orang per hari.

laboratorium dalam Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan kewajiban laboratorium melaporkan setiap hasil pemeriksaan spesimen COVID-19 melalui aplikasi Allrecord (Litbang.kemkes, 2021). Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan Kepala Pustlitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Dr. dr. Vivi Setiawaty, di laman Litbang Kemkes, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan terkait pendataan, yakni masih banyak laboratorium yang belum melaporkan hasil pemeriksaan secara teratur.

Jumlah pengujian tinggi memang tidak selalu paralel dengan upaya memutus rantai penyebaran virus, sebagaimana dilakukan oleh Jepang. Jepang tidak melakukan pengujian semasif Korea karena memilih melakukan prosedur pelacakan yang tepat. Jepang melakukan pelacakan prospektif (mengutamakan pelacakan kasus di tempat-tempat berpotensi menjadi kluster). Makenya, baik pengujian maupun pelacakan haruslah merupakan strategi yang merupakan pilihan yang terukur. Pada kasus Vietnam, selain jumlah pengujian yang terus ditingkatkan, pelacakan dilakukan sampai dengan 5 lapis kontak dari 1 kasus (anuran WHO hanya pelacakan antara 10–30 orang per 1 kasus positif terkonfirmasi). Setelahnya, Vietnam melakukan karantina agresif, dalam pengertian mengisolasi satu wilayah meskipun hanya terinfeksi hanya segelintir orang. Pemerintah Indonesia, yang dilakukan oleh SPPC daerah hanya melakukan pelacakan 1 kasus kepada 1-3 orang kontak dekat (KawalCOVID19, 2020b). Hal ini mengimbas pada mekanisme karantina. Pemberlakuan karantina individu dikenakan untuk mereka yang positif terinfeksi Covid-19 secara mandiri (di rumah). Seharusnya ini juga berlaku untuk mereka yang terjaring dalam pelacakan kasus (Orang Dalam Pantauan, ODP). ODP seharusnya melakukan karantina sambil menunggu hasil pengujian karena Covid-19 justru paling menular 1-3 hari sebelum munculnya gejala sakit. Tetapi untuk kasus ODP di Indonesia sukar dilakukan karena rendahnya pelacakan kasus.

Secara kewilayahan, Indonesia tidak melakukan penguncian (*lockdown*). Seperti dikatakan Jokowi, pilihan tersebut dengan pertimbangan karakter, budaya, dan tingkat kedisiplinan yang berbeda dengan negara lain (Intan, 2020). Indonesia melakukan apa yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020. PSBB tidak berlaku serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya mekanisme PSBB diatur

dalam lampiran *beleid* Permenkes No. 9 Tahun 2020<sup>6</sup> dan terdapat beberapa varian, PSBB proporsional, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM mikro. Dengan masih tingginya angka penyebaran Covid-19, PSBB maupun PPKM dinilai banyak kalangan tidak efektif, termasuk diakui Jokowi yang disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Bogor, 29 Januari 2022, “... ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki *index mobility*-nya, sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik. [...] saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten” (Tempo.co, 2021).

Apakah kegagalan PPKM maupun PSBB semata tidak konsistennya implementasi kebijakan tersebut? Ada beberapa faktor yang membuat karantina wilayah itu gagal. Pertama, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara para pemangku kepentingan dalam mengendalikan penyebaran virus korona di Indonesia. Misalnya, pada saat pemerintah pusat memutuskan untuk mengatasi sebaran virus korona dengan menerapkan mekanisme jaga jarak fisik antara manusia (*physical distancing*) dan tidak mengadopsi isolasi wilayah, maka seharusnya keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sebab Indonesia menerapkan sistem *unitarian state*, di mana pemerintah pusat punya kuasa lebih jika dibandingkan dengan federal state system. Namun, arahan untuk tidak melaksanakan lockdown tidak digubris oleh lima daerah. Kelima daerah tersebut justru mengimplementasikan *lockdown* dengan skala berbeda-beda. Daerah-daerah tersebut adalah: Tegal, Solo, Bali, Maluku, dan Papua.

Ilustrasi singkat mengenai *lockdown* di Kota Tegal cukup unik. Sebab, tidak lama setelah Pemerintah Pusat menyarankan mekanisme *physical distancing*, Dedy Yon Supriyono (selaku wali kota), justru mengumumkan mekanisme *local lockdown* untuk Kota Tegal. Kota ditutup, baik akses jalan protokol dalam kota maupun akses jalan penghubung antar-kampung. Alasan wali kota ketika itu sangat logis yakni untuk meminimalisir penyebaran virus korona di kotanya. Keputusan tersebut diambil karena alternatif kebijakan lainnya tidak mungkin diambilnya karena dianggap kurang mampu untuk mengendalikan penyebaran virus korona. Sebelumnya memang tidak adanya arahan yang jelas dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk mengendalikan Covid-19. Situasi sebegini mendorong Dedy untuk mengambil

---

<sup>6</sup> Ada 14 tata cara pengajuan PSBB bila suatu suatu wilayah akan memberlakukannya, antara lain, Menkes akan memberikan persetujuan/tidak maksimal 2 hari setelah pengajuan. Kepala daerah diwajibkan melampiri data gambaran epidemiologis dan aspek lain (ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan).

keputusannya sendiri yang dianggap mampu mengendalikan penyebaran virus korona di daerahnya. Hal yang serupa dilakukan pula di Solo, Bali, Maluku, dan Papua.

Kedua, strategi karantina wilayah dilakukan tanpa pemahaman. Banyak kalangan memasukkan faktor kegagalan itu karena belum optimalnya penegakan hukum (Sulasih, 2020; Soderborg & Muhtadi, 2020). Banyaknya masyarakat yang melanggar aturan selama PSBB atau PPKM dengan berbagai alasan, tidak dikenakan sanksi yang tegas dengan menerapkan secara maksimal, meskipun sanksi-sanksi sudah tertera detail dalam regulasi. Pelanggaran masyarakat ini bisa ditengarai sebagai gambaran tingkat partisipasi yang masih rendah, walaupun Penulis tidak bisa menyingkirkan faktor bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai PSBB maupun PPKM secara “acak.” Contohnya, pemberlakuan PPKM Jawa-Bali pada dasarnya tidak ada perubahan yang substansial dengan PSBB. Demikian juga dengan PPKM Mikro, sebagaimana disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito (Farisa, 2021). Strategi baru SPCC dalam pelaksanaannya berupa pos komando (posko) di tingkat desa dan kelurahan yang dipimpin kepala desa atau lurah serta beranggotakan dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak lainnya. Wiku menambahkan bahwa fungsi prioritas posko ialah untuk mendorong perubahan perilaku di masyarakat, memberikan layanan kepada masyarakat, pusat kendali informasi dan menguatkan pelaksanaan 3T hingga tingkat RT dan RW. Persoalannya adalah, untuk apa pergantian nama kalau tidak mengubah substansi? Strategi yang dikatakan SPCC sebagai “baru” apakah bukan memang seharusnya dilakukan? Sementara itu, tingkat angka terinfeksi Covid-19 yang pada November 2020 di kisaran 20%, pada 11 Januari 2021 meningkat sampai 31,1%,<sup>7</sup> yang berarti 1 dari 3 orang yang dilakukan pengujian dinyatakan positif (covid19.go.id, 2021). Ketimpangan-ketimpangan pengujian dengan rasio kasus positif tersebut menunjukkan penularan sudah tidak terkendali (Amali, 2021).

## PENUTUP

Artikel ini telah membahas perbandingan langkah atau strategi pemerintah Vietnam dan Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Beberapa strategi penanganan Covid-19 diterbitkan oleh kedua pemerintah negara seperti dengan cara menghentikan berbagai aktivitas usaha, mengubah kehadiran di sekolah menjadi belajar di rumah, dan mewajibkan para pekerja

---

<sup>7</sup> Ambang batas WHO sebesar 5%.



untuk bekerja di rumah (*work from home*), memberlakukan karantina, dan membentuk atau mengefektifkan lembaga penanganan Covid-19. Namun malangnya, usaha dan upaya “pembelajaran kebijakan” kedua negara tersebut tidak sama. Vietnam diakui berhasil, sebaliknya dengan Indonesia yang justru kurva kumulatif yang terinfeksi Covid-19 terus menunjukkan kenaikan.

Merujuk hal itu, persoalan penanganan virus korona di Indonesia belum berjalan optimal. Lantas pertanyaannya sekarang, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meratakan kurva yang terus naik? Untuk menjawab hal tersebut tentu dibutuhkan satu tulisan panjang lainnya, namun setidaknya merujuk pada upaya *policy learning* dari pengalaman sukses Vietnam, ada lima hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengubah paradigma penanganan wabah penyakit menular sehingga menempatkan kesehatan masyarakat di atas pertimbangan lain, seperti ekonomi atau politik. Untuk konteks Covid-19, SPPC harus dimotori oleh orang-orang yang kompeten di bidang tersebut, seperti epidemiolog, virolog, dan pakar kesehatan masyarakat; dan melibatkan sebanyak mungkin lembaga penelitian. Untuk selanjutnya, pemerintah memberikan kewenangan (berbentuk regulasi) dan memfasilitasi (infrastruktur, teknologi, kemampuan SDM, pendanaan, dan lainnya) kepada satu lembaga saja untuk membuat sistem penanganan kesehatan masyarakat terkait wabah penyakit menular yang terintegrasi-berjenjang dengan lembaga-lembaga lain.

Kedua, melakukan 3T sesuai prosedur dan aturan kesehatan. Pengujian dilakukan secara lebih massif dan merata di seluruh negeri, serta tepat sasaran. Ini dilakukan dengan mengembangkan dan memproduksi alat uji di dalam negeri yang dapat menekan biaya dengan melibatkan lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Pembinaan data pengujian dapat dilakukan bekerja sama dengan kampus atau sekolah (mahasiswa dan dosen), LSM, maupun mereka tidak bekerja karena terdampak Covid-19 untuk menambal kekurangan SDM. Pelacakan kasus mulai disiplin dilakukan sampai dengan minimal setara rekomendasi WHO dengan memberikan insentif dan pelatihan terstruktur kepada Bhabinkantibmas dan Babinsa yang merata keberadaannya di seluruh Indonesia. Memberlakukan karantina wilayah secara agresif dengan jangka waktu ditimbang berdasarkan tingkat penyebaran Covid-19 suatu wilayah. Dengan adanya kejelasan waktu itu, sektor-sektor lain (terutama sektor ekonomi) bisa membuat perencanaan lebih jelas untuk usaha mereka. Berkaitan dengan kewajiban pemerintah membiayai karantina wilayah, maka dibutuhkan relokasi anggaran penanganan Covid-19 yang lebih tepat serta mekanisme kontrol yang lebih baik. Strategi 3T tersebut dibarengi

dengan komitmen pemerintah dalam penegakkan hukum dan mekanisme kontrol yang lebih baik. Ketiga, perbaikan strategi komunikasi untuk meraih (kembali) kepercayaan publik. Informasi yang sampai kepada publik harus lebih transparan dan edukatif sehingga kasus seperti “keributan” yang tidak produktif tidak perlu terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020a). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.
- Agustino, L. (2020b). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2). Bandung: Afabeta.
- Agustino, L. & Wicaksana, H.H. (2020). Policy Analysis of Handling COVID-19: Experience China, South Korea, Italy and Indonesia. *Journal of Governance* 5(2): 179-201
- Agustino, L. (2021). Policy Learning and Handling of Covid-19 in Indonesia. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 13(1): 62-78.
- Aida, N. R. (2020). Pernyataan Ahli Harvard, WHO hingga Kemenkes soal Indonesia Negatif Virus Corona. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/11/070000665/pernyataan-ahli-harvard-who-hingga-kemenkes-soal-indonesia-negatif-virus>
- Amali, Z. (2021). Saat RI Akui Tes COVID-19 Salah Sasaran Jelang Setahun Pandemi. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://tirta.id/saat-ri-akui-tes-covid-19-salah-sasaran-jelang-setahun-pandemi-f9wv>
- Argote, L. (2011). Organizational Learning Research: Past, Present and Future. *Management Learning* 42(4), 439–446. <https://doi.org/10.1177/1350507611408217>
- Argyris, C. (1976). Single-Loop and Double-Loop Models in Research on Decision Making. *Administrative Science Quarterly* 21(3), 363. <https://doi.org/10.2307/2391848>
- Barberio, R. P. (2014). *The Politics of Public Policy*. Boston: Pearson.
- BBCNews. (2012). Indonesia Negara dengan Kasus Flu Burung Terbanyak di Dunia. Diambil 26 Februari 2021, dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2012/03/120308\\_birdfluindonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120308_birdfluindonesia)
- BBCNews. (2020). Indonesia “Kritis” Virus Corona: Target Uji PCR Jauh dari Standar Minimum di tengah Penyebaran Tinggi, “Banyak Orang di Luar Terinfeksi dan Menulari Orang Lain.” Diambil 28 Februari 2021, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53393688>
- Bnpb.go.id. (2020). Pandemi, Momentum Revisi UU Kekarantinaan Kesehatan. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://bnpb.go.id/berita/pandemi-momentum-revisi-uu-kekarantinaan-kesehatan>

- Boeren, E. (2016). *Lifelong Learning Participation in a Changing Policy Context: An Interdisciplinary Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Briz-Redón, Á., & Serrano-Aroca, Á. (2020). The Effect of Climate on the Spread of the COVID-19 Pandemic: A review of Findings, and Statistical and Modelling Techniques. *Progress in Physical Geography: Earth and Environment* 44(5), 591–604. <https://doi.org/10.1177/0309133320946302>
- covid19.go.id. (2021). Peta Sebaran COVID-19 | Covid19.go.id. Diambil 24 Februari 2021, dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>
- Daviter, F. (2019). Policy Analysis in the Face of Complexity: What kind of Knowledge to Tackle Wicked Problems? *Public Policy and Administration* 34(1), 62–83. <https://doi.org/10.1177/0952076717733325>
- Deutsch, K. W. (1963). *The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control*. New York: Free Press.
- Dunlop, C. A. (2017a). Pathologies of Policy Learning: What are They and How do They Contribute to Policy Failure? *Policy and Politics* 45(1), 19–37. <https://doi.org/10.1332/030557316X14780920269183>
- Dunlop, C. A. (2017b). Policy learning and Policy Failure: Definitions, Dimensions and Intersections. *Policy and Politics* 45(1), 3–18. <https://doi.org/10.1332/030557316X14824871742750>
- Dunlop, C. A., Ongaro, E., & Baker, K. (2020). Researching COVID-19: A Research Agenda for Public Policy and Administration Scholars. *Public Policy and Administration* 35(4), 365–383. <https://doi.org/10.1177/0952076720939631>
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2018). The lessons of Policy Learning: Types, Triggers, Hindrances and Pathologies. *Policy and Politics* 46(2), 255–272. <https://doi.org/10.1332/030557318X15230059735521>
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2020). Policy Learning in Comparative Policy Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 6, 1–22. <https://doi.org/DOI: 10.1080/13876988.2020.1762077>
- Dunlop, C. A., Radaelli, C. M., & Trein, P. (2018). Introduction: The Family of Policy Learning. Dalam C.A. Dunlop, C. M. Radaelli, & P. Trein (Ed.), *Learning in Public Policy: Analysis, Modes and Outcomes* (hal. 1–26). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Dzulfaroh, A. N. (2020a). Peringatan Ahli Harvard, Bagaimana Penanganan SARS, Flu Burung, MERS, dan Virus Corona di Indonesia? <https://www.kompas.com/>. Diambil dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/11/193141265/peringatan-ahli-harvard-bagaimana-penanganan-sars-flu-burung-mers-dan-virus?page=all>
- Dzulfaroh, A. N. (2020b). WHO Sebut Hasil Tes Covid-19 di Indonesia Lama, Apa Dampaknya? Diambil 28 Februari 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/20/203856465/who-sebut-hasil-tes-covid-19-di-indonesia-lama-apa-dampaknya?page=all>
- Farisa, F. C. (2021). Satgas Covid-19 Sebut Esensi PPKM Sama dengan PSBB. Diambil 1 Maret 2021, dari

- <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/07184901/satgas-covid-19-sebut-esensi-ppkm-sama-dengan-psbb?page=all>
- France-Presse, A. (2020). Vietnamese COVID-19 Safety Dance Goes... Viral. Diambil 26 Februari 2021, dari <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/03/04/vietnamese-covid-19-safety-dance-goes-viral.html>
- Furst, J., Raicu, D., & Jason., L. (2016). Data Mining. Dalam L.A. Jason & D. S. Glenwick (Ed.), *Handbook of Methodological Approaches to Community-Based Research: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods* (hal. 187–196). Oxford: Oxford University Press.
- Garjito, D., & Aditya, R. (2020). Kelakar Menteri Airlangga: Izinnya Berbelit-belit, Virus Corona Tak Masuk. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://www.suara.com/news/2020/02/15/141802/kelakar-menteri-airlangga-izinnya-berbelit-belit-virus-corona-tak-masuk>
- González-López, M. (2019). Understanding Policy Learning in Regional Innovation Policies: Lessons from the Galician Case. *Innovation* 32(1), 104–118. <https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1519780>
- Gottweis, H. (2007). Rhetoric in Policy Making: Between Logos, Ethos, and Pathos. Dalam F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Ed.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods* (hal. 237–250). London: CRC Press.
- Gusman, H. (2020). Tes COVID-19: RI Masih di Belakang Vietnam, Malaysia. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://tirto.id/tes-covid-19-ri-masih-di-belakang-vietnam-malaysia-fkBZ>
- Ha, B. T. T., Quang, L. N., Mirzoev, T., Tai, N. T., Thai, P. Q., & Dinh, P. C. (2020). Combating the COVID-19 epidemic: Experiences from Vietnam. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph17093125>
- Hakim, R. N. (2021). Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/14214871/airlangga-hartarto-yang-terungkap-pernah-terinfeksi-covid-19?page=all>
- Hardt, H. (2018). Who Matters for Memory: Sources of Institutional Memory in International Organization Crisis Management. *Review of International Organizations* 13(3), 457–482. <https://doi.org/10.1007/s11558-017-9281-4>
- Heclo, H. (1974). *Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance*. New Haven: Yale University Press.
- Hui, M. (2020). Taiwan Phone Tracking System Monitors 55,000 Under Coronavirus Quarantine. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://qz.com/1825997/taiwan-phone-tracking-system-monitors-55000-under-coronavirus-quarantine/>
- Intan, G. (2020). Kenapa Indonesia Tidak “Lockdown”? Ini Jawaban Jokowi. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://www.voaindonesia.com/a/kenapa-indonesia-tidak-lockdown-ini-jawaban-jokowi/5343239.html>

- Islam, S. N., Wai, H., Cheng, J., Helgason, K. S., Hunt, N., Kawamura, H., & Lafleur, M. (2020). *Variations in COVID Strategies: Determinants and Lessons*.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and Adaptive Governance in Crisis Response: Lessons from the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Information Management* 55. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- John Hopskin Center for Health Security. (2019). GHS Index: Building Collective Action and Accountability. Diambil dari [www.ghsindex.org](http://www.ghsindex.org)
- KawalCOVID19. (2020a). Serial Data Virus Korona 1: 3T (Trace, Test, Treat). Diambil 1 Maret 2021, dari <https://kawalcovid19.id/content/1288/serial-data-virus-korona-1-3t-trace-test-treat>
- KawalCOVID19. (2020b). Serial Data Virus Korona 2: Rasio Lacak – Isolasi (RLI) dan Korelasinya dengan Kematian Kumulatif. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://kawalcovid19.id/content/1294/serial-data-virus-korona-2-rasio-lacak-isolasi-rli-dan-korelasinya-dengan-kematian-kumulatif>
- Kay, A. (2017). Policy Failures, Policy Learning and Institutional Change: The Case of Australian Health Insurance Policy Change. *Policy and Politics* 45(1), 87–101. <https://doi.org/10.1332/030557316X14743685010425>
- Kemenlu.go.id. (2020). Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-COV). Diambil 15 Desember 2020, dari <https://kemlu.go.id/pretoria/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-virus-novel-corona-2019-n-cov>
- kemkes.go.id. (2019). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/19122100001/kemenkes-luncurkan-dokumen-penting-pencegah-penyebaran-penyakit-yang-meresahkan-dunia.html>
- Kim, Yi J., & Moon, M. (2015). A study of the Effect of Various Modes of Collaboration on Organizational Effectiveness in Emergency Mmanagement. *Korean Journal of Public Administration*, 53(3), 83–116.
- Kusters, A., Meulder, M. De, & O'Brien, D. (2017). *Innovations in Deaf Studies: The Role of Deaf Scholars*. Oxford: Oxford University Press. Diambil dari [https://www.researchgate.net/publication/316878714\\_Innovations\\_in\\_Deaf\\_Studies\\_The\\_Role\\_of\\_Deaf\\_Scholars](https://www.researchgate.net/publication/316878714_Innovations_in_Deaf_Studies_The_Role_of_Deaf_Scholars)
- La, V.-P., Pham, T.-H., Ho, M.-T., Nguyen, M.-H., P. Nguyen, K.-L., Vuong, T.-T., ... Vuong, Q.-H. (2020). Policy Response, Social Media and Science Journalism for the Sustainability of the Public Health System Amid the COVID-19 Outbreak: The Vietnam Lessons. *Sustainability* 12(7), 2931. <https://doi.org/10.3390/su12072931>
- Langenberg, S., & Wesseling, H. (2016). Making Sense of Weick's Organising. A Philosophical Exploration. *Philosophy of Management*, 15(3), 221–240. <https://doi.org/10.1007/s40926-016-0040-z>

- Le, S. M. (2020). Containing the Coronavirus (COVID-19): Lessons from Vietnam. Diambil 25 Februari 2021, dari <https://blogs.worldbank.org/health/containing-coronavirus-covid-19-lessons-vietnam>
- Leavy, P. (2017). *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. New York: The Guilford Press.
- Lee, S., Hwang, C., & Moon, M. J. (2020). Policy Learning and Crisis Policy-Making: Quadruple-Loop Learning and COVID-19 Responses in South Korea. *Policy and Society*, 39(3), 363–381. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785195>
- Lin, S. (2020). Virus Outbreak: Premier Approves Special Budget Items. Diambil 1 Maret 2021, dari <http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/02/28/2003731762>
- Litbang.kemkes. (2021). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://www.litbang.kemkes.go.id/>
- Maranda, S. (2020). Indonesia Terhindar Virus Corona, Ma'ruf Amin: Berkah Doa Qunut. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1312785/indonesia-terhindar-virus-corona-maruf-amin-berkah-doa-qunut>
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Moynihan, D. P. (2009). From intercrisis to intracrisis learning. *Journal of Contingencies and Crisis Management* 17(3), 189–198. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2009.00579.x>
- Nair, S., & Howlett, M. (2017). Policy Myopia as A Source of Policy Failure: Adaptation and Policy Learning Under Deep Uncertainty. *Policy and politics* 45(1), 103–118. <https://doi.org/10.1332/030557316X14788776017743>
- ncov.moh.gov.vn. (2021). Ministry of Health - Page of Covid-19 Influenza Disease Situation. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://ncov.moh.gov.vn/>
- Nguyen, M. (2020). Vietnam's War Against COVID-19. Diambil 26 Februari 2021, dari <https://thediplomat.com/2020/10/vietnams-war-against-covid-19/>
- Nguyen, S. (2020). Vietnam's Pandemic Success Is a Lesson for the World. Diambil 27 Februari 2021, dari [https://www.globalasia.org/v15no3/cover/vietnams-pandemic-success-is-a-lesson-for-the-world\\_sen-nguyen](https://www.globalasia.org/v15no3/cover/vietnams-pandemic-success-is-a-lesson-for-the-world_sen-nguyen)
- O'Donovan, K. (2017). Policy Failure and Policy Learning: Examining the Conditions of Learning after Disaster. *Review of Policy Research* 34(4), 537–558. <https://doi.org/10.1111/ropr.12239>
- Olson, B. ., Cooper, D. ., Viola, J., & Clark, B. (2020). Community Narrative. Dalam

- L. A. Jason & D. S. Glenwick (Ed.), *Handbook of Methodological Approaches to Community-Based Research: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method* (hal. 43–53). Oxford: Oxford University Press.
- Otsu, S., Do, H., Ha, T. A., Ngo, T. H., Tran, Q. D., Condell, O., ... Chiu, C. (2020). Enhancing Hospital Event-based Surveillance System – Findings From A Pilot Study, Vietnam, 2017-2018. *Global Security: Health, Science and Policy* 5(1), 28–41. <https://doi.org/10.1080/23779497.2020.1786431>
- Pollack, T., Thwaites, G., Rabaa, M., Choisy, M., Doorn, R. van, Luong, D. H., ... Quang, T. P. (2020). Emerging COVID-19 Success Story: Vietnam’s Commitment to Containment. Diambil 26 Februari 2021, dari <https://ourworldindata.org/covid-exemplar-vietnam>
- Prabowo, H. (2020). Kalung “Anti Virus Corona” Kementan yang Menyesatkan. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://tirto.id/kalung-anti-virus-corona-kementan-yang-menyestakan-fNXK>
- Rochmyaningsih, D. (2020, Maret 3). Indonesia Finally Reports Two Coronavirus Cases. Scientists Worry It Has Many More. <https://doi.org/10.1126/science.abb5653>
- Rose, R. (2005). *Learning from Comparative Public Policy: A Practical Guide*. London: Routledge.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, Hank. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder: Westview Press.
- Satria, J. N. (2020). Minta Masyarakat Tak Panik soal Penyebaran Virus Corona, Menkes: Enjoy Saja. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-4874858/minta-masyarakat-tak-panik-soal-penyebaran-virus-corona-menkes-enjoy-saja>
- Saubani, A. (2020a). Kelakar Menhub: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://republika.co.id/berita/q5ul4k409/kelakar-menhub-kita-kebal-corona-karena-doyan-nasi-kucing>
- Saubani, A. (2020b). Pemerintah Merasa Dihina Peneliti Harvard Soal Corona. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://nasional.republika.co.id/berita/q5j2nc409/pemerintah-merasa-dihina-peneliti-harvard-soal-corona>
- Schön, D. A., & Rein, M. (1994). *Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies*. New York: Basic Books.
- sehatnegeriku kemkes. (2012). Kasus Flu Burung di Indonesia dan di Dunia Terus Menurun. Diambil 26 Februari 2021, dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20120110/382150/kasus-flu-burung-di-indonesia-dan-di-dunia-terus-menurun/>
- Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2020). Policy, Partisanship, and Pay: Diverging COVID-19 Responses in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3636486>
- Studlar, D. T. (2015). Punching Above Their Weight Through Policy Learning:

- Tobacco Control Policies in Ireland. *Irish Political Studies* 30(1), 41–78. <https://doi.org/10.1080/07907184.2014.981162>
- Sugiyatmi, T. A. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Wabah. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://news.detik.com/kolom/d-5092816/urgensi-revisi-undang-undang-wabah>
- Sulasih, E. (2020). Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Binamulia Hukum*, 9(8), 67–82. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104>
- Tambun, L. T. (2020). Kunjungi Jateng, Jokowi: Jangan Sampai Muncul Second Wave Covid-19. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://www.beritasatu.com/nasional/650517/kunjungi-jateng-jokowi-jangan-sampai-muncul-second-wave-covid19>
- Tempo.co. (2021). Evaluasi PPKM 11-25 Januari, Jokowi: Kita Harus Ngomong Apa Adanya, Tak Efektif. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/1428346/evaluasi-ppkm-11-25-januari-jokowi-kita-harus-ngomong-apa-adanya-tak-efektif/full&view=ok>
- Thai, P. Q., Rabaa, M. A., Luong, D. H., Tan, D. Q., Quang, T. D., Quach, H.-L., ... Yacoub, S. (2020). The First 100 Days of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Control in Vietnam. *Clinical Infectious Diseases* 5. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1130>
- Uly, Y. A. (2020). Kurva Covid-19 Disebut Melambat, Ahli: Rasio Test di Indonesia Rendah. Diambil 28 Februari 2021, dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/070300323/kurva-covid-19-disebut-melambat-ahli-rasio-test-di-indonesia-rendah?page=1>
- Van Nguyen, Q., Cao, D. A., & Nghiem, S. H. (2021). Spread of COVID-19 and Policy Responses in Vietnam: An Overview. *International Journal of Infectious Diseases* 103, 157–161. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.11.154>
- Wei, K. (2020). Coronavirus: How Taiwan is Cranking up Mask Production to Meet Shortfall. Diambil 1 Maret 2021, dari <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/coronavirus-how-taiwan-is-cranking-up-mask-production-to-meet-shortfall>
- Weible, C. M., & Heikkila, T. (2017). Policy Conflict Framework. *Policy Sciences* 50(1), 23–40. <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9280-6>
- WHO. (2020). *Strategic Preparedness and Response Plan*. World Health Organisation (WHO).
- www.ourworldindata.org. (2021). Coronavirus Pandemic Data Explorer - Our World in Data. Diambil 24 Februari 2021, dari <https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=~IDN&region=World&casesMetric=true&interval=smoothered&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc>



# PILIHAN KEBIJAKAN INDONESIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DAN KRITIKNYA

Endi Haryono<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Artikel ini menjelaskan pilihan kebijakan yang diambil Indonesia, yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam merespons pandemi Covid-19, debat kebijakan publik terkait kebijakan tersebut. Presiden Jokowi mengumumkan pilihan kebijakan pemerintah ini pada 16 April 2020. Kebijakan yang diambil adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didukung oleh sejumlah paket kebijakan multi-sektoral. Seperti banyak negara lainnya yang sedang menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia harus membuat pilihan kebijakan dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Setiap kebijakan publik, lebih-lebih di masa krisis, adalah pilihan-pilihan yang tidak mudah (*no easy choice*).

Pilihan kebijakan ini, tentu saja, tidak lepas dari kecaman-kecaman keras terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah. Hampir semua kebijakan penting yang diambil Presiden Jokowi dan pemerintahnya, bahkan yang kemudian diakui manfaatnya oleh publik, dikecam dengan keras oleh para penentangannya. Residual politik dari pemilu 2014 dan pemilu 2019 tampaknya belum sepenuhnya hilang. Setiap kebijakan publik dalam sistem demokrasi – yang merupakan inti dari politik dalam sistem demokrasi itu sendiri – adalah pilihan yang memang terbuka untuk diperdebatkan. Pilihan kebijakan menjadi media dan ruang bagi para politisi, akademisi, pengusaha, dan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil untuk mengadvokasikan pendapat dan kepentingan mereka.

## COVID-19 SEBAGAI PANDEMI GLOBAL

Virus baru yang kemudian secara saintifik diberi nama *Corona Virus Disease* (Covid-19) mula-mula diketahui atau ditemukan menjangkiti manusia pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada bulan Desember 2019. Angka '19' di belakang Covid mengindikasikan tahun ditemukannya virus ini. Kurang sepekan setelah laporan penemuan pasien terkena Covid-19 ini,

---

<sup>1</sup> Dosen di President University. Email: endi@president.ac.id

beberapa orang di Wuhan dilaporkan terkena virus yang sama. Virus ini menyebar dengan cepat. Pemerintah Cina mengisolasi kota Wuhan, menutup dan membatasi pergerakan keluar dan masuk orang ke kota ini. Penutupan wilayah ini, beberapa hari kemudian, diperluas mencakup seluruh Provinsi Hubei, di mana kota Wuhan berada. Respons cepat dan darurat Beijing atas penyebaran Covid-19 ini mencakup penutupan/pembatasan wilayah, protokol kesehatan darurat, dan pembangunan rumah sakit khusus dalam waktu cepat untuk pasien penderita Covid-19.

Terdapat perdebatan tentang asal-mula atau sejarah kemunculan virus Covid-19 penyebab pandemi global yang paling baru ini. Laporan awal, yang dipublikasikan media massa AS dan Eropa yang kemudian diikuti media massa di negara-negara lainnya, menyebutkan bahwa Covid-19 berasal dari sebuah pasar di Wuhan, yakni warga setempat yang terjangkit penyakit ini dari kelelawar. Seorang warga Wuhan dikabarkan terkena Covid-19 setelah memakan sup kelelawar. Seperti diketahui, kelelawar adalah salah satu sumber makanan (protein) unggas di Cina. Selain di Cina, kelelawar adalah juga makanan yang biasa dikonsumsi di banyak negara di Asia, termasuk di Indonesia (kalong, codot).

Cina membuat bantahan resmi atas versi laporan yang disebarakan media AS dan direpetisi media-media global ini. Di tengah penanganan darurat atas Covid-19, dan ketika tampaknya Cina telah berhasil mengatasi krisis di Wuhan dan membendung penyebaran sehingga tidak merembet ke provinsi-provinsi di Cina yang lain, pemerintah Cina – melalui otoritas kesehatan dan keamanan – membantah versi asal-usul Covid-19 ini.

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) pada 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. WHO menetapkan empat protokol penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19, yakni: 1. Menjaga jarak dengan orang lain; 2. Warga agar mengenakan masker yang menutup mulut dan hidung; 3. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan sabun dengan sering; dan 4. Mengurangi bepergian atau berinteraksi dengan orang lain. Empat protokol ini kemudian diadopsi menjadi protokol kesehatan di banyak negara, dengan variasinya, termasuk di Indonesia.

Mitigasi dan protokol penanganan pandemi Covid-19 oleh Cina di Wuhan secara umum terdiri penutupan kota Wuhan (*lockdown*) dan pembangunan rumah sakit darurat khusus mereka yang terinfeksi Covid-19. Mitigasi dan protokol Cina ini kemudian menjadi mitigasi dan protokol global dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Mitigasi dan protokol Cina ini

menjadi acuan bagi mitigasi dan protokol dari negara-negara lain. Terkait mitigasi kedua, Cina membuat langkah spektakuler dengan membangun rumah sakit darurat ribuan kamar perawatan hanya dalam satu minggu. Saya kira, hanya Cina di masa modern ini yang dapat menyiapkan bangunan rumah sakit dan fasilitasnya dalam waktu sesingkat itu.

Kebijakan *lockdown* di Wuhan lalu diperluas pada Provinsi Hubei. Cina tetap membiarkan provinsi dan kota-kota lain berjalan normal. Selain di Wuhan, bisnis dan aktivitas ekonomi terus berjalan secara baik di kota-kota dan provinsi-provinsi lainnya. Justru, kota-kota dan provinsi-provinsi lain inilah yang kemudian memberikan bantuan kepada Wuhan dan provinsi Hubei, fenomena yang kemudian diberi penghargaan dalam pemberitaan media global sebagai solidaritas rakyat Cina. Bantuan yang datang berupa obat-obatan, makanan, dan bahkan tenaga medis, dari kota-kota dan provinsi-provinsi lainnya di Cina untuk Wuhan dan Hubei.

*Lockdown* di Wuhan dan Provinsi Hubei berjalan dengan dukungan pembiayaan yang sangat besar dari Beijing. Di luar dugaan, masyarakat Cina (bisnis, profesional, dan masyarakat awam) juga memberikan dukungan dana yang sepadan. Dengan demikian, pemerintah dan warga Wuhan berkonsentrasi melawan Covid-19 selama masa *lockdown*, yang berlangsung efektif atau bahkan paling efektif dibandingkan yang diterapkan di kota-kota lain kemudian ketika Covid-19 menyebar sebagai pandemi global.

Jepang tidak menerapkan *lockdown* dan lebih memilih mitigasi yang lebih lunak dengan pembatasan sosial (*social distancing*) yang kemudian dilaksanakan atas warganya secara disiplin, melalui pengerahan aparat keamanan. Pemerintah Jepang mengumumkan kepada publik bahwa Jepang tengah menghadapi pandemi Covid-19 seperti negara-negara lainnya, dan pada saat bersamaan, menerbitkan beberapa kebijakan kesehatan publik. Kepada masyarakatnya pemerintah Jepang memperingatkan peringatan yang wajar, menjaga kesehatan dengan lebih baik dan menjalani kehidupan dengan normal sesuai beberapa perubahan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Jepang termasuk negara yang paling awal terkena pandemi Covid-19 setelah Cina. Kendati demikian, Jepang tidak mengalami lonjakan jumlah warga yang terinfeksi covid-19, berbeda dengan negara-negara lain yang juga berpenduduk padat.

Pemandangan warga mengenakan masker adalah pemandangan yang normal dan biasa di Jepang. Hari-hari biasa, tanpa ada pandemi, warga Jepang memang terbiasa memakai masker ketika berada di transportasi umum dan di keramaian. Warga yang terkena sakit ringan atau flu ringan,

sudah sejak lama, dengan sendirinya akan mengenakan masker ketika berada di tempat umum. Warga Jepang memiliki kesadaran tinggi untuk secara sadar dan bertanggung jawab mandiri untuk tidak menuliri sakit kepada orang lain. Kecuali beberapa sekolah dan kantor pemerintah di beberapa kota yang diliburkan, aktivitas sosial-ekonomi berjalan normal seperti biasa. Mengenakan masker di tempat umum, seperti kereta komuter, telah menjadi modal sosial di Jepang, dalam budaya melindungi orang lain untuk melindungi diri sendiri.

Pemberlakuan *lockdown* membawa kerusuhan sosial di India. Struktur masyarakat India, dengan jumlah penduduk miskin kota dan setengah pengangguran di kota-kota besar, menjadikan pilihan kebijakan *lockdown* kontra-produktif atau tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Pemberitaan-pemberitaan tentang kerusuhan sosial akibat *lockdown* di India bisa dideskripsikan bahwa rakyat miskin India lebih bersedia menempuh risiko terinfeksi Covid-19 dengan tetap keluar rumah untuk bekerja ketimbang mati kelaparan di rumah masing-masing dalam diam. PM Narendra Modi membatalkan kebijakan *lockdown* dan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada rakyat India atas kebijakan ceroboh yang ditetapkan pemerintahnya.

Kerusuhan sosial ternyata bukan hanya terjadi di negara berkembang dengan jumlah penduduk miskin yang besar seperti India. Penjarahan toko-toko dan perlawanan rakyat terhadap aparat keamanan, bisa disebut kerusuhan dalam skala lebih kecil, terjadi juga di Italia dan beberapa negara bagian di AS terkait kebijakan *lockdown*. AS akhirnya melonggarkan kebijakan *lockdown* dan menggantikannya dengan pemisahan sosial menyusul kerusuhan terbatas dan New York dan beberapa kota lainnya. Italia mengikuti langkah AS beberapa hari kemudian. Di Italia kebijakan *lockdown* dinyatakan tidak berhasil dan bahkan memberikan beban bagi baik pemerintah maupun masyarakat karena tidak tersedia pasokan bahan makanan yang memadai.

## **RESPONS INDONESIA**

Pasien Covid-19 di Indonesia pertama diumumkan oleh pemerintah pada 4 Maret 2020. Ini berarti tiga bulan sejak Covid-19 pertama kali menginfeksi warga di Wuhan. Pemerintah mengumumkan sekaligus dua orang sebagai pasien terkena Covid-19, yakni pasien#1 dan pasien#2, perempuan ibu dan anak, tinggal di kota Depok, Jawa Barat. Keduanya kemudian mendapatkan perawatan dan isolasi di RSPI Sulianto Saroso. Keduanya dinyatakan sembuh pada 16 Maret 2020.

Penyebaran kemudian, yakni pengumuman pasien-pasien baru, untuk beberapa hari kemudian masih berpusat di Jakarta dan kota-kota satelitnya seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang. Dua pekan setelah pengumuman pasien pertama, pasien-pasien baru diumumkan berasal bukan hanya dari Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga telah diketemukan juga di provinsi-provisi di luar DKI dan Jawa Barat.

Respons Indonesia, dalam bentuk Kebijakan Pemerintah, terkait dengan penanganan dan pencegahan penularan COVID-19 mencoba menyeimbangkan antara minimalisasi dampak ekonomi dari kebijakan yang dipilih dan maksimalisasi pencegahan penyebaran Covid-19. Ini bukan persoalan yang mudah mengingat karakteristik wilayah, penyebaran penduduk, pemukiman, dan lebih penting lagi susunan strata dan kelas sosial di Indonesia, baik menurut tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Kemiskinan masih menjadi bagian terbesar dari penduduk Indonesia, baik di pedesaan maupun di kota-kota. Belum lagi, jutaan rakyat masih berada di garis rentan miskin, dan termasuk masyarakat dalam kelompok pengangguran terselubung.

Seluruh kondisi sosial seperti disebutkan di atas, mulai dari kondisi strata sosial dan angka kemiskinan yang besar, menjadikan daya tahan masyarakat dan daya tahan negara berada dalam keadaan rapuh. Kondisi yang rapuh ini menjadikan pemerintah tidak mudah dalam mengambil kebijakan dari pilihan-pilihan kebijakan yang ada. Di lain pihak, dalam situasi krisis, pemerintah dituntut harus mengambil kebijakan dengan cepat dari pilihan-pilihan yang terbatas tersebut. Ini yang dihadapi Presiden Jokowi dan pemerintah, seperti disampaikan pada konferensi pers di Istana Bogor, 16 Maret 2020, sebuah dilema yang tidak sederhana:

‘Saya terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran Virus COVID-19 dan tidak memperburuknya dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan’ (Setkab.go.id, 16 Maret 2020).

Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menghadapi dilema yang sama. Untuk menghindarkan terjadinya ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah, presiden menegaskan

kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan-kebijakan drastik terkait penanganan Covid-19, seperti *lockdown* dan protokol-protokol kesehatan terkait:

‘Perlu saya tegaskan, yang pertama bahwa kebijakan *lockdown* baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. *Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown.* Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan, untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya (Setkab.go.id, 16 Maret 2020).

Presiden Jokowi menghendaki agar kebijakan besar di tingkat daerah terkait Covid-19 harus dibahas terlebih dulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi kebijakan, pemerintah membentuk Satgas Covid-19. Selain mengkoordinasikan kementerian terkait dan pemerintah daerah, Satgas Covid-19 menjadi rujukan informasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait Covid-19. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Satgas ini diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo.

Pilihan kebijakan ini mendapatkan kritik, antara lain, dari mantan Presiden SBY dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan Presiden SBY dan wakil presiden JK merupakan elit-elit yang dengan sengaja sejak awal mengkritik kebijakan pembatasan sosial yang diambil pemerintah, dan mengadvokasikan secara terbuka pilihan kebijakan *lockdown*. SBY mengingatkan pemerintah untuk lebih serius menangani penyebaran Covid-19, dan lebih serius yang dimaksudkan SBY adalah pilihan untuk memberlakukan *lockdown*. ‘Sejumlah kota di berbagai negara, bahkan di seluruh negara, dilakukan *lockdown*. Artinya penduduk dilarang meninggalkan rumah masing-masing atau sangat dibatasi kegiatannya,’ tulis SBY di akun *Facebook*-nya tanggal 17 Maret 2020, sebagaimana dikutip Tempo (tempo.co, 18/3/2020).

Tempo (18/03/2020) menulis bahwa ‘SBY mengaku gembira saat ini negara-negara di seluruh dunia makin serius dan efektif dalam menangani

pandemi corona. Dia juga menilai langkah yang dilakukan negara-negara tersebut makin terarah, tegas dan nyata'. Dengan pernyataan semacam ini, SBY menilai kebijakan pembatasan sosial yang diambil pemerintah sehari sebelumnya sebagai kurang terarah, kurang tegas dan kurang nyata. Di bagian lain, SBY mengatakan: 'Tetapi kebijakan ini (*lockdown*) harus diambil. Keselamatan dan kelangsungan hidup manusia di atas segalanya,' kata SBY, seperti dikutip Tempo (Tempo.co, 18/03/2020). SBY menambahkan kritiknya terhadap pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah 'awalnya terlalu percaya diri, menganggap enteng, sementara pernyataan pejabat saya nilai tidak tepat' (Tempo.co, 18/03/2020).

SBY kemudian mengoreksi kritik dan gagasannya sepekan berselang, seperti diberitakan Kompas (23/3/2020), yang menilai kebijakan *social distancing* oleh pemerintah sudah tepat dan tidak perlu dilakukan kebijakan *lockdown* seperti dilakukan negara-negara lain, termasuk *lockdown* atas kota Jakarta. Menurutnya, seluruh warga negara harus patuh dan disiplin kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta meningkatkan kesadaran diri untuk hidup sehat. 'Mari kita bantu pemerintah. Kalau ada rekomendasi sampaikan baik-baik. Saya yakin pemerintah akan perhatikan saran-saran rakyatnya,' kata SBY (Kompas.com, 23/03/2020).

Presiden Jokowi kembali tampil menegaskan bahwa pemerintah tetap pada pilihan kebijakan awal yakni pemisahan sosial dan tidak akan menggantikannya dengan *lockdown* (cnbcindonesia, 31/03/2020). Memberikan penjelasan kepada pers usai Ratas soal Covid-19, presiden mengumumkan penekanan baru atas kebijakan lama dalam bentuk kebijakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB). Pengumuman ini sekaligus menghapuskan pro-kontra *lockdown* yang mengemuka dalam sepekan terakhir. Kata Presiden:

'Kita harus belajar dari pengalaman negara lain, kita tidak bisa menirunya begitu saja. Setiap negara memiliki ciri khas masing-masing, baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis dan juga kemampuan fiskalnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semua harus dihitung, dikalkulasi dengan cermat, dan inti kebijakan kita sangat jelas yakni pertama adalah kesehatan masyarakat.'

Pemerintah pada dua pekan di akhir 2020 berada di bawah tekanan kuat dari kelompok pro-*lockdown*, dan kegoyahan pemerintah – sekali lagi demikian yang *diframing* kelompok pro-*lockdown* – segera disambar dengan

menghidupkan jargon-jargon lama: presiden tidak tegas, presiden tidak tahu yang harus dikerjakan, dan presiden seharusnya menyerahkan penanganan kondisi darurat kepada militer. Justru media massa – mayoritas televisi – secara lebih jelas juga membentuk opini publik bahwa pemisahan sosial telah gagal dan harus digantikan *lockdown*. Pengumuman dan pernyataan Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 menunjukkan ketegasan Jokowi, sekali lagi, berbeda dengan para pengkritiknya yang membangunkan deskripsi sebaliknya.

### TIGA PILIHAN KEBIJAKAN

Pilihan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, seperti tercermin dari pemberitaan media massa dan perbincangan media sosial, secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga pilihan kebijakan. Pertama, pilihan *lockdown* (penuh) nasional untuk seluruh Indonesia. Para penganjur pilihan ini merujuk pada negara-negara seperti Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan. Kedua, pilihan karantina wilayah, sebuah pilihan kebijakan yang sesungguhnya telah tersedia dalam UU yang bisa diterapkan ketika menghadapi ancaman pandemi penyakit seperti Covid-19. Kendati demikian, pilihan kebijakan ini mengatur juga beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara (pemerintah) di luar soal penanggulangan pandemi itu sendiri. Ketiga, pilihan pembatasan sosial (*social distancing*) secara nasional, pilihan kebijakan yang sesungguhnya varian dari *lockdown* juga, dengan beberapa fleksibilitas termasuk fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyisipkan kebijakan pendukungnya.

Di Indonesia, respons kebijakan menjadi perdebatan yang seru tentang kebijakan *social distancing* versus *lockdown*. Perdebatan akademik dan politik ini justru terjadi dan menguat setelah Presiden dan pemerintah Indonesia menetapkan pilihan kebijakan pada pembatasan sosial, bukan pada *lockdown*. Presiden Jokowi bahkan menegaskan beberapa kali bahwa *lockdown* adalah keputusan pemerintah pusat, bukan keputusan pemerintah daerah.

Bahkan, ketika pemerintah telah menetapkan pilihan pada kebijakan pemisahan sosial, beberapa elit dan kekuatan sosial-politik berkeras terus mengembangkan debat tentang pro dan kontra terhadap kebijakan pemisahan sosial, dan bahkan secara terbuka mengadvokasikan pilihan kebijakan *lockdown*. Pemerintah bahkan sempat goyah atas keputusan awal karena desakan masif kekuatan-kekuatan sosial-politik pro-*lockdown*, atau setidaknya demikian pemerintah dideskripsikan oleh individu-individu dan



media massa (termasuk sosial media) yang berada di sisi mengadvokasikan *lockdown*.

Sementara SBY telah mengubah posisi dengan mendukung apapun kebijakan yang diambil pemerintah Presiden Jokowi dalam mengatasi penyebaran Covid-19, JK pada beberapa kesempatan masih mengadvokasikan *lockdown* sebagai kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah. Advokasi ini mendapatkan amplifikasi oleh beberapa kebijakan dan manuver respons dari Gubernur DKI Anies Baswedan, dan karenanya berkembang di publik tentang terdapatnya kekuatan politik yang dengan sengaja memelihara dan terus menghidupkan advokasi *pro-lockdown* di masyarakat. Kekuatan ini diasosiasikan dengan pribadi JK dan Anies Baswedan, gubernur DKI, yang dalam beberapa pernyataan dan manuver politiknya menunjukkan hal ini.

Ini artinya, debat kebijakan pemisahan sosial versus *lockdown* terus dibiarkan dan sengaja dijaga tetap hidup meski pemerintah telah menetapkan pilihan pada pemisahan sosial. Debat pilihan kebijakan yang terus dihidupkan ini dalam praktik menumbuhkan beberapa varian pilihan-pilihan kebijakan muncul dan mewarnai debat kebijakan di akhir Maret 2020: Darurat sipil; Karantina Wilayah; dan Darurat Militer. Sekali lagi, ini terjadi setelah pemerintah menetapkan kebijakan pemisahan sosial dan tengah menata langkah-langkah mengefektifkan pilihan kebijakan yang telah diambil. Debat secara implisit menggiring opini publik bahwa pilihan kebijakan yang telah sebelumnya diambil oleh pemerintah (baca: Presiden Jokowi) tidak berjalan.

Di lain pihak, kengototan menghidupkan debat atas pilihan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 terus mendapatkan tempat di media massa dan bergulir di kalangan pendukungnya. Apakah kengototan itu lahir dari keterbatasan pemahaman teoritis dan pemahaman atas kondisi sosial masyarakat Indonesia atau karena agenda politik di belakangnya? Sebuah penjelasan sederhana perlu diberikan pada keberadaan sejumlah elit, pengamat dan kekuatan-kekuatan sosial *pro-lockdown* yang justru dengan sengaja mengganggu efektivitas kebijakan pemisahan sosial yang telah ditetapkan pemerintah ini. Penguasaan media yang baik tampaknya lebih dimiliki oleh kelompok *pro-lockdown* dibandingkan kekuatan komunikasi politik yang kurang bagus dari istana dan pemerintah.

Sebagai bagian menghidupkan debat kebijakan, yang meremehkan kebijakan yang telah dipilih, dilakukan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan berkirim surat mengusulkan secara resmi kepada presiden agar memberikan izin bagi Jakarta untuk menetapkan *lockdown* yang didefinisikan sebagai Karantina Wilayah. Dengan pengumuman terbaru tentang PSBB maka

dengan otomatis pemerintah menolak usulan DKI dan daerah-daerah yang lain yang mungkin memiliki keinginan untuk *lockdown*.

Manuver kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) menggunakan *lockdown* dalam definisi mereka sendiri, yang dianggapnya sebagai kepedulian pada keselamatan rakyat di wilayahnya, dengan demikian mengabaikan kepentingan nasional secara luas dan meremehkan kebijakan presiden. Pilihan daerah-daerah untuk *lockdown* – yang sesungguhnya adalah tindakan penutupan terbatas atau pembatasan sosial yang mereka ingin sebut sebagai *lockdown* – memperlihatkan egoisme daerah dan egoisme para pemimpinnya, sesuatu yang dengan jelas mengabaikan karakteristik nasional dari kebijakan pemerintah Indonesia.

Pemberitaan tentang debat pro-kontra *lockdown* ini sesungguhnya telah lewat dari proporsi. Karena pemerintah telah sebelumnya menetapkan pilihan kebijakan, pro-kontra ini semestinya tidak lagi harus mendapatkan amplifikasi dan porsi pemerintah seperti yang didapatkan di sini. Ini yang memunculkan dugaan tentang terdapatnya kekuatan anti-Jokowi yang bekerja baik di luar maupun di dalam pemerintahannya sendiri. Oleh karenanya, tidak heran para pendukung setia Jokowi menyerukan pembersihan pemerintahan dari pejabat-pejabat negara (politisi sipil tunjukan) yang justru melawan presiden sendiri.

Debat pilihan kebijakan yang keras seperti di minggu-minggu awal pandemi Covid-19 di Indonesia (gelombang pertama, Maret 2020) tidak terjadi ketika Indonesia menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 (Juli 2021) dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada prinsipnya, PSBB dan PPKM adalah kebijakan yang sama, pada kategori antara *lockdown* dan pembatasan sosial. Pilihan kebijakan ini – kebijakan sama dalam dua nama berbeda – bisa juga disebut sebagai *lockdown* terkontrol (*controlled lockdown*) atau pembatasan sosial terpimpin (*guided social distancing*). Sebagaimana dilaporkan The Nikkei Covid-19 Recovery Index edisi Oktober 2021, Indonesia berada pada ranking 54 dari 120 negara, terbaik di lingkungan Perhimpunan Bangsa Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN). Kedua kebijakan ini berhasil karena keseriusan pemerintah, dan terutama pengawasan ketat dari presiden, yang terus-menerus.

## MITIGASI EKONOMI

Kalau kita menyaksikan pemberitaan dan ulasan saluran-saluran TV global seperti Al Jazeera, CNN, CNBC, RT, dan EURONEWS tentang dampak ekonomi dari pandemi global Covid-19 maka seluruhnya bermuara pada satu titik:

dunia telah menuju dan mengalami resesi ekonomi global yang sepadan, atau bahkan lebih buruk, dibandingkan dengan depresi besar ekonomi (*great economic depression*) tahun 1930-an. Negara-negara kecil, baik berkembang maupun negara-negara maju, dengan skop ekonomi dan pasar yang terbatas dipastikan tidak akan bertahan dari krisis ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Negara-negara kecil, berkembang dan maju, dengan ukuran pasar yang kecil ini dipastikan tidak akan mampu menangani pandemi Covid-19 dan kemerosotan ekonomi tanpa bantuan dari negara-negara lainnya yang lebih besar. Sejauh ini, hanya beberapa negara atau kekuatan ekonomi yang diyakini masih dapat memberikan bantuan internasional yang dibutuhkan, yakni negara-negara seperti: AS, Cina, Jepang, Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, dan Australia.

Kemampuan dan kekuatan negara-negara ini terbatas dan telah berkurang karena kondisi ekonomi dua bulan terakhir terkait Covid-19. AS telah menarik diri dan memperkuat prinsip 'America First' yang telah digaungkan Presiden Donald Trump, sehingga AS tak lagi bisa menjadi andalan bagi sekutu-sekutunya. Kepemimpinan AS atas tatanan dunia baru benar-benar diuji oleh pandemi Covid-19, dan sejauh ini AS telah gagal. Berbeda dengan AS, Cina lebih terbuka dan lebih berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkannya, baik negara berkembang maupun negara maju, tanpa melihat apakah mereka sekutu atau bukan.

Pandemi Covid-19 juga membawa dampak ekonomi yang mendalam dan serius bagi Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ekonomi Indonesia terancam tumbuh nol persen karena pandemi Covid-19, seperti disampaikannya kepada pers usai rapat terbatas *online* bidang ekonomi dengan presiden dan sejumlah menteri di Jakarta.

'Kami melihat pertumbuhan ekonomi tentu dari Covid-19 ini. Apabila masalahnya lebih berat, kalau durasi Covid-19 berlangsung lebih tiga bulan hingga 6 bulan, dan kemudian diambil kebijakan *lockdown*. Kalau perdagangan internasional turun di bawah 30 persen dan penerbangan drop sampai 75-100 persen, maka skenario bisa menjadi lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,5 persen atau bahkan sampai nol persen,' kata Sri Mulyani (CNBCIndonesia, 20/3/2020).

Kemenkeu, demikian Sri Mulyani, mengikuti perkembangan pandemi Covid-19 dengan terus mengkaji dan mengembangkan skenario-skenario dampak ekonomi, sebagai masukan bagi presiden dan pemerintah untuk membuat kebijakan. Ini merupakan bagian dari protokol yang harus dilakukan oleh Kemenkeu ketika menghadapi krisis. Sejauh ini, pemerintah melalui Kemenkeu telah mengeluarkan beberapa kebijakan paket dan insentif ekonomi terkait pandemi Covid-19. Pertama, kebijakan Bantuan Langsung Dunia kepada 97 juta warga miskin Indonesia. Kedua, pemerintah mengambil alih iuran pembayaran BPJS warga miskin.

Pariwisata dan penerbangan menjadi dua sektor industri di Indonesia yang paling awal terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Setelah itu, berturut-turut rumah makan dan restoran dan industri jasa hiburan. Sektor ekonomi non-formal dan usaha-usaha skala menengah dan kecil, yang justru menjadi pilar utama ekonomi Indonesia, akan terancam dalam kebangkrutan apabila pemerintah mengambil kebijakan yang tidak memungkinkan pergerakan para pelaku ekonomi dan orang. Kebijakan pemisahan sosial telah memberikan dampak terhadap ekonomi dan aktivitas bisnis, tetapi kebijakan *lockdown* akan membunuh usaha ekonomi menengah dan kecil secara lebih cepat.

Pandemi Covid-19 telah mengganggu perdagangan internasional (termasuk di dalamnya investasi, produksi, dan logistik), kegiatan ekonomi nasional negara-negara, dan kegiatan ekonomi sektor rumah tangga. Ketiga kegiatan ekonomi pada tiga tingkatan ini, dalam sistem kapitalisme global, bertaut dan berpengaruh satu sama lain. Saat ini, ketiga kegiatan ekonomi pada tiga aras yang berbeda ini terganggu atau mandek sekaligus, sehingga ekonomi nasional negara-negara stagnan dan menyerat pada resesi ekonomi global.

Pada saat bersamaan, mendahului dan di tengah pandemi Covid-19, dunia juga telah menghadapi penurunan harga minyak dan volatilitas nilai tukar mata uang. Kedua hal ini telah memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dunia – dan ekonomi beberapa negara – pada semester awal di tahun 2020. Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 memang tidak dapat dielakkan. Karenanya, menjadi tugas pemerintah untuk menetaskan dan merumuskan mitigasi ekonomi terkait dampak tersebut

## **PENUTUP**

Kebijakan publik yang baik adalah pilihan kebijakan yang mencerminkan pemihakan pada kepentingan mayoritas, kesesuaian dengan kondisi sosial-

ekonomi masyarakat pada masa itu, dan tepat dalam merespons masalah atas isu spesifik yang untuk diatasi. Pada tiga aras inilah perdebatan harus dilihat dan dinilai, termasuk pilihan kebijakan oleh pemerintah sendiri. Perdebatan yang mendahului, dan bahkan terus berjalan, ketika Indonesia harus memilih kebijakan penanganan pandemi Covid-19 menjadi menarik untuk dituliskan. Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa setiap pilihan kebijakan publik (*public policy*) adalah bersifat politis dan memiliki kepentingan di baliknya, dan karenanya kerap kali subyektif dan senantiasa mengundang kritik dari pihak yang kepentingannya terganggu olehnya. Pilihan kebijakan Indonesia pada PSBB – dan kemudian PPKM ketika menghadapi gelombang kedua – dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara umum berhasil menekan angka kasus dan kematian, dan secara paralel menjaga perputaran ekonomi Indonesia tetap berjalan.

Pandemi global seperti Covid-19 pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern pada dua dekade terakhir, yakni: MERS, SARS, flu babi, dan flu burung. Dibandingkan pandemi sebelumnya, pandemi Covid-19 ini yang memang benar-benar berlangsung di tingkat global dengan jumlah negara dan warga yang terkena paling banyak. Ini juga pertama kali negara-negara dipaksa, dalam tekanan media dan organisasi internasional, untuk melakukan protokol penanganan yang belum pernah diberlakukan sebelumnya, yakni protokol yang dikenal sebagai penutupan (*lockdown*) sebagai pilihan yang lebih keras (baca: lebih serius) dibandingkan pemisahan sosial (*social distancing*) yang telah dipraktikkan di banyak negara dalam beberapa dekade terakhir.

Pengalaman Cina (*lockdown*) dan Jepang (*social distancing*) menunjukkan bahwa protokol kesehatan yang baik berhasil karena pemerintahan efektif (*effective government*) dan pilihan kebijakan nasional yang ditetapkan didukung penuh oleh warga. Memahami situasi sosial-ekonomi dan kultur masyarakatnya, pemerintah tidak menerapkan *lockdown* dan memilih pada kebijakan yang disebut sebagai pembatasan Sosial berskala besar. Kebijakan ini secara umum sebenarnya dalam disebut sebagai *lockdown* terkendali atau *lockdown* terpimpin. Kebijakan ini diambil agar pemerintah tetap memiliki keleluasaan membuat kebijakan-kebijakan pendukung di sektor ekonomi. Pemerintah juga menolak tekanan dari para pengritiknya, dan kekuatan sosial di masyarakat, yang hingga akhir Maret 2020 terus menekan pemerintah agar memberlakukan kebijakan *lockdown* (penuh) nasional.

Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia tidak gagap dan mengalami kebingungan dalam menghadapi pandemi Covid-19, tetapi *diframing* demikian oleh para pengkritik dan penentangannya di dalam negeri, yang menggunakan narasi *lockdown* yang dikontraskan dengan *social distancing* (pembatasan sosial) dalam pertarungan politik. Apa yang terjadi sesungguhnya adalah karena dampak residu pertarungan politik dari pilpres 2019 yang mengambil momentum masa krisis yang mengganggu pilihan kebijakan oleh pemerintah. Dengan dukungan media sosial dan sejumlah media besar, sejumlah elit dan kekuatan sosial-politik mengembangkan narasi bahwa kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan Presiden Jokowi sebagai gagal dan lemah, dengan mengadvokasikan kebijakan *lockdown* sebagai kebijakan tandingan, meskipun mereka juga memiliki pemahaman berbeda tentang kebijakan ini.

Kendati demikian, beberapa hal harus dicatat sebagai kekurangan dan kelemahan yang mendesak untuk diperbaiki.

Pertama, dalam penanganan pandemi Covid-19 tampak jelas bahwa pemerintah kedodoran dan gagap dalam soal data. Data yang dimiliki tidak tunggal dan tidak terpercaya. Upaya untuk membangun data tunggal dan terpercaya (*reliable*) ini sebenarnya telah diagendakan oleh presiden pada tahun 2015, bahwa presiden telah sejak tahun pertama memerintahkan agar terdapat 'satu data terpercaya' sebagai basis pengambilan kebijakan. Memang, data yang benar akan membawa kebijakan yang benar. Dengan demikian, di tengah pandemi Covid-19 ini, soal data ini harus menjadi agenda serius dari pemerintah.

Kedua, hal lain yang juga perlu diperbaiki adalah koordinasi pusat-daerah, baik dalam penanganan pandemi Covid-19 maupun dalam kebijakan lainnya (pembangunan sosial, ekonomi dan budaya). Koordinasi yang baik dibutuhkan bukan hanya dalam 'pembatasan sosial' atau 'penyekatan kegiatan masyarakat' tetapi lebih-lebih dalam mengatur peran dalam hal kebijakan sosial dan pemberian insentif pengungkit ekonomi untuk usaha-usaha produktif kecil dan menengah. Koordinasi yang buruk menjadi kendali, tentu saja, dalam implementasi kebijakan vaksinasi dan insentif ekonomi dalam kaitan penanggulangan pandemi Covid-19. Program vaksinasi dan pertumbuhan ekonomi nasional berjalan lambat karena beberapa daerah mula-mula masih menggunakan paradigma 'KTP setempat' tanpa memahami bahwa pergerakan manusia dan transaksi lintas batas wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah demikian luas.

Ketiga, dalam sektor kesehatan, seperti terlihat dalam menangani pandemi Covid-19 hampir dua tahun ini, Indonesia masih pada posisi negara konsumen. Indonesia masih sangat mengandalkan impor alat-alat dan prasarana kesehatan, mulai dari peralatan yang sederhana, obat-obatan hingga vaksin. Saya kira, ini harus juga menjadi perhatian serius. Indonesia harus meningkatkan kapabilitas di sektor kesehatan, dan juga daya saing. Daya saing ini bukan hanya soal ramah terhadap investor sektor kesehatan, tetapi juga dalam meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) dan dalam memproduksi alat-alat kesehatan unggulan yang membawa identitas Indonesia.

# KAPABILITAS POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANI NASIONALISME VAKSIN DI MASA PANDEMI

Mutia Kartika Andalus<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 meningkatkan kontestasi politik luar negeri negara-negara di dunia. Kontestasi tersebut tercermin pada perubahan perilaku tiap negara dalam menangani pandemi COVID-19, salah satunya yakni mendahulukan kepentingan nasional tanpa mengindahkan prinsip-prinsip internasional yang berlaku. Gagasan tersebut merupakan awal mula munculnya “Nasionalisme Vaksin” sebagai justifikasi suatu negara atas sekuritisasi alat-alat kebutuhan kesehatan seperti alat-alat kesehatan penunjang tabung oxygen, obat-obatan dan, yang terpenting, vaksin menjadi penting bagi tiap negara untuk memprioritaskan kebutuhan nasionalnya terlebih dahulu. Sekuritisasi tersebut mengakibatkan timbulnya potensi ancaman ketimpangan distribusi vaksin, khususnya pada negara berkembang. Munculnya gagasan “nasionalisme vaksin” dapat memperburuk kondisi ketimpangan tersebut atau bahkan dapat menjadi faktor utama terjadinya kondisi ketimpangan tersebut. Maka dari itu, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam mengatasi fenomena tersebut. Indonesia membutuhkan kapabilitas politik luar negeri yang mempunyai dalam membangun kerja sama dalam pemenuhan vaksinasi dalam negeri dan menghadapi situasi nasionalisme vaksin yang terjadi pada masa pandemi.

## Nasionalisme Vaksin

Vaksinasi merupakan satu-satunya jalan keluar dalam menangani pandemi COVID-19. bagaikan efek domino, vaksinasi berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Vaksinasi yang gencar akan memutus rantai penyebaran COVID-19 dan sebagai *kick off* dalam pemulihan ruang gerak perekonomian, khususnya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada keterangan pers secara virtual usai sidang kabinet paripurna.

---

<sup>1</sup> Peneliti di *Indonesian Politics and Research Consulting (IPRC)*. Email: mutiarakartikaandalus@gmail.com



Sri Mulyani mengemukakan bahwa vaksinasi covid-19 menjadi syarat utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sekaligus memulihkan perekonomian nasional. Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa, sejak berjalannya proses vaksinasi, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif yang dilihat berdasarkan realisasi APBN tahun 2021. Pada kuartal I, Perekonomian Indonesia minus di angka 0,7%, namun pada kuartal II, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan naik di angka 3,1 – 3,3%<sup>2</sup> (Kominfo, 2021).

Vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari adanya ancaman ketimpangan distribusi vaksin. Ancaman terhadap ketimpangan vaksinasi terjadi apabila dikursus mengenai Nasionalisme vaksin atau Nationalism vaccine terus digalakkan oleh negara-negara penghasil dan pemilik pasokan vaksin yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya. Fenomena nasionalisme vaksin tercermin di dalam dominasi negara-negara besar pada proses distribusi vaksin global guna mengamankan terlebih dahulu vaksin demi keberlangsungan penanganan pandemik di negara-negara tersebut. Nasionalisme vaksin tidak hanya menyebabkan langkanya pasokan vaksin dalam negeri, tetapi juga potensi ketimpangan akses yang terjadi antara negara maju dan berkembang dalam memperoleh vaksin. Harry Kretchmer mengemukakan bahwa nasionalisme vaksin identik dengan beberapa fenomena seperti contoh yaitu negara yang paling kaya adalah negara pertama yang mengamankan triliunan dosis vaksin ketika negara berkembang masih berjuang untuk mengakses vaksin tersebut (Kretchmer, 2021).

Pendapat terkait dengan nasionalisme vaksin dalam perspektif ekonomi juga turut dikemukakan oleh Muhammad Chatib Basri. Basri (2021) mengemukakan bahwa nasionalisme vaksin dapat berimplikasi kepada lambannya pemulihan pandemi global. Di dalam tulisan yang dimuat oleh Basri, Basri mengutip data statistik yang dirilis oleh *The Economist* bahwa negara kaya dengan populasi 14 persen dari penduduk dunia telah menguasai sebanyak 53 persen stok vaksin. Dominasi pasokan vaksin global oleh negara kaya mengakibatkan kurangnya distribusi pasokan vaksin di negara-negara berkembang. Hal tersebut menyebabkan lambatnya tercipta *herd immunity* suatu negara yang kian berdampak kepada *herd immunity* global. Belum tercapainya *herd immunity* akan menghambat pembukaan batas-batas

---

<sup>2</sup> Dilansir dari Tempo, Proyeksi pertumbuhan perekonomian yang diprediksi oleh Pemerintah jauh melesat lebih tinggi di angka 7,07 persen pada Quartal II dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 17 Tahun. (Tempo, 2021).

negara, dan, bahkan lebih buruk lagi yaitu, potensi akan munculnya gelombang ketiga pandemik. Dampak dari Nasionalisme Vaksin terhadap perekonomian negara adalah sebagai berikut:

1. Negara yang lambat akan vaksinasi akan juga lambat dalam pemulihan ekonomi domestik, sebaliknya negara yang cepat vaksinasinya maka pemulihan ekonominya juga akan semakin cepat. Maka dari itu, Perekonomian Amerika dan China memimpin pada saat ini.
2. Pemulihan ekonomi akan tergantung kepada bagaimana kemampuan suatu negara dalam mengatasi pandemik. Anjuran untuk diam rumah memiliki implikasi yang buruk kepada perekonomian bangsa karena merusak Indeks Manajer Pembelian (IPM), Kapasitas produksi, dan penggunaan tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi mobilitas, maka akan semakin tinggi juga indeks belanja.
3. Meskipun terdapat proyeksi peningkatan perekonomian pada kuartal II tahun 2021, keterlambatan vaksinasi, yang disebabkan oleh distribusi vaksin global maupun nasional, tetap akan menunda proses pemulihan ekonomi.
4. Pemulihan ekonomi yang timpang dapat berdampak kepada keseimbangan dan stabilitas ekonomi global. Hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yakni pemulihan ekonomi Amerika dan China dapat meningkatkan ekspor. Harga minyak sawit, batu bara dan karet akan semakin meningkat. Namun, dampak negatifnya adalah ketimpangan tersebut dampak mempengaruhi kestabilan pasar keuangan yang pada akhirnya dapat menyebabkan mata uang rupiah melemah.

Vaksinasi Indonesia, yang secara empiris, masih jauh tertinggal dengan negara lain menguatkan argumentasi bahwa, secara tidak langsung, nasionalisme vaksin berdampak kepada penyelesaian vaksinasi Indonesia yang diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2023. *The Economist* menulis bahwa vaksinasi Indonesia setara dengan negara mayoritas di Afrika atau setara dengan negara miskin (CNBC, 2021).

Maka dari itu, guna memenuhi kepentingan nasional, yakni pemenuhan vaksin dalam rangka penanganan pandemi covid-19, kapasitas politik luar negeri Indonesia menjadi ujung tombak perjuangan bangsa. Kapasitas politik luar negeri Indonesia diperdebatkan dalam aspek keefektifan

dari strategi politik luar negerinya. penelitian ini akan membahas terkait bagaimana kapasitas politik luar negeri Indonesia dalam merespons atau menanggapi fenomena terkait nasionalisme vaksin atau *nationalism vaccine* yang terjadi di kancah global.

### **Politik Luar Negeri Bebas-Aktif dan Kapabilitas Politik Luar Negeri**

Secara teori, Menurut pendapat lima guru besar Universitas California, Rodee, Anderson, Quixmny, Christol, Greene (dalam (Kusno, 2014, p. 13) bahwa konsep politik luar negeri diartikan sebagai pola perilaku suatu negara dalam hubungan antar negara yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Politik Luar Negeri berpengaruh kepada proses pembuatan kebijakan dan keputusan dengan jalan tertentu. Selain itu, definisi mengenai Politik Luar Negeri juga tertera di dalam Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI Tahun 1984-1988. Dalam Rencana Strategi tersebut, Politik Luar Negeri didefinisikan sebagai suatu kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah dalam hubungan negara tersebut dengan negara lain atau, lebih luas lagi, lintas kontingen, dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Politik Bebas-Aktif merupakan dikursus yang telah hadir sejak masa proklamasi. Politik Bebas-Aktif merupakan buah pemikiran dari Drs. Mohammad Hatta yang juga dinobatkan sebagai Pilar Politik Luar Negeri Indonesia. Hatta mengemukakan (dalam (Yulianto, 2008, p. 30) bahwa Sejatinya, Indonesia tidak memainkan sikap keberpihakannya di antara dua blok yang bertentangan, merujuk pada masa perang dingin yang dimulai sejak pada tahun 1947, Indonesia berjalan menempuh jalannya sendiri dalam menangani permasalahan internasional. Kebijakan tersebut disebut dengan istilah “bebas.” Istilah “aktif” di dalam politik bebas-aktif dimaksudkan sebagai upaya bekerja secara penuh dengan semangat bagi pemeliharaan perdamaian dunia. Istilah prinsip politik bebas-aktif diperkuat setelah Indonesia bersama empat negara Asia menggagas Konferensi Asia Afrika pada Tahun 1955 sebagai momentum dihasilkannya Dasa Sila Bandung. Nilai-nilai yang tertera di dalam Dasa Sila Bandung memperkuat konsepsi politik luar negeri yang menekankan prinsip-prinsip: 1) Ko-eksistensi secara damai antara bermacam-macam ideologi, 2) persahabatan dan politik bertetangga baik untuk *good neighbor policy*, 3) pendirian anti-imperialisme dan kolonialisme (Yulianto, 2008).

Perspektif politik luar negeri dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan model Adaptif yang dikemukakan oleh James N. Rosenau (1974, p. 42). Model adaptif dalam perspektif politik luar negeri adalah model yang

menjelaskan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada lingkungan struktural (perubahan internal maupun eksternal) suatu negara. Model ini menjelaskan bahwa setiap negara merupakan sebuah entitas yang kerap melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan berpijak kepada kapabilitas, posisi geografi yang dimiliki oleh suatu negara, dan yang lainnya. Rosenau menambahkan bahwa sejatinya politik luar negeri merupakan suatu mekanisme untuk negara-negara beradaptasi terhadap perubahan yang dihadapinya. Maka dari itu, perubahan menuntut pemerintah untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya. Rosenau (1974, p. 59). mengemukakan bahwa terdapat empat kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri sebagai respons dari hambatan atau rintangan yang ada di dalam lingkungan domestik maupun internasional. Empat kemungkinan pola adaptasi tersebut yakni:

1. *Preservative adaptation* (merespons permintaan dan perubahan dari lingkungan internal dan eksternal)
2. *Acquiescent adaptation* (merespons permintaan dan perubahan eksternal)
3. *Intransigent adaptation* (merespons permintaan dan perubahan internal)
4. *Promotive adaptation* (tidak merespons permintaan dan perubahan internal dan eksternal).

Kapabilitas Politik Luar Negeri suatu negara cenderung identik dengan tindakan. Kapabilitas Politik Luar Negeri dalam penelitian ini dianalisis melalui perspektif *power* sebagai motor penggerak pada suatu Tindakan. Holsti (1983, p. 137) mengemukakan bahwa Tindakan suatu negara didorong oleh *power* atau kekuasaan. Politik luar negeri melihat kebijakan luar negeri sebagai sebuah aksi dalam hubungan interaksi dan komunikasi, sinyal, dan isyarat guna mendukung perilaku negara tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Power tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek yakni:

1. Pengaruh/ Motivasi. Pengaruh dipergunakan oleh pemerintah memperoleh tujuan-tujuan yang berkaitan dengan hal-hal seperti prestige, wilayah, jiwa, bahan mentah, keamanan dan aliansi,

2. Mobilisasi sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah objek yang berbentuk fisik maupun mental yang dijadikan sebagai alat negosiasi.
3. Tindakan yang mempengaruhi hubungan kedua negara. Seperti contoh, Tindakan yang dilakukan oleh negara A akan mempengaruhi negara B, meskipun keduanya tidak berkomunikasi. Berlaku di dalam ranah multilateral.
4. Pengaruh dan Kekuasaan. Jika Tindakan negara A dapat mempengaruhi negara B, namun negara B tidak maka negara A lebih kuat dibandingkan dengan negara B.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menjelaskan kapabilitas politik luar negeri Indonesia dalam merespon nasionalisme vaksin pada masa pandemi, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lune dan Berg (2017, p. 11) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang identik dengan pengertian, konsep, definisi, karakter, metafora, simbol, dan deskripsi terhadap sesuatu. Bertolak dari gagasan tersebut, penelitian ini mengeksplorasi makna dari sebuah konsep politik luar negeri dan fenomena nasionalisme vaksin. Eksplorasi makna tersebut akan menghilir kepada penggambaran tentang fenomena yang dihasilkan secara deskriptif.

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dan pemberitaan pada media *online*. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini dalam upaya untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengeksplorasi makna tentang fenomena nasionalisme vaksin yang terjadi di kancah global serta implikasinya kepada pemenuhan vaksinasi di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini berimplikasi kepada penyesuaian-penyesuaian baru sebagai tuntutan dari urgensi pemenuhan stok vaksin dalam rangka mengakselerasi vaksinasi dan penanganan pandemi nasional. Penyesuaian tersebut mempengaruhi perubahan arah kebijakan yang ditandai dengan adanya *refocusing* pada area-area kebijakan luar negeri yang menjadi prioritas, salah satunya adalah penguatan diplomasi kesehatan. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam ceramahnya pada kegiatan Program Pendidikan Regular Angkatan (RPPA) 62, mengemukakan bahwa Diplomasi Kesehatan harus menjadi prioritas diplomasi Indonesia pada saat

ini. Diplomasi Kesehatan yang gencar digalakkan oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk membangun ketahanan kesehatan nasional serta kemandirian di bidang kesehatan. Diplomasi Indonesia adalah Diplomasi yang adaptif, inovatif, berani mengambil keputusan serta patuh kepada prinsip-prinsip internasional seperti:

1. Indonesia patuh kepada prinsip-prinsip Internasional yang tertera di dalam Piagam PBB dan Piagam ASEAN.
2. Indonesia percaya kepada kekuatan dialog dan Kerja sama yang dapat menjawab permasalahan global yang dihadapi.
3. Kepentingan Nasional merupakan kiblat politik luar negeri Indonesia yang tidak bisa ditawar (LEMHANAS, 2021).

Indonesia terus berupaya untuk mencari ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri serta aktif berjuang dalam kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara di hadapan forum multilateral seperti COVAX Facility di saat belum surutnya angka penyebaran covid global dan semangat proteksionisme negara yang masih tinggi. Semangat proteksionisme tersebut dapat dilihat melalui tindakan restriktif suatu negara terhadap ekspor vaksin, alat kesehatan, dan obat-obatan untuk negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional negara tersebut terlebih dahulu. Hal tersebut dikategorikan sebagai nasionalisme vaksin yang berdampak kepada keterlambatan distribusi vaksin ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

COVAX Facility merupakan program yang diinisiasi oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai program distribusi vaksin guna mendapatkan akses vaksin secara aman, efektif, dan merata. Dilansir melalui portal Indonesia Baik, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengemukakan bahwa, sejak awal pandemi terjadi, Indonesia telah aktif menjalin Kerja sama internasional dan multilateral, salah satunya yaitu melalui WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) *Accelerator COVAX Facility* guna memperjuangkan kemudahan akses, keamanan hingga harga vaksin yang terjangkau. Meskipun bukan satu-satunya kerja sama multilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia tetap berusaha sekuat tenaga untuk memastikan ketersediaan vaksin COVID-19 dapat diakses oleh seluruh dunia tanpa melihat negara berpenghasilan tinggi maupun negara yang berpenghasilan rendah. (Indonesiabaik.id, 2020)

Bertolak dari hal tersebut, maka model adaptif dalam perspektif politik luar negeri Indonesia menjadi relevan dalam menghadapi fenomena

nasionalisme vaksin yang terjadi. Indonesia mampu beradaptasi menghadapi tekanan internal, yakni pemenuhan vaksin, dan tekanan eksternal, yakni kesulitan akses vaksin yang diakibatkan oleh adanya sekuritisasi vaksin oleh tiap negara. pola adaptif yang dilakukan oleh politik luar negeri Indonesia masuk ke dalam pola *preservative adaptive* yakni politik luar negeri Indonesia yang dinilai merespons tuntutan domestik serta perubahan internal dan eksternal yang terjadi di kancah global yakni ketimpangan akses vaksin dan tuntutan pemenuhan vaksin, terutama saat seluruh dunia menghadapi mutasi virus corona yang dua kali lebih cepat penyebarannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bagian sebelumnya, Holsti (1983) mengemukakan bahwa Tindakan suatu negara dalam menghadapi suatu isu merupakan tolak ukur dari Kapabilitas Politik Luar Negeri suatu negara. Tindakan suatu negara didorong oleh Power yang dapat dilihat melalui empat aspek berikut.

### **Pengaruh/Motivasi**

Pengaruh Indonesia di kancah global dalam menghadapi nasionalisme vaksin tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan nasionalnya sendiri yakni memperjuangkan kesetaraan akses vaksin di dalam forum multilateral agar Indonesia mendapat jaminan serta pengamanan akses vaksin nasional. Tujuan yang mendorong Indonesia dalam kesetaraan akses vaksin global dapat dibilang cukup tinggi. Hal tersebut terlihat pada pencapaian dan kontribusi Indonesia menjadi *Co-chair COVAX AMC Engagement Group* (AMC EG). COVAX AMC EG merupakan forum negara AMC dengan negara-negara donor terkait dengan pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC<sup>3</sup>. Tentunya, Indonesia melihat peluang yang signifikan didalam forum ini untuk melaksanakan sekuritisasi kebutuhan vaksin nasional (LEMHANAS, 2021).

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengemukakan makna dari terpilihnya Indonesia sebagai Wakil Ketua atau *Co-chair COVAX AMC Engagement Group* (AMC EG) diantaranya yaitu: 1) sebagai bentuk kepercayaan dunia internasional, khususnya negara berkembang, kepada Indonesia, 2) Tanggung jawab besar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara (Covid.go.id, 2021). Berangkat dari

---

<sup>3</sup> Negara AMC merupakan negara yang telah masuk kedalam kategori Advance Market Commitment atau dengan kata lain negara yang akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi total penduduk dunia. AMC merupakan sebuah perjanjian yang bersifat legally binding mengenai subsidi vaksin dengan harga tertentu untuk penyediaan vaksin yang belum diproduksi di negara berkembang. Melalui AMC, selain akses vaksin yang secure, Indonesia juga memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme Official Development Assistance yang membuat harga vaksin menjadi semakin murah (Bisnis.com, 2020).

pencapaian tersebut, Indonesia dinilai memiliki pengaruh yang cukup tinggi di dalam dunia Internasional dalam menghadapi nasionalisme vaksin. Pengaruh tersebut dapat dilihat melalui kepercayaan negara-negara AMC, khususnya negara berkembang, kepada Indonesia untuk memberikan tanggung jawab bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin yang lebih merata.

### **Mobilisasi Sumber Daya**

Berangkat dari apa yang dikemukakan oleh Holsti, Sumber daya yang dimaksud dalam gagasan ini adalah sumber daya yang dapat berupa fisik dan mental. Sumber daya paling berharga yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi nasionalisme vaksin adalah prinsip bebas-aktif yang dianut oleh politik luar negeri Indonesia. Politik bebas-aktif Indonesia membawakan Indonesia banyak kemudahan dalam pemenuhan vaksin. Dikala persaingan pengembangan vaksin kian memanas, antara Amerika, China, Inggris, dan lainnya, Diplomasi Indonesia dapat bergerak bebas melakukan pengadaan vaksin dengan melakukan kerja sama dengan negara manapun. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Satuan Tugas COVID-19 di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Daniel Tumpal, yang mengemukakan bahwa Indonesia mendapatkan mobilitas atau ruang gerak yang besar dalam melakukan diplomasi pengadaan vaksin. Salah satu contohnya yakni akses vaksin COVID-19 yang diperoleh dari China atau Tiongkok dan Uni Emirat Arab yang didapat melalui kunjungan langsung Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, pada pertengahan tahun 2020 (JPNN, 2020).

Sejauh ini, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama antar negara atau bilateral yang di antaranya yaitu Indonesia dengan China melalui komitmen penyediaan vaksin Sinovac, Indonesia dengan Uni Emirat Arab melalui G24 terkait dengan vaksin Sinopharm, Inggris dengan komitmen kerja sama penyediaan 100 juta dosis vaksin AstraZeneca, dukungan Pemerintah Belanda terhadap Indonesia dengan mengirimkan 3 juta dosis vaksin Johnson & Johnson dan AstraZeneca, serta donasi dari Amerika Serikat terhadap vaksin Moderna sebanyak 3 juta dosis (UNTAN, 2020).

Diplomasi Indonesia juga turut membangun kemandirian kesehatan bangsa. Kemandirian tersebut tercipta oleh adanya transfer teknologi dari negara lain ke dalam negeri, sehingga Indonesia dapat berdikari membuat pasokan obat dan vaksin dalam negeri tanpa bergantung kepada bantuan asing. kerja sama pembuatan vaksin dalam negeri tercermin dalam nota kesepahaman antara perusahaan BUMN, Bio Farma, dengan dua perusahaan



amerika yakni Dynavax Technologies dan Baylor College of Medicine dalam Kerjasama pengembangan vaksin dalam negeri. Lebih menggembirakan, Bio Farma juga menekan dua nota kesepahaman terkait dengan upgrading sistem kesehatan nasional, yang pertama yaitu dengan *Google Health* dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui solusi dalam teknologi digital, dan yang kedua yakni mendukung konsep digital dan wellness corner pada tahun 2050 di apotek milik BUMN di Indonesia (VOA Indonesia, 2021).

### **Tindakan Yang Mempengaruhi Hubungan Kedua Negara**

Cara kerja hubungan multilateral yang belum secara maksimal berjalan dengan baik pada masa pandemi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk lebih berperan bebas-aktif menghadapi permasalahan pandemi pada saat ini. Syafwi (2020) mengemukakan bahwa kegagalan dari forum multilateral dalam menghadapi pandemi membuat poros politik hubungan internasional secara tidak langsung berubah dari multilateral menjadi unilateral. Pendekatan unilateral merupakan pendekatan yang lebih fokus dalam mengurus diri sendiri tanpa mengindahkan kaidah internasional.

Upaya Indonesia sebagai negara dengan Politik bebas-aktif semakin terlihat nyata. Indonesia terus menyuarakan kesetaraan akses vaksin dengan mekanisme berbagi dosis vaksin atau sharing dose dari negara yang memiliki pasokan vaksin lebih banyak kepada negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, pada kesempatan Pertemuan Dewan Aliansi Vaksin GAVI dengan perwakilan dari COVAX Advance Market Commitment (AMC). Selain itu, dalam Forum tersebut, Indonesia juga menyoroti terkait dengan diskriminasi vaksin yang sedang terjadi pada saat ini. Diskriminasi vaksin tersebut berupa larangan masuk dari pelaku perjalanan lintas batas, meskipun mereka telah divaksin dengan jenis yang mendapat izin penggunaan darurat dari WHO. Maka dari itu, Indonesia secara persuasif mengajak seluruh negara yang tergabung ke dalam forum untuk melakukan joint effort dalam menangani masalah tersebut (Merdeka, 2021).

Selain dalam forum tersebut, Indonesia juga menyuarakan terhadap penolakan diskriminasi vaksin dan menyuarakan mekanisme sharing dose pada forum multilateral ASEAN. Pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM). Didalam kesempatan tersebut, Retno Marsudi mengemukakan bahwa mekanisme berbagi dosis vaksin dapat digunakan untuk mempercepat vaksinasi di negara-negara ASEAN. Hal tersebut dikarenakan vaksinasi di

Kawasan Asia Tenggara masih dikategorikan rendah dibandingkan dengan Kawasan lain, sebagai contoh Amerika Utara. Retno mengemukakan bahwa vaksinasi di Asia Tenggara baru sebesar 8,91% dari total populasi, sedangkan Amerika Utara berada di angka 64,33% dari total jumlah penduduk dan Eropa telah memvaksin sebesar 52,85% dari total populasi. Hal tersebut mendasari pentingnya mekanisme berbagi dosis antar negara. Selain itu, Indonesia juga turut berkontribusi dalam dana hibah COVID-19 ASEAN Response Fund sebagai dana yang digunakan dalam pengadaan pasokan vaksin di ASEAN untuk mendorong dan membantu negara-negara berkembang yang ada di Asia Tenggara lebih cepat memperoleh pasokan vaksin (ANTARA, 2021).

Maka dari itu, Tindakan aktif yang terus dilakukan Indonesia berdampak kepada penguatan solidaritas Kawasan dan berkontribusi kepada distribusi pasokan vaksin yang lebih merata. Hal tersebut disadari oleh Indonesia, sebagai negara berkembang menengah yang secara tata letak geografis sangat strategis untuk melakukan dialog-dialog mengenai pemerataan vaksinasi.

### **Pengaruh Dan Kekuasaan**

Seperti yang telah disinggung di atas, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia memberikan pengaruh sedikit demi sedikit bagi pemerataan vaksinasi di Kawasan maupun bagi nasional Indonesia sendiri. Pengaruh tersebut dapat dirasakan oleh Kunjungan Wakil Luar Negeri pertama ke Kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, setelah pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy R. Sherman, mengemukakan bahwa Amerika akan mendonasikan 80 Juta Dosis Vaksin di Tahun 2022 yang tidak hanya di peruntukan untuk Indonesia, melainkan untuk seluruh negara di Dunia (Kompas, 2021).

Posisi strategis Indonesia yang dekat dengan negara Asia dan Pasifik serta sebagai mitra strategis Amerika Serikat menjadi nilai tambah bagi Kapabilitas Politik luar Negeri Indonesia dalam menghadapi nasionalisme vaksin yang terjadi pada masa pandemi. Selain kapabilitas politik luar negeri Indonesia, Kapabilitas Indonesia dalam menangani isu pandemi, termasuk dalam upaya penyediaan vaksin, mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satu contohnya yakni apresiasi dari Pemerintah Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia sebagai salah satu co-chair dalam COVAX AMC dalam upaya memastikan adanya akses global yang adil dalam memperoleh vaksin. kerja sama antara Inggris dan Indonesia menjadi semakin kuat dengan adanya penekanan kerja sama baru

antara kedua negara tersebut di dalam bidang keamanan, perdagangan, kerja sama dalam mendukung sektor ekonomi kreatif Indonesia, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (RII, 2021).

Kapabilitas Politik Luar Negeri Indonesia dalam menghadapi nasionalisme vaksin juga tercermin dalam peran Indonesia sebagai Presidensi G20 yang akan diselenggarakan pada November 2022. Selain mempunyai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, Peran Indonesia dalam G20 dapat menyuarakan kepentingan-kepentingan negara-negara miskin dan berkembang yang ada di Kawasan Asia Pasifik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa terdapat beberapa point yang diangkat oleh Indonesia di dalam forum G20 tersebut yakni (Bisnis.com, 2021):

1. Berdasarkan aspek pembangunan sosial, Indonesia mempunyai peluang untuk mendorong topik-topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin, agar vaksin menjadi global *public goods*.
2. Indonesia akan mendorong kesetaraan akses vaksin bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya.

## PENUTUP

Indonesia mempunyai karakteristik Politik Luar Negeri Indonesia yang *preservative adaptative*, di mana Indonesia sangat merespons perubahan dan kebutuhan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kepentingan nasional seperti kebutuhan pengadaan vaksinasi dan faktor eksternal yang berupa perubahan pendekatan hubungan kerja sama negara-negara yang semula melalui pendekatan multilateral menjadi unilateral, yang merupakan awal mula munculnya nasionalisme vaksin. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakefektifan forum multilateral dalam menangani pandemi COVID-19.

Dalam pemenuhan kebutuhan internal, yakni pengadaan vaksin dikala terjadinya kesenjangan distribusi dan akses vaksin sebagai akibat dari adanya nasionalisme vaksin, kapabilitas Politik luar negeri Indonesia dinilai memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam menghadapi permasalahan tersebut. Berdasarkan Indikator di atas, yang di antaranya yakni Pengaruh, Mobilisasi Sumber Daya, Tindakan, dan Kekuasaan, Indonesia dinilai mampu dalam menghadapi nasionalisme vaksin. Salah satu faktor kesuksesan Indonesia dalam menghadapi nasionalisme vaksin adalah Politik Bebas-Aktif yang mempermudah Indonesia dalam mendapatkan akses vaksin dari negara-

negara baik Amerika maupun China. Selain itu, keaktifan Indonesia di dalam forum multilateral seperti COVAX AMC, ASEAN, dan G20 mempermudah Indonesia untuk menggemakan semangat kesetaraan distribusi dan akses vaksin bagi negara-negara miskin dan berkembang. Faktor geografis yang strategis serta menjadi mitra strategis banyak negara maju, khususnya Amerika Serikat, mempermudah Indonesia untuk menjawab permasalahan akses vaksin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia sangat memanfaatkan posisi serta panggung yang dimilikinya untuk menghadapi permasalahan nasionalisme vaksin baik untuk dalam negeri, maupun untuk kepentingan kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kusno, M. (2014). Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia . *Konfrontasi Journal*, 12-25.
- KOMPAS. (2020, 06 07). Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/07/120000369/tujuan-politik-luar-negeri-indonesia?page=all>. Penuli. Retrieved from <https://www.kompas.com/>: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/07/120000369/tujuan-politik-luar-negeri-indonesia?page=all>
- Yulianto, A. B. (2008). Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966.
- Sushanti, S. (2020). KONTESTASI NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *JURNAL ILMIAH WIDYA SOSIOPOLITIKA*, 14-23.
- Kominfo. (2021, 07 05). Akselerasi Vaksinasi untuk Jaga Ketahanan Masyarakat dan Pulihkan Ekonomi. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/>: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35474/akselerasi-vaksinasi-untuk-jaga-ketahanan-masyarakat-dan-pulihkan-ekonomi/0/berita>
- Tempo. (2021, Agustus 07). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 Tertinggi Sejak 17 Tahun. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/>: <https://nasional.tempo.co/read/1491810/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-kuartal-ii-2021-tertinggi-sejak-17-tahun>
- Kretchmer, H. (2021, Jan 06). Vaccine nationalism – and how it could affect us all. Retrieved from <https://www.weforum.org/>: <https://www.weforum.org/agenda/2021/01/what-is-vaccine-nationalism-coronavirus-its-affects-covid-19-pandemic/>

- CNBC. (2021, 02 05). <https://www.cnbcindonesia.com/>. Retrieved from Vaksinasi Indonesia Jauh Tertinggal: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205152454-8-221356/vaksinasi-indonesia-jauh-tertinggal>
- Basri, M. C. (2021, 04 25). Nasionalisme Vaksin dan Ekonomi. Retrieved from <https://www.feb.ui.ac.id/>: <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/04/25/muhamad-chatib-basri-nasionalisme-vaksin-dan-ekonomi/>
- Dedi, A. (2018). KAPABILITAS SISTEM POLITIK SEBAGAI PARAMETER KEBERHASILAN SUATU PEMERINTAHAN. DPK FISIP Universitas Galuh Ciamis, 9-17.
- Holsti, K. (1983). *International Politics : A Framework for Analysis #* . New Jersey: Prentice Hall.
- Rosenau, J. N. (1974). *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Lune, H., & Berg, B. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences NINTH EDITION GLOBAL EDITION*. Essex England: Pearson.
- LEMHANAS. (2021, 04 28). Retno Marsudi: Diplomasi Kesehatan Jadi Salah Satu Prioritas Diplomasi Indonesia. Retrieved from <http://www.lemhannas.go.id/>: <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1063-retno-marsudi-diplomasi-kesehatan-jadi-salah-satu-prioritas-diplomasi-indonesia>
- Indonesiabaik.id. (2020). Mengenal Kerja Sama COVAX Facility. Retrieved from <https://indonesiabaik.id/>: <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kerja-sama-covax-facility>
- Bisnis.com. (2020, Sept 17). Indonesia Masuk Kategori AMC, Ini Keuntungannya Ketika Akses Vaksin Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Indonesia Masuk Kategori AMC, Ini Keuntungannya Ketika Akses Vaksin", Klik selengkapnya di sini: <https://kabar24.bisnis.com/read/2020>. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com>: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200917/15/1293133/indonesia-masuk-kategori-amc-ini-keuntungannya-ketika-akses-vaksin>
- Covid.go.id. (2021, Jan 15). Menteri Luar Negeri RI Terpilih Menjadi Co-Chair COVAX-AMC EG. Retrieved from <https://covid19.go.id/>: <https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/menteri-luar-negeri-ri-terpilih-menjadi-co-chair-covax-amc-eg>
- JPNN. (2020, 11 18). Politik Luar Negeri Bebas Aktif Memudahkan Indonesia di Masa Pandemi Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Memudahkan Indonesia di Masa

- Pandemi", <https://www.jpnn.com/news/politik-luar-negeri-bebas-aktif-memud>. Retrieved from <https://www.jpnn.com/:https://www.jpnn.com/news/politik-luar-negeri-bebas-aktif-memudahkan-indonesia-di-masa-pandemi>
- UNTAN. (2020, 11 09). Diplomasi Vaksin Covid-19 Pemerintah Indonesia. Retrieved from <https://www.untan.ac.id:https://www.untan.ac.id/diplomasi-vaksin-covid-19-pemerintah-indonesia/>
- VOA Indonesia. (2021, 09 18). Bio Farma Teken Kerja Sama Pengembangan Vaksin COVID dengan Dua Perusahaan Amerika. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com:https://www.voaindonesia.com/a/bio-farma-teken-kerja-sama-pengembangan-vaksin-dengan-dua-perusahaan-amerika/6233826.html>
- Syafwi, I. (2020). Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Hubungan Internasional: Menuju dunia Paska-Liberal. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan,.
- Merdeka. (2021, September 29). Menlu Sebut Indonesia Siap Jadi Pusat Produksi Vaksin Covid di Asia-Pasifik. Retrieved from <https://www.merdeka.com/:https://www.merdeka.com/peristiwa/menlu-sebut-indonesia-siap-jadi-pusat-produksi-vaksin-covid-di-asia-pasifik.html>
- ANTARA. (2021, Agustus 2). Indonesia dorong vaksinasi ASEAN, soroti diskriminasi vaksin. Retrieved from <https://www.antaraneews.com:https://www.antaraneews.com/berita/2302302/indonesia-dorong-vaksinasi-asean-soroti-diskriminasi-vaksin>
- Kompas. (2021, Juni 1). Wamenlu Amerika Serikat Bahas Distribusi Vaksin Untuk ASEAN. Retrieved from <https://www.kompas.tv/:https://www.kompas.tv/article/179555/wamenlu-amerika-serikat-bahas-distribusi-vaksin-untuk-asean>
- RII. (2021, Apr 08). Inggris Apresiasi Peran Indonesia Distribusikan Vaksin Astrazeneca. Retrieved from <https://rri.co.id/:https://rri.co.id/internasional/1019134/inggris-apresiasi-peran-indonesia-distribusikan-vaksin-astrazeneca>
- Bisnis.com. (2021, Sept 16). OPINI: Presidensi G20 & Peran Indonesia Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "OPINI: Presidensi G20 & Peran Indonesia ", Klik selengkapnya di sini: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210916/9/1442986/opini-presidensi-g20-peran-indonesia>. Au. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com:https://ekonomi.bisnis.com/read/20210916/9/1442986/opini-presidensi-g20-peran-indonesia>
- Bisnis.com. (2021, Sept 15). Home Ekonomi & bisnis Ekonomi Pimpin G-20, Indonesia Akan Dorong Topik Kesetaraan Akses Vaksin Untuk Negara

Berkembang Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Pimpin G-20, Indonesia Akan Dorong Topik Kesetaraan Akses Vaksin Untuk Negara Berk. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/:https://ekonomi.bisnis.com/read/20210915/9/1442686/pimpin-g-20-indonesia-akan-dorong-topik-kesetaraan-akses-vaksin-untuk-negara-berkembang>

# KOHESIFITAS SOSIAL DAN KEGAGALAN NEOLIBERALISME SAAT PANDEMI COVID-19

Claudia Syarifah<sup>1</sup> & Bima Andrianto Pambudi<sup>2</sup>

Seperi kapitalisme, Covid-19 menyebar secara global, mengisolasi dan mengikat hubungan antar manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.<sup>3</sup> Covid-19 menyebar melalui dahak di udara dan menetap di permukaan.<sup>4</sup> Hingga 31 Oktober 2021 secara global jumlah orang terkonfirmasi covid-19 sebanyak 245.373.039 dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 4.979.421.<sup>5</sup> Kendati kemunculan covid-19 masih menimbulkan polemik apakah covid-19 muncul secara alami atau memang sengaja dibuat pihak berkepentingan.

## COVID-19: PROTESNYA BUMI

Suka tidak suka harus kita akui bahwa, "Covid-19 adalah konsekuensi logis dari aktivitas kita yang semakin merusak dan melawan alam." Premis ini bersandarkan pada Karl Marx dan sahabat seperjuangannya, Friedrich Engels. Keduanya menganalisis keberadaan manusia, hubungan antara manusia dan alam serta cara-cara di mana produksi dan aktivitas ekonomi lainnya berlangsung. Perubahan iklim mungkin tidak terlihat memiliki hubungan yang jelas dengan wabah Covid-19, tetapi jika mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh neoliberalisme dalam perusakan habitat alam dan punahnya keanekaragaman hayati, memang meningkatkan risiko penyakit patogen yang secara langsung dapat menghancurkan planet kita.

Meningkatnya permintaan akan makanan dan peralatan sehari-hari menyebabkan perambahan yang masif, bahkan yang belum pernah terjadi

---

<sup>1</sup> Mater Hubungan Internasional UGM. Email: syarifahclaudia@gmail.com

<sup>2</sup> Division of Strategic Planning of Bank Jateng Headquarter Semarang. Email: bimaandrianto@gmail.com

<sup>3</sup> WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, WHO, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020>. Accessed November 1, 2021

<sup>4</sup> 'Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted?', WHO, <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>. Accessed November 1, 2021.

<sup>5</sup> Update Corona 31 Oktober China Catat Kasus Lokal Tertinggi, Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/31/070138865/update-corona-31-oktober-china-catat-kasus-lokal-tertinggi-singapura?page=all>. Accessed November 1, 2021



sebelumnya ditambah dengan deforestasi dan penghancuran besar-besaran planet kita. Demikian juga, perburuan spesies liar yang tidak diatur juga berkontribusi terhadap penyebaran. Semua ini didorong oleh dogma neoliberal terkait perdagangan bebas dan persaingan pasar. Oleh karena itu, krisis Covid-19 menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati kita, dan menciptakan zona penyangga antara manusia dan hewan. Hal ini membutuhkan komitmen serius seluruh elemen negara dalam mengatasi keadaan darurat iklim dan lingkungan yang lebih mendesak dan lebih serius dari sebelumnya.

Marx dan Engels menegaskan bahwa “kerja merupakan sumber kekayaan dan prasyarat utama bagi keberadaan manusia,” keduanya menunjukkan bagaimana harmoni antara manusia, tanah, air dan udara mengarah pada perubahan. Dalam bukunya yang berjudul ‘Capital,’ Marx menjelaskan bahwa “kerja adalah suatu proses di mana manusia dan alam berpartisipasi.” Marx selanjutnya menjelaskan bahwa proses kerja tidak lain adalah proses produksi. Dia menunjukkan bagaimana tenaga kerja adalah sumber kekayaan dan bagaimana tenaga kerja terus menghasilkan nilai lebih. Dalam karya yang sama, Dia menjelaskan bagaimana di bawah kapitalisme, nilai lebih diambil alih oleh kapitalis, yang merupakan pemilik alat-alat produksi. Dia juga menjelaskan bagaimana perampasan nilai lebih ini mengarah pada akumulasi kekayaan di satu kutub dan pemiskinan rakyat pekerja di kutub lainnya.<sup>6</sup> Ketimpangan tersebut tercermin dalam kondisi kerja dan kehidupan para pekerja yang menyedihkan.

## **KEGAGALAN NEOLIBERALISME**

Pandemi memaksa seluruh elemen masyarakat bahkan para pemikir neoliberal untuk mengakui bahwa tindakan pemerintah dan solidaritas kolektif sangat dibutuhkan. Negara tidak hanya diharapkan untuk bertindak, tetapi juga diminta untuk bertindak secara komprehensif, memikul tanggung jawab sebagai aktor global utama. Ini bertentangan dengan inti sistem ekonomi-politik yang saat ini dicirikan sebagai kapitalis dan neoliberal. Ideologi neoliberal mempromosikan individualisme dan mencakup keyakinan bahwa pasar bebas yang tidak diatur menghasilkan efisiensi dan kemakmuran. Sejalan dengan itu, negara diharapkan bertindak seminimal

---

<sup>6</sup> An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital, Monthly Review Press, U.S. (2012).  
[https://libcom.org/files/Michael\\_Heinrich\\_Alex\\_Locascio-An\\_Introduction\\_to\\_the\\_Three\\_Volumes\\_of\\_Karl\\_Marx\\_s\\_Capital-Monthly\\_Review\\_Press,U.S.\(2012\).pdf](https://libcom.org/files/Michael_Heinrich_Alex_Locascio-An_Introduction_to_the_Three_Volumes_of_Karl_Marx_s_Capital-Monthly_Review_Press,U.S.(2012).pdf).  
 Accessed October 27, 2021

mungkin. Dalam memahami bahwa logika neoliberal mendukung pasar bebas karena kapasitas korektifnya, kondisi pandemi terbukti membutuhkan tindakan negara yang tegas, memunculkan kesulitan bagi para pendukung neoliberalisme. Terlepas dari popularitas prinsip neoliberal, tindakan neoliberal yang konsisten saat pandemi patut dikritik. Kapitalisme itu predator, dan sekali predator tetap predator.

Covid merenggut kebebasan masyarakat sebagaimana yang diidentifikasi oleh ahli pembangunan berkelanjutan, Amartya Sen. Kebebasan tersebut berkenaan dengan kemerdekaan yang bersifat instrumental baik langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap kemampuan umum setiap orang untuk hidup lebih bebas, kebebasan tersebut diantaranya; Pertama, kebebasan politik termasuk di dalamnya hak-hak sipil dan hak dasar termasuk di dalamnya melakukan kritik, kebebasan mengungkapkan sikap politik, kebebasan pers, dan sebagainya yang pada masa Covid-19 dianggap kurang. Berdasarkan survei tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Litbang pada tahun 2020, sebanyak 36 persen masyarakat Indonesia merasa tidak bebas dan tidak aman dalam menyampaikan pendapat dan ekspresinya di media sosial. Pendiri Serikat Pengajar HAM, Herlambang Wiratman berpendapat bahwa serangan digital yang sering terjadi di masa pandemi disebabkan berkembangnya oligarki dan adanya sistem politik kartel pada pemerintahan saat ini sehingga efeknya hak-hak masyarakat tersingkirkan.<sup>7</sup> Para elit saling bahu membahu bukan untuk menyelamatkan golongan yang lemah, tetapi merangkul kepentingan rekan sesama elit demi keberlangsungan perburuan rente.

Kedua kesempatan-kesempatan ekonomi. Kesempatan ekonomi berkaitan dengan kesempatan pada bidang ekonomi dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi untuk tujuan-tujuan konsumsi, produksi, atau pertukaran. Pada masa pandemi arus pengiriman barang tersendat karena adanya pembatasan, terutama bagi pelaku UMKM di mana proses pengiriman barang terhambat yang berdampak pada keterlambatan pembayaran, padahal gaji karyawan harus tetap dibayarkan tepat waktu. Gambaran ini yang menyebabkan kebanyakan UMKM gulung tikar di era pandemi. Fenomena seperti ini tentu tidak relevan bagi usaha-usaha besar apalagi skala MNC.

---

<sup>7</sup> Masa Pandemi Covid-19 Perlu Lebih Banyak Ruang Berekspres, [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id), <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/17/1784/masa-pandemi-covid-19-perlu-lebih-banyak-ruang-berekspres.html>.

Ketiga, kesempatan-kesempatan sosial yang berkaitan pada pencapaian taraf hidup pribadi seperti pendidikan, kesehatan dan juga kehidupan yang layak. Tidak hanya taraf hidup pribadi yang menyenangkan namun juga agar bisa mendapatkan kemudahan dalam rangka partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan, ekonomi dan politik. Kesenjangan antara desa dan kota semakin tajam di era pandemi terutama terkait akses fasilitas kesehatan, internet dan ekonomi, kehidupan di-*remote area* semakin susah dan terbelakang.

Keempat, jaminan keterbukaan. Kemerdekaan ini berkaitan dengan adanya kebutuhan akan adanya jaminan keterbukaan dan kejelasan. Bagi pihak tertentu hal ini dapat menjadi alat yang efektif dalam rangka mencegah terjadinya tindak korupsi, penyelewengan keuangan yang mungkin merugikan kepentingan publik terlebih di era pandemi ini. Persoalan semisal belum tersedianya *Dashboard* Anggaran Khusus COVID-19 di daerah-daerah sampai ke desa menyulitkan masyarakat dan lembaga penelitian untuk mengakses informasi anggaran penanganan COVID-19 secara rinci. Kondisi ini menyulitkan lembaga pengawasan juga masyarakat umum untuk melakukan pengawasan.

Kelima, perlindungan keamanan. Perlindungan keamanan penting guna menyediakan jaring pengaman sosial sebagai usaha untuk membuat penduduk merasa aman. Perlindungan keamanan ini berupa pengaturan-pengaturan kelembagaan pasti sebagai contoh adalah ketentuan hukum resmi bagi pemberian jaminan pengangguran dan bantuan pendapatan tambahan bagi fakir miskin dan juga ketentuan-ketentuan mengenai keadaan darurat seperti hibah untuk bencana kelaparan dan penyediaan bantuan lapangan kerja guna memperoleh pendapatan bagi kaum miskin. Kebijakan pembatasan gerak dari pemerintah baik PPKM maupun *lockdown* seperti pisau bermata dua, di satu sisi bertujuan untuk memperlambat laju covid-19 namun di sisi lainnya membawa konsekuensi yaitu melambatnya laju perekonomian. Di samping itu muncul dampak sosial yaitu pengurangan jumlah pegawai hingga adanya PHK terhadap pegawai sehingga memberikan masalah baru berupa kemiskinan. Arus distribusi barang menjadi lambat. Tidak sedikit pekerja dari beragam sektor berada pada titik kerentanan dan hak-haknya terkikis secara besar-besaran, terutama para buruh. Sebagian besar pekerja perempuan, mempertaruhkan hidup mereka setiap hari: petugas kesehatan garis depan kekurangan alat pelindung diri (APD), sementara staf supermarket mengeluh tentang kurangnya masker dan sarung tangan.

## WAJAH ASLI NEOLIBERALISME

Di desa Banyuputih Kabupaten Jepara contohnya, terdapat beberapa pabrik multinational yang melanggar prosedur kesehatan sehingga mengakibatkan puluhan warga desa Banyuputih positif Covid-19. Kepala Desa Banyuputih pun dalam wawancara memperkuat pernyataan tersebut dan memberikan kesaksian bahwa tingginya kasus Covid-19 di desa yang dipimpinnya karena dampak pabrik-pabrik multinational yang melanggar PPKM, setidaknya terdapat empat pabrik multinasional dengan karyawan ribuan orang.<sup>8</sup> Seruan pabrik multinasional di kabupaten Jepara untuk tetap melanjutkan aktivitas produksi harus dibaca sebagai keputusan neoliberal yang konsisten. Di sini pabrik multinational memaksakan upaya untuk menjalankan fungsi pasar. Kepala desa dan para pemimpin di level setelahnya juga mendapatkan kecaman atas keputusan ini, dituduh gagal bertindak. Akan tetapi, pendekatan mereka tidak boleh dianggap sebagai kelambanan, melainkan tindakan neoliberal yang konsisten, memilih untuk tidak melakukan apapun adalah sebuah pilihan.

Kritik terhadap pilihan ini menunjukkan bahwa sedikit yang ingin melihat pasar bebas mencoba menghadapi krisis yaitu Covid-19. Risiko kesehatan masyarakat terlalu tinggi. Disini kita melihat perubahan menuju keinginan untuk intervensi negara yang kuat. Namun terlalu banyak *power relations* yang terlibat dalam aktivitas ekonomi lintas negara ini. Dari sini kita dapat belajar dari Squid Game bahwa, "*Squid Game is a capitalist dystopia showing that under neoliberalism, we're competing to death for falsely limited resources.*" Lalu apa peran modal swasta selama ini? Perdebatan yang ada menunjukkan bahwa modal swasta dipandang sebagai subjek dari efek tindakan korektif yang merugikan dan tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, bantuan dari sektor swasta dipandang sebagai tindakan amal yang patut dipuji. Setiap minggu pabrik garmen memberikan 1 liter susu sapi kepada para karyawan dengan harapan pemenuhan gizi dan vitamin, serta masker untuk perlindungan diri dari Covid-19. Hal ini dilakukan dengan asumsi dapat mengatasi krisis yang dihadapi. Tetapi sayangnya, jika kita memandang donasi ini sebagai cara pasar secara proaktif menangani krisis, maka tampak jelas bahwa modal swasta (bertindak di pasar bebas) tidak memiliki kapasitas untuk mengurangi bencana dan memberlakukan tindakan darurat, seperti larangan bepergian dan *lockdown* karena wewenang seperti ini hanya dimiliki

---

<sup>8</sup> 'Perusahaan Langgar Prokes Puluhan Warga Desa Banyuputih Jepara Positif Covid-19,' Jatengnews.id, <https://jateng.inews.id/berita/perusahaan-langgar-prokes-puluhan-warga-desa-banyuputih-jepara-positif-covid-19>. Accessed October 29, 2021

oleh negara. Jika diserahkan ke sektor swasta untuk mengatasi, maka kita akan menyaksikan tingkat infeksi dan kematian yang lebih tinggi daripada jika diserahkan ke tangan pemerintah yang bertindak dalam solidaritas kolektif.

Dengan tidak adanya tindakan negara yang kuat atau dengan membiarkan pada mekanisme pasar semata, artinya kita membiarkan penipisan populasi secara signifikan. Hal ini sulit dipertahankan dari sudut pandang moral (walaupun beberapa orang mungkin tidak masalah). Sebaliknya, kita diharuskan untuk mendukung pandangan moral yang menghargai kehidupan manusia dan berusaha untuk melindungi nilai-nilai yang terkandung dalam solidaritas kolektif. Untuk bertindak berdasarkan prinsip tersebut, pengelolaan pandemi seperti COVID-19 harus diserahkan kepada negara.

Pandangan bahwa negara harus bertindak tampaknya menjadi konsensus umum, yang ditunjukkan dengan tidak adanya pertanyaan seperti “haruskah negara melakukan intervensi untuk menangani COVID-19?” melainkan “bagaimana negara harus melakukan intervensi?” Sepinya komentar terkait pertanyaan yang pertama membuktikan bahwa neoliberalisme memiliki batasan-batasan dalam kapasitasnya untuk mempromosikan kesejahteraan, kekurangan ini bahkan diterima oleh kaum neoliberal. Kesulitan tindakan negara selama ini muncul dari prinsip-prinsip sistem global neoliberal yang kukuh dengan karakter individualismenya yang bertentangan dengan nilai-nilai solidaritas kolektif. Artinya, sistem ekonomi yang didasarkan pada individualisme selama masa krisis ini harus mengorbankan logikanya sendiri untuk melindungi masa depannya di kemudian hari saat krisis selesai, ini yang pada akhirnya menghadirkan paradoks.

### ***PHARMACY INDUSTRIAL COMPLEX***

Banyak yang berpikir bahwa pandemi ini mempengaruhi semua negara, semua komunitas dan semua kelas dengan cara yang sama. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus membiarkan pemerintah menanganinya dan kemudian memperjuangkan keprihatinan kita. Tapi hal tersebut tidaklah benar. Kapitalis lebih pintar, atas nama memerangi pandemi, para kapitalis mengambil kendali lebih besar di tangan mereka. Pandemi Covid-19, telah mengungkap mengapa ekonomi neoliberal tidak layak diterapkan di era pandemi seperti ini karena neoliberalisme mengutamakan memaksimalkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemerintahan yang menganut dogma neoliberal menempatkan kepentingan minoritas kaya di atas kepentingan

masyarakat umum. Salah satu aspek terburuk dari neoliberalisme adalah pengaruhnya terhadap beragam sektor ekonomi besar dan institusi internasional yang memiliki kekuatan besar di dunia. Dari pemerintah hingga IMF, WTO hingga institusi, neoliberalisme mendikte dan memengaruhi kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun. Neoliberalisme telah berusaha mengubah kesehatan masyarakat menjadi komoditas: demi keuntungan kelompok tertentu. Para elit melakukan segalanya untuk menjaga satu sama lain lagi seperti yang mereka lakukan selama krisis moneter.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan relasi kuasa (*power relations*) dalam segala bidang sangatlah erat, termasuk industri farmasi. Berita terbaru saat artikel ini ditulis adalah dugaan para menteri yang terlibat bisnis alat test Covid-19 atau yang disebut *polymerase chain reaction* (PCR).<sup>9</sup> Kondisi ini mirip sekali dengan peristiwa Military Industrial Complex (MIC), bedanya ini terjadi pada isu Kesehatan, sehingga mungkin cocok disebut sebagai *Pharmacy Industrial Complex*.<sup>10</sup> Di saat pandemi berlangsung hal yang sama menyakitkannya dengan komodifikasi kesehatan adalah kurangnya peralatan dan fasilitas medis untuk merawat orang-orang yang sakit. Dalam hal ini, orang-orang tua dan balita yang menjadi korban paling rentan.

## SATU BADAI, LAIN PERAHU

Pandemi membuat manusia di manapun keberadaannya, apapun kebangsaannya, mau tidak mau dihadapkan dengan persoalan yang sama yakni penanganan pandemi. Ketika pandemi pertama kali muncul, banyak yang dengan cepat berkomentar bahwa kita semua berada di kapal yang sama, kita semua memiliki ancaman yang sama bahkan tujuan yang sama, seolah-olah pandemi memunculkan *spirit* yang membawa kita menuju era kosmopolitanisme secara instan, bahkan menimbulkan harapan baru bahwa sebentar lagi *sustainable development goals*/SDGs akan tercapai dengan mudah karena kohesifitas sosial di antara kita menguat di era pandemi. Meskipun maksud dari gagasan ini mungkin tepat apabila dikatakan berada di tempat yang sama, tetapi dampaknya pasti berbeda. Mengatakan bahwa

---

<sup>9</sup> 'Dugaan Menteri di Bisnis PCR Pakar Desak Subsidi Pemerintah,' CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102185126-20-715715/dugaan-menteri-di-bisnis-pcr-pakar-desak-subsidi-pemerintah>. Accessed November 4, 2021

'Presiden Diminta Evaluasi Para Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR,' Tribun News, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/04/presiden-diminta-evaluasi-para-menteri-yang-diduga-terlibat-bisnis-tes-pcr>. Accessed November 4, 2021

<sup>10</sup> Terinspirasi dari buku Claudia Syarifah yang sedang dalam proses penerbitan berjudul Logika Perusahaan Militer Swasta dalam Pusaran Military Industrial Complex.

kita semua berada di kapal yang sama berarti menolak titik-temu dari pandemi. Meskipun kita semua mungkin berada dalam badai yang sama, kita semua berada di perahu yang sangat berbeda. Covid-19 sepenuhnya musibah bagi kaum proletar yang membuat semakin terimpit kemiskinan, sementara bagi kaum borjuis adalah saatnya untuk beristirahat, berdiam diri di rumah dan menikmati kekayaannya.

Melalui PBB negara-negara berkomitmen untuk berkerja sama dalam upaya mengentaskan persoalan bersama dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang termuat dalam SDGs. Kendati demikian, skeptisme terhadap cita-cita global ini tidak dapat dihindari mengingat SDGs ini merupakan kelanjutan dari *global goals* sebelumnya yakni *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dinilai tidak membuahkan hasil dan justru memperparah kesenjangan. Implementasi paradigma MDGs dinilai menimbulkan paradoks karena strategi pengurangan kemiskinan yang digunakan. Altruisme negara-negara yang terwujud dalam semangat “charity” kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemberian *Official Development Assistance* (ODA) kepada negara-negara berkembang ataupun kurang berkembang. Padahal, ODA itu merujuk pada *Poverty Strategy Paper* (PRPS) yang merupakan dasar operasional bagi IMF dan Bank Dunia. MDGs merupakan norma global yang memobilisasi bantuan luar negeri atau ODA.<sup>11</sup> Hal tersebut memunculkan kritik tajam; bagaimana mungkin kemiskinan dapat ditangani dengan mekanisme yang justru pada saat yang sama menciptakan kemiskinan.

*... We as people and nations have different flags, skin colors, languages, cultures and borders of sovereignty that we have to respect. Despite this differences, I still believe that we are one people though in different nations but in one world. I have always belief that everyone is stakeholder in the world affairs. We are all global citizens of the world united in spirit to contribute positively and actively for global peace and development (Claudia Syarifah, UN General Assembly on SDGs 2015).*

SDGs ibarat pisau bermata dua, jika berada di tangan para kosmopolitan ia adalah seperangkat gagasan mulia untuk kebaikan seluruh

---

<sup>11</sup> Syarifah, Claudia. "Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Jalan Menuju Masyarakat Kosmopolitan." *Indonesian Perspective* 4, no. 1 (2019): 21-39. Accessed October 29, 2021. <https://doi.org/10.14710/ip.v4i1.24478>

umat dan kehidupan di bumi. Tetapi jika berada di tangan para kapitalis maka SDGs dapat diubah menjadi agenda individualis berbahaya yang saat ini memandu intervensi internasional dan yang telah memperburuk kesenjangan di antara masyarakat, agenda seperti ini tidak akan ditangani karena tidak ada upaya untuk mengidentifikasi kegagalan ini, ditambah tidak ada upaya untuk menawarkan pendekatan strategis untuk menghadapi mereka baik di tingkat negara atau tingkat internasional karena negara dan masyarakat seringkali terlalu lemah untuk menghadapi tekanan internasional yang menciptakan kesenjangan dan mengancam pembangunan keberlanjutan. Kebanyakan “Rencana Aksi” internasional tidak lebih dari simbolisme atau, dapat dikatakan sebagai alat penggalangan dana untuk birokrat dan organisasi yang mementingkan diri sendiri, untuk menarik sumber daya bukan untuk memecahkan masalah, tetapi demi meredam masalah dalam jangka pendek, dan tampaknya SDGS juga termasuk dalam kategori ini. Organisasi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam proses merancang SDGs masing-masing memiliki potensi konflik kepentingan dalam mendanai pelaksanaannya.

Dengan adanya SDGs para pemilik kapital akan beralih dari bisnis yang tidak ramah lingkungan ke bisnis yang ramah lingkungan, semisal yang dahulu berbisnis di bidang pertambangan batu bara ataupun minyak dan gas bumi kemudian beralih berinvestasi di bidang panel surya. SDGs dibajak oleh kapitalisme sebagai alat baru untuk membuka pangsa pasar global, secara gencar negara-negara maju yang sudah menguasai teknologi canggih mulai mengancam segala jenis aktivitas produksi ataupun konsumsi yang sekiranya merusak lingkungan, mulailah mereka mempromosikan produk-produk mereka seperti panel surya, mobil listrik, motor listrik dan lainnya yang diklaim ramah lingkungan.

Saat ini tentunya keliru apabila kita berandai-andai untuk memilih mana sistem yang lebih tepat, bagaimana jika di era pandemi ini kita terapkan sistem sosialis (negara yang kuat), lalu jika nanti pandemi usai kita beralih Kembali pada sistem neoliberal? Beberapa pilihan tersebut berfungsi untuk “mengaburkan pilihan yang benar.” Banyak wilayah di kabupaten Jepara menghadapi keputusan sulit untuk bertindak tegas mencegah penyebaran COVID-19 sambil mengakui bahwa “kami menempatkan kekurangan gizi dan kelaparan bagi ribuan orang, anak-anak dan terutama lansia adalah orang-orang yang paling berisiko. Ini menunjukkan bahwa sistem neoliberal saat ini tidak mampu menyediakan kapasitas untuk tindakan solidaritas kolektif yang berarti, sebuah situasi di mana gizi terjamin dan kesehatan masyarakat dipandang sebagai dua dimensi kesejahteraan. Sebaliknya, Wilayah-wilayah



di kabupaten Jepara menganggap ini sebagai pilihan yang harus dibuat, sehingga jelas tidak disajikan dengan pilihan yang berharga. Bahwa para aktor di wilayah kabupaten Jepara harus memilih antara mengambil tindakan serius untuk mencegah penyebaran virus atau melindungi jaminan ekonomi warganya. Jika kita amati lebih dalam, pilihan sebenarnya di sini adalah antara “sosialisme atau barbarisme.” Selanjutnya, pilihan ini tidak dapat dilihat sebagai salah satu yang berlaku untuk situasi saat ini dan akan hilang nanti di kemudian hari; untuk itu harus ditanyakan mengenai logika neoliberal di luar kondisi krisis.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: dapatkah logika neoliberal dipertahankan secara konsisten jika selama masa-masa sulit logika itu harus dan segera ditinggalkan? Sebuah negara yang berfungsi dengan bentuk solidaritas kolektif yang bermakna dalam konteks pandemi global harus menghilangkan komitmen yang kuat terhadap individualisme dan pasar bebas jika ingin mengoptimalkan kesejahteraan individu dan kolektif. Selain itu, ia harus menahan diri untuk tidak jatuh kembali ke pelukan komitmen tersebut begitu krisis berakhir, karena ia hanya akan menghadapi kenyataan yang sama ketika krisis berikutnya bergulir.

Berdasarkan penjelasan panjang lebar di atas, adalah mustahil terjalin kohesi sosial yang kuat di masyarakat kita apabila neoliberalisme masih dipertahankan dan dipupuk. Kohesi sosial yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang ahli ilmu sosiologi dari Kanada, Judith Maxwell, diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nilai-nilai bersama untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, yang mana dalam prosesnya masyarakat memiliki perasaan bahwa mereka terlibat dalam usaha bersama, menghadapi tantangan bersama, dan sebagai anggota komunitas yang sama.<sup>12</sup> *Spirit* inilah yang berusaha diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mempromosikan *Sustainable Development Goals* 2030. Spirit yang sama juga diharapkan kehadirannya selama pandemi Covid-19 berlangsung. Muncul para filantropi yang menyumbangkan dana, tenaga, pikiran, untuk saling meringankan beban sesama muncul karena rasa kemanusiaan. Di Jawa Tengah kita mengenal istilah *jogo tonggo*, yakni saling menjaga sesama warga sekitar dari penularan Covid, apabila ada yang terinfeksi maka saling jaga dan memberikan perhatian.

---

<sup>12</sup> Maxwell, Judith. “Social Dimensions of Economic Growth: Eric J. Hansen Memorial Lecture,” (25 January 1996), University of Alberta. Accessed October 28, 2021.

Kohesi sosial terdiri dari rasa memiliki (*sense of belonging*) baik itu terhadap keluarga, kelompok sosial, lingkungan, tempat kerja, negara atau bahkan masyarakat internasional. Rasa memiliki ini tidak boleh eksklusif, justru identitas ganda dan rasa memiliki harus didorong. Komunitas yang kohesif adalah komunitas yang memiliki kesamaan visi dan rasa memiliki terhadap semua anggota komunitas, keragaman latar belakang dan keadaan orang yang berbeda dihargai secara positif sebagai rahmat. Walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kesempatan hidup yang sama.

Kohesi sosial mencerminkan pembagian berdasarkan kelas sosial dan faktor ekonomi dan dilengkapi dengan teori modal sosial yang berkaitan dengan 'ikatan' antara orang-orang dan adanya rasa saling percaya. Di era pandemi Covid-19 kohesivitas sosial masyarakat benar-benar diuji. Hal ini terlihat dirusak oleh pengucilan sosial yang dialami oleh individu atau kelompok, umumnya mereka yang dinyatakan positif Covid-19. Banyak yang masih peduli satu sama lain, tetapi tidak sedikit juga yang melakukan pengucilan karena takut terpapar virus. Kohesi komunitas mencerminkan perpecahan berdasarkan komunitas yang dapat diidentifikasi, umumnya dirusak oleh kerugian, diskriminasi dan ketidakpuasan yang dialami masyarakat tertentu.

## SARAN

Bukanlah hal yang sulit untuk membangun kohesi sosial dalam masyarakat andaikan kita semua mulai menyadari bahwa kepedulian itu bersifat *omni-directional*, kita akan paham bahwa kepedulian itu menular. Ideasi 'kita adalah aku' dapat diterapkan sebagai titik awal penghapusan ketidakadilan, dedikasi pada nilai ekologi dan humanisme, pelayanan jujur dan yang tulus, kesemuanya itu hendaknya kita mulai dari diri sendiri. Mungkin terdengar utopia, tetapi bagi penulis itu adalah *utopian realism*.

# TUMBUHNYA SOLIDARITAS WARGA DI TENGAH PANDEMI: GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL

Nanang Suryana<sup>1</sup>

**P**ANDEMI COVID-19 seolah menjadi batu uji bagi daya tahan sosial masyarakat kita. Dia berlaku pula sebagai antangan yang menginterupsi ikatan kewargaan kita sebagai bagian dari komunitas. Melalui pandemi, fondasi kehidupan sosial kita ditantang sekaligus diperkuat. Munculnya berbagai solidaritas yang mewujud dalam ragam inisiatif lokal, adalah jawaban atas berbagai tantangan tersebut. Kendati terhimpit dalam kondisi yang sulit, elan solidaritas dalam masyarakat muncul. Mengingatkan kita tentang pentingnya merawat gotong royong sebagai modal sosial dalam hidup berbangsa.

\*\*\*

Semua bermula pada akhir 2019. Dari sebuah kota bernama Wuhan di Cina, dunia diguncang hebat oleh sebuah virus yang sama sekali baru. Virus itu kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), yang lebih dikenal dengan nama virus Corona. Corona adalah sekumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini kemudian disebut Covid-19. Karenanya, infeksi virus Corona disebut juga infeksi COVID-19.<sup>2</sup>

Virus Corona bergerak dengan sangat cepat. Seiring laju mobilitas *carrier* yang membawanya, Corona menyebar hampir ke seluruh negara di dunia, tidak terkecuali ke Indonesia. Di Indonesia, kasus pertama virus Corona, diumumkan pemerintah pada 2 Maret 2020. Dua orang WNI yang merupakan ibu dan anak, dinyatakan positif, setelah berinteraksi dengan warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia.

Sejak saat itu, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia. Pemerintah membentuk tim satuan tugas penanggulangan Covid-19, yang dipimpin langsung oleh presiden Joko Widodo. 13 Maret 2020, Presiden kemudian menandatangani Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas

---

<sup>1</sup> Peneliti di Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC). Email: nanangsuryana07@gmail.com

<sup>2</sup> Lihat Lihat <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>

Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).<sup>3</sup>

Tahap demi tahap, berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berbagai eksperimen kebijakan dicoba untuk mencari format ideal penanganan. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, hingga menginisiasi sebuah kebiasaan anyar yang diistilahkan kemudian dengan nama normal baru (*new normal*).

Secara terpusat, pemerintahan memimpin perang terhadap Covid-19. Dalam waktu hampir bersamaan, selain diharuskan berfokus pada isu kesehatan, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi yang terguncang akibat terhentinya sebagian besar aktifitas masyarakat. Dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah berada pada situasi sulit untuk menyeimbangkan dua isu utama: kesehatan dan ekonomi.

Keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020, berdampak luas pada keadaan ekonomi masyarakat. Sebuah kondisi yang secara cepat berdampak secara langsung pada daya tahan masyarakat. Sepanjang tahun 2020, tercatat daya beli masyarakat secara konsisten terus tergerus. Jutaan pekerja mengalami penurunan pendapatan, bahkan, banyak dari mereka, yang harus kehilangan pekerjaan akibat iklim usaha yang terganggu.

Angka pengangguran semakin meningkat. Hal ini terpotret dalam laporan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 yang menunjukkan sebanyak 29,12 juta orang, atau 14,28% dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja, terdampak pandemi. Jumlah pengangguran ketika itu meningkat menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53% menjadi 50,77 juta orang dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Sebaliknya, jumlah pekerja informal melonjak 60,47% menjadi 77,68 juta orang.<sup>4</sup>

Akibatnya, Corona bukan hanya menghidupkan sinyal bahaya bagi negara, namun memicu denyut nadi kegentingan yang sama di tengah masyarakat. Suasana mencekam hampir terasa di mana-mana. Aktifitas masyarakat terhenti. Berbagai pertanyaan datang silih berganti menghantui pikiran publik. Terlebih, pemberitaan media seputar COVID-19 di masa-masa

---

<sup>3</sup> Lihat <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>

<sup>4</sup> Lihat <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

awal kedatangannya, penuh oleh statistik jumlah korban baik yang dirawat maupun yang meninggal.

Hingga, seiring waktu berjalan, para pakar sudah mulai memahami bagaimana cara COVID-19 bekerja. Melalui medium apa saja virus ini dapat berpindah, termasuk, bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah penularannya. Kendati tingkat sebaran dan jumlah korban semakin eskalatif, pada periode ini, tabir jawaban perlahan mulai terbuka. Pemerintah, dipandu para ahli, mulai merumuskan kebijakan yang dirasa efektif untuk menekan laju penyebaran dan penularan. Fajar harapan pelan-pelan mulai terlihat.

Di saat yang sama, optimisme itu akhirnya menjalar ke banyak arah. Publik yang pada awalnya bingung dan ketakutan mulai bergerak. Bentuk-bentuk solidaritas antar warga mulai tumbuh. Dalam kesulitan yang dirasakan secara kolektif tersebut, berbagai inisiatif lokal muncul satu demi satu. Warga bahu membahu berkontribusi melalui berbagai hal. Terlibat secara aktif dalam penanganan COVID-19, yang ketika itu sudah berubah status menjadi pandemi.

Dalam bentuk virtual, inisiatif warga tercermin melalui ragam tindakan: konsultasi dokter gratis, jasa iklan (*endorse*) gratis untuk pelaku usaha, donasi uang dan kebutuhan pokok, layanan konseling gratis, penggalangan dana, termasuk berbagai sosialisasi yang terkait dengan upaya membentengi diri dari COVID-19.<sup>5</sup>

Dalam bentuk-bentuk jaringan non-virtual, inisiatif-inisiatif warga terlihat dalam berbagai kerja sosial: pembuatan Alat Pelindung Diri (APD), menyediakan tempat isolasi mandiri, dapur umum, layanan peminjaman tabung oksigen, pembuatan peti mati, termasuk terlibat menjadi relawan pemulasaraan jenazah dan pemakaman.<sup>6</sup>

Berbagai tindakan dan inisiatif warga tersebut, bermuara pada satu praktik hidup yang kita sebut sebagai gotong royong. Sebuah kerja bersama yang oleh Soekarno dikatakan sebagai inti dari perasan Pancasila. Melalui berbagai aksi solidaritas yang tumbuh di tengah masyarakat, praktik gotong royong secara nyata berperan menjadi modal sosial yang berjangkar dalam masyarakat. Orang tidak mempersoalkan apa latar belakang sosialnya, bagaimana perannya dalam masyarakat selama ini, atau berada di mana tingkat moralitasnya, selama dia membutuhkan, publik akan bersolidaritas

---

<sup>5</sup> Lihat Lihat <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60f649dbd4f30/solidaritas-warga-di-tengah-pandemi>

<sup>6</sup> Lihat <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60f649dbd4f30/solidaritas-warga-di-tengah-pandemi>

sedapat mungkin untuk membantu. Sesuatu yang oleh Durkheim sebut masyarakat telah memproyeksikan dirinya sebagai bagian dari kesatuan: solidaritas.

### **SOLIDARITAS WARGA: BEBERAPA PETIKAN PENGALAMAN**

Praktik gotong royong mewujud dalam berbagai bentuk solidaritas dan inisiatif-inisiatif lokal. Dalam bentuk virtual, aksi solidaritas tersebut tercermin melalui laman-laman digital seperti: *wargabantuwarga.com*, *kitabisa.com*, *KawalCOVID19*, *Indo Relawan*, *Qiscus*, *Kata.ai*, *Forum Zakat*, dan lain sebagainya.

Malalui tagar *#WargaBantuWarga*, atau laman *wargabantuwarga.com* misalnya, publik saling membantu untuk berbagi informasi seputar akses dan bantuan kesehatan dalam melawan COVID-19. Kanal ini diinisiasi oleh sejumlah masyarakat dan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang selama ini tersebar di berbagai situs, artikel, sosial media, dan *broadcast* pesan di komunitas. Kanal tersebut menampung sejumlah informasi COVID-19 seperti daftar kontak fasilitas dan alat kesehatan per provinsi, laman edukasi seputar COVID-19, hingga prosedur melakukan isolasi mandiri.<sup>7</sup>

Tidak hanya terjadi pada ranah virtual, solidaritas warga juga nampak pada jaringan-jaringan non-virtual. Upaya kolektif untuk secara bersama-sama bertahan di tengah Pandemi COVID-19, telah berhasil menautkan simpul-simpul sosial dan kultural dalam masyarakat yang selama ini tidak terput. Jaringan-jaringan warga yang sebelumnya terserak, dalam waktu yang cepat berhasil saling bertemu dan terikat.

Salah satu praktik solidaritas warga yang sangat terasa ketika itu adalah gerakan bersama dalam menyediakan alat kesehatan. Salah satu alat kesehatan yang sangat dibutuhkan warga, terlebih di awal-awal pandemi adalah tabung oksigen. Tidak sebandingnya permintaan dan ketersediaan tabung oksigen di pasaran, menjadikan harga tabung oksigen ketika itu melambung tinggi. Di Jakarta misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan harga jual oksigen melonjak tajam hingga 900% pada sejumlah *marketplace*. Padahal, terkait harga, secara regulasi sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa

---

<sup>7</sup> Lihat <https://www.wargabantuwarga.com>; <https://nasional.tempo.co/read/1484904/pandemi-covid-19-gerakan-solidaritas-warga-bantu-warga-meningkat>; <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/09/19240201/bahu-membahu-lawan-pandemi-lewat-wargabantuwargacom-informasi-penting?page=all>; dan <https://mediaindonesia.com/humaniora/417372/wargabantuwargacom-inisiatif-saling-bantu-hadapi-pandemi>

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran oleh sebagian pihak yang sengaja memanfaatkan kelangkaan barang di masa Pandemi COVID-19 sebagai peluang menumpuk keuntungan.<sup>8</sup>

Kondisi seperti di atas penulis alami sendiri. Di tengah sulitnya mendapat tabung oksigen yang sesuai dengan kebutuhan penyintas COVID-19, melalui jejaring alumni perguruan tinggi, penulis akhirnya mendapatkan tabung oksigen dari grup *WhatsApp* (WA) anggota komunitas. Secara pribadi, penulis tidak pernah bertemu dengan narahubung yang memberi informasi terkait dengan peminjaman tabung oksigen tersebut. Namun, ketika itu, penulis merasakan betul rasa kebersamaan dan kehendak saling membantu sangat tinggi dan menebal. Rasa percaya sebagai sesama warga tumbuh secara organik dan sangat cair. Meminjam istilah Gabriel Marcel, seorang filsuf dari Prancis, penulis ketika itu merasakan apa yang disebut Marcel bahwa salah satu kata kunci yang dapat melukiskan hubungan manusia dengan sesamanya adalah kata “kehadiran.”

Berbagai tindakan kolektif dan aksi solidaritas seperti yang tergambar dalam beberapa petikan pengalaman di atas, menunjukkan bahwa berbagai sel-sel jaringan sosial yang sebelumnya terpisah, perlahan namun pasti, dengan secara cepat mulai terpaut satu dengan yang lain. Terlebih, dengan kemudahan akses teknologi informasi seperti sekarang, berbagai bentuk perbuatan baik tersebut akan semakin mudah terfasilitasi.

Media sosial yang sebelumnya sering menjadi ruang-ruang pertengkaran, ketika itu berubah menjadi ruang-ruang bersemainya kebaikan. Tukar menukar opini berubah menjadi geliat saling berbagi. Pandemi tentu berkontribusi pada banyaknya kisah-kisah duka, namun, melalui berbagai petikan pengalaman di atas, kita tentu harus tetap optimis melihat realitas, karena, selalu ada musim semi selepas badai tiba.

## **GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL**

Tumbuhnya solidaritas warga di masa Pandemi COVID-19, seakan menampar skeptisisme banyak pihak yang menilai gotong royong sudah hilang dalam masyarakat kita. Fenomena tumbuhnya berbagai inisiatif lokal di masa Pandemi COVID-19, jelas memberi harapan baru bagi masa depan solidaritas. Warga secara natural terkonsolidasi untuk bersatu membantu sesama.

---

<sup>8</sup> Lihat <https://newssetup.kontan.co.id/news/temuan-kppu-di-marketplace-harga-oksigen-di-dki-jakarta-melambung-sampai-900>

Berbagai wajah solidaritas yang muncul dalam ragam bentuk adalah kenyataan sosial yang tentu harus kita syukuri.

Solidaritas warga yang tercermin dalam praktik hidup bergotong royong tersebut, adalah sebuah sikap yang didasari oleh pengalaman kolektif untuk dapat bertahan di tengah kesulitan. Gotong royong, secara nyata adalah modal sosial yang kita miliki sebagai komunitas. Sebuah wujud sikap altruistik, yang mengikat pengalaman kita bersama sebagai bangsa.

Sebagai sebuah praktik hidup, gotong royong tentu kita pahami sebagai sebuah perwujudan dari nilai-nilai kebaikan yang terwariskan dari bergenerasi-generasi jauh sebelum kita. Dia bergerak secara menyenjang hingga hari ini, dan mungkin entah sampai kapan. Soekarno, bahkan menyebut gotong royong adalah inti dari Pancasila. Dalam pidatonya dihadapan sidang BPUPK, Soekarno mengatakan:

“... lima dasar tersebut (Pancasila) dapat diperas kembali menjadi tiga: socio-nationalisme, socio-demokratie, dan ke-Tuhanan, dan jika diperas kembali menjadi satu tidak lain dasar negara tersebut adalah gotong royong. Gotong royong adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama“.<sup>9</sup>

Gotong royong adalah modal sosial kita sebagai bangsa Indonesia. Sebuah modal yang meniscayakan keadaan di mana anggota masyarakat dibayangkan tidak mungkin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi hanya secara individu. Oleh karenanya, diperlukan kebersamaan dan kerja sama dari segenap anggota masyarakat untuk mengatasi hal tersebut.<sup>10</sup>

Sebagai sebuah modal sosial, gotong royong berakar pada gagasan, kepercayaan, norma, dan jaringan informal dan percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang berharga (Bhandari dan Yasinoubu, 2009). Seperti juga yang diungkapkan Lang & Hornburg (1998) bahwa modal sosial pada umumnya merujuk pada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of sosial trust*), norma-norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tadjuddin Noer Effendi, "Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini", dalam jurnal Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1, Mei 2013

<sup>10</sup> Rusydi Syahra, "MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI", dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 Tahun 2003

<sup>11</sup> Rusydan Fathy, "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat", dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 6 No. 1, Januari 2019



Secara konseptual, modal sosial memiliki dua dimensi: kognitif (kultural) dan dimensi struktural (Bain dan Hicks dikutip Krishna dan Shradder dalam Syahra, 2003). Dimensi kognitif berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerja sama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Dimensi struktural merupakan susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut Tadjuddin Noer Effendi menambahkan, bahwa, modal sosial secara konsepsional bercirikan adanya kerelaan individu untuk mengutamakan kepentingan bersama. Dorongan kerelaan (keinsyafan dan kesadaran) yang dapat menumbuhkan energi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai-nilai modal sosial.<sup>12</sup>

Bertolak dari konsepsi gotong royong sebagai modal sosial, pada prinsipnya, praktik kolektif hidup semacam ini, hanya mungkin tumbuh dalam sebuah masyarakat yang pada dirinya, hidup rasa percaya antar satu anggota dengan anggota lainnya. Kepercayaan antar warga inilah yang menjadi inti dari modal sosial. Tidak mungkin sebuah komunitas masyarakat, dapat bersolidaritas jika tidak didorong oleh rasa kebersamaan dan kepercayaan di antara mereka. Dan, rasa percaya tersebut, lebih-lebih dalam situasi yang amat sulit seperti di masa Pandemi COVID-19, bukan sesuatu yang secara struktural diinjeksi dari atas, namun sesuatu yang tumbuh dan bergerak secara horizontal di tengah masyarakat.

Fenomena solidaritas warga, sebagaimana yang terwujud dalam berbagai praktik gotong royong seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu sangat menarik jika kita lihat dalam konteks Indonesia hari-hari ini. Di tengah masifnya praktik pembelahan masyarakat, yang seringkali dipicu oleh soal-soal menyangkut pilihan politik dalam berbagai momen kontestasi elektoral, ditambah pula derasnya ancaman politik *post truth* di media sosial, berbagai bentuk solidaritas seolah menjadi oase di tengah gurun pasir kebangsaan kita. Dia menjadi penawar, sekaligus penyejuk alpanya kehangatan hidup berwarga.

Dalam situasi di mana rasa curiga kian tumbuh menjadi tradisi yang semakin melembaga, bentuk-bentuk solidaritas warga, datang seperti mata air

---

<sup>12</sup> Tadjuddin Noer Effendi, "Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini", dalam jurnal Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1 , Mei 2013; Rusydi Syahra, "MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI", dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 Tahun 2003

yang muncul di tengah kemarau panjang. Sesuatu yang kita harapkan dapat membawa kembali pada sebuah kehidupan yang hangat oleh rasa kebersamaan. Situasi di mana orang tidak saling menilai dari atribut yang dikenakan, namun, dari laku hidup yang dipraktikkan.

Optimisme semacam ini tentu bukan sesuatu yang mengawang-awang. Solidaritas dan gotong royong, penulis yakini adalah bagian dari jiwa kebangsaan yang akan terus hidup sesuai dengan jiwa zaman (*zeitgeist*). Nilai, kepercayaan, dan praktik hidup yang berakar pada prinsip gotong royong mungkin akan memilih medium yang beragama pada setiap zaman, namun, dia tetaplah sesuatu yang terus terwariskan dalam jiwa kebangsaan kita sebagai Indonesia.

## PERAN BERSAMA

Secara tanggung jawab, perang terhadap Pandemi COVID-19 tetap berada di pundak negara sepenuhnya. Segala bentuk inisiatif lokal yang datang dari warga, pada prinsipnya tidak boleh mengabaikan tanggung jawab pemerintah sebagai otoritas utama. Karenanya, dalam konteks pembangunan sebuah sistem sosial yang kolaboratif, peran pemerintah tetap sangat dibutuhkan guna memaksimalkan dampak dari berbagai inisiatif yang tumbuh dalam masyarakat.

Pemerintah, dengan segala kapasitas, sumber daya, kewenangan, dan jangkauan yang dimiliki, tetap menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi. Adapun berbagai inisiatif-inisiatif lokal yang tumbuh dari masyarakat, sejatinya adalah *support system* yang bertugas dalam membantu pemerintah dalam menunaikan tugasnya tersebut.

Oleh karenanya, mengutip salah satu dokumen *policy brief* yang dihasilkan FISIPOL UGM, "Penguatan Solidaritas Sosial di Tengah Krisis Covid-19", pemerintah bisa mengelola solidaritas sosial dengan cara berikut: 1) Memastikan kelompok paling rentan di masyarakat akibat krisis COVID-19 diutamakan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan institusi-institusi lain di masyarakat; 2) Memfasilitasi pertukaran informasi di masyarakat tentang kelompok-kelompok sosial dan komunitas-komunitas yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, maupun penyebaran kisah-kisah positif seperti kesembuhan dan aksi-aksi solidaritas sosial yang berhasil; 3) Mengelola koordinasi antar struktur masyarakat tingkat desa untuk mengundang partisipasi warga dalam upaya menggalakkan kepedulian dan rasa kemanusiaan; 4) Menggunakan teknologi untuk memetakan potensi solidaritas sosial oleh warga masyarakat lokal dalam membantu penanganan

krisis COVID-19; 5) Melakukan intervensi ekonomi untuk mengatasi dampak jangka panjang krisis, jika terjadi gelombang kedua pandemi, dan mempercepat pemulihan ekonomi (melalui BLT, keringanan cicilan kredit, menjamin upah buruh dibayar penuh, dan mendukung tumbuhnya sektor ekonomi baru terkait COVID-19).<sup>13</sup>

Khusus yang terkait dengan penggunaan teknologi untuk memetakan potensi solidaritas sosial, dalam konteks manajemen krisis kebencanaan, selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah tidak kalah strategis. Pemerintah daerah adalah institusi paling dekat yang diasumsikan paling mengetahui dan menguasai peta masalah di daerahnya. Sehingga, secara teknis, dalam konteks kerja-kerja kolaborasi, pemerintah daerah diasumsikan dapat menjadi penyedia data yang *real time* kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai komunitas-komunitas warga guna menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan, dll.

Hal ini misalnya, secara sistem, kerja kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas warga, dapat diwujudkan dalam bentuk sistem data yang terintegrasi. Pemerintah daerah bertugas menyediakan sebuah kanal yang mengintegrasikan seluruh data yang terkait dengan kebutuhan warga yang terdampak pandemi, meliputi: status wilayah (kecamatan, kelurahan, desa), potensi kerentanan, bantuan yang dibutuhkan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, dll.

Berbekal data realtime yang dimiliki pemerintah daerah tersebut, komunitas-komunitas warga yang memiliki kemampuan untuk membantu, dapat mengetahui kondisi terkini melalui titik prioritas yang terdapat dalam kanal data tersebut. Sehingga, segala bentuk bantuan dan inisiatif lokal yang datang dari warga, harus tetap teringerasi agar distribusi dan kebermanfaatannya dapat tersalurkan lebih merata.

\*\*\*

Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi tumbuhnya solidaritas warga. Praktik hidup gotong royong yang selama ini diperkirakan telah hilang, nyatanya masih tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Namun, upaya penanggulangan Pandemi COVID-19 secara struktural tetap menjadi tanggung jawab utama negara. Dalam sebuah sistem sosial yang semakin kolaboratif, relasi antara masyarakat dan negara harus terus tumbuh saling memperkuat.

---

<sup>13</sup> Lihat <https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2020/04/Policy-Brief-Penguatan-Solidaritas-Sosial-di-Tengah-Krisis-COVID-19.pdf>

Transformasi solidaritas sosial yang bersifat organik dari masyarakat yang selama ini tumbuh harus dirawat agar menjadi lebih terlembaga dan bertahan lama mengingat entah sampai kapan kita menghadapi COVID-19 sebagai sebuah krisis.

# LANGKAH MITIGASI TERHADAP DAMPAK EKONOMI ATAS PENYEBARAN VIRUS CORONA

Songga Aurora Abadi<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2019, dunia masih hangat memperbincangkan analisis di sana-sini seputar faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian global. Tentu tidak ada yang menyangka, bahwa akan terjadi disrupsi sedemikian rupa yang signifikan akibat dari kemunculan wabah virus varian baru dari corona virus, yaitu COVID 19. Dunia terguncang oleh wabah yang terhitung masif sepanjang 3 bulan terakhir ini. Tentu hal tersebut berbeda dengan perkiraan adanya perubahan cuaca ataupun iklim yang masih dapat ditaksir, masih dapat diperkirakan. Namun tidak dengan virus ini, epidemi COVID-19 masih menyisakan misteri, masih banyak yang belum dapat dipahami terhadap varian baru keluarga virus Corona tersebut.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengategorikan virus corona baru tersebut atau *Corona virus disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi. Alasannya, karena virus tersebut telah meluas hingga ke berbagai belahan dunia. Penetapan COVID-19 sebagai pandemi global dilakukan setelah terdapat lebih dari 118 ribu kasus terinfeksi corona virus, di lebih dari 110 Negara, tidak terkecuali Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemunculan epidemi yang terjadi di perekonomian terbesar kedua dunia (Tiongkok) telah memukul telak perekonomian Negara Tiongkok, dan tentu memunculkan kewaspadaan bagi banyak pihak. Hingga tanggal 27 Maret 2020, terhitung sudah terdeteksi mencapai 529.614 ribu korban di kurang lebih 200 Negara (Worldometer, 2021). Virus Corona atau COVID-19 tidak hanya mengguncang WUHAN, tetap juga dunia. Kita bisa merasakan kepanikan yang melanda juga negeri ini. Kantor berita CNN sampai dengan 27 Maret memberitakan situasi terkini di Indonesia, melaporkan bahwa jumlah korban telah mencapai 1046 Kasus, dengan 87 orang meninggal dunia, 46 orang telah sembuh. Akibat dari ini semua, perekonomian global pun akan terkena dampaknya.

Secara ekonomi, dampaknya mulai terasa. Berbagai analisis telah memprediksikan bahwa kemunculan isu kesehatan global ini akan semakin

---

<sup>1</sup> Dosen tetap di Universitas Primagraha. Email: songgaaurora@gmail.com

mempercepat perlambatan ekonomi global. Dampak paling dekat dan serius adalah menurunnya secara drastis berbagai kegiatan ekonomi yang memerlukan mobilitas orang, contoh kongkret yaitu pariwisata dan penerbangan. Hal ini mengingatkan banyak Negara, termasuk Indonesia yang menerapkan larangan bepergian ke luar, ke negara-negara yang terpapar virus. Kini, hampir seluruh Negara sudah terpapar oleh Virus Corona. Belum lagi sektor ekonomi lainnya pun akan berdampak signifikan, dari mulai produksi hingga distribusi telah menurun. Seperti edaran yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa tekanan ekonomi Tiongkok berpotensi memberikan efek limpasan ke Negara-negara mitra, termasuk Indonesia melalui beberapa transmisi seperti pariwisata, perdagangan internasional, dan aliran investasi.

Meskipun proyeksi perhitungan masih diliputi ketidakpastian, namun institusi-institusi memperkirakan bahwa dampak kepada ekonomi Indonesia tidak sebesar negara-negara lain. Namun tidak dapat dipungkiri, wabah virus COVID-19 ini telah berlangsung masif sepanjang Bulan Maret 2020 ini. Akibatnya, pemerintah telah menganjurkan kepada setiap kepala daerah menjalankan 5 (lima) protokol penanganan COVID-19 sebagai panduan menangani dan mengantisipasi virus corona di Indonesia, yaitu protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area pendidikan, serta protokol area publik dan transportasi. Sehingga hal ini berdampak pada aktifitas sehari-hari Masyarakat Indonesia dibatasi, sehingga para pekerja sudah banyak diterapkan di berbagai daerah anjuran WFH (*Work From Home*), baik itu pekerja kantoran maupun ASN, begitu pun pada institusi pendidikan, dari mulai tingkatan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi telah menjalankan perkuliahan Daring (Data Jaringan). Perihal bekerja di rumah, di tengah wabah corona ini dapat kita kaitkan berdasarkan ketentuan pada pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, di mana setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. DKI Jakarta misalnya, telah memberikan instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19). Instruksi tersebut mengarahkan agar kepada setiap pimpinan perusahaan diharapkan dapat melakukan langkah pencegahan terkait risiko penularan virus Corona. Langkah pencegahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya;
2. Perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, waktu, dan fasilitas operasional)
3. Perusahaan yang tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, mengingat kepentingan langsung yg berhubungan dengan kegiatan pelayanan kesehatan, kebutuhan pokok, dan bahan bakar minyak (BBM)

Hal ini adalah tindaklanjut dari ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia telah menetapkan pada poin kedua bahwa status keadaan tertentu darurat terkait wabah corona diperpanjang selama 91 hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Sedangkan ketentuan WFH bagi ASN dirumuskan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Edaran ini adalah respons dari pernyataan Presiden Jokowi yang telah menetapkan Virus Corona sebagai Bencana Nasional, serta memberi arahan terkait penyesuaian sistem kerja ASN. Edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman ASN untuk bekerja di rumah (WFH) dalam melakukan tugas kedinasan. Termasuk juga di instansi pendidikan, masing-masing institusi telah mengeluarkan surat edarannya untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar melalui daring.

## **PEMBAHASAN**

Situasi yang semakin tidak menentu akibat dari masifnya virus corona yang terjadi di Negeri ini telah cukup membuat kepanikan dan keresahan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini semakin mengkhawatirkan ditengarai oleh pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang boleh jadi akan memukul sendi-sendi perekonomian Indonesia. Sebab, seperti analisis yang diungkapkan oleh Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, bahwa pertumbuhan ekonomi kita sangat didukung oleh konsumsi. Sejatinya, kita tak pernah atau kapan wabah ini akan terjadi menimpa negeri ini. Namun setidaknya, ada beberapa skenario kemungkinan yang harus diupayakan oleh pemerintah

dalam hal upaya mitigasi mengantisipasi dampak ekonomi Negara Indonesia. Indonesia masih tergantung pada ekspor bahan mentah (seperti batu bara, sawit, dll.), jika situasi global masih demikian parah, dapat dipastikan harga ekspor akan menurun, imbasnya akan berdampak juga pada harga komoditas di kemudian hari. Hal ini pun akan menjadikan daya beli semakin menurun, ketika daya beli mulai menurun, maka para pengusaha tidak akan mendapat keuntungan dari hasil investasi tersebut. Praktis, hal ini akan secara berturut-turut mengancam mata rantai sektor lainnya, yang lebih parah: konsumsi rumah tangga & investasi. Tidak luput pada sektor perbankan, akibat dari wabah virus ini yang mengharuskan para pekerja, pelajar, pegawai ASN untuk bekerja di rumah akan mengancam pendapatan pelaku usaha kecil, seperti UMKM, begitu pun dengan pekerja ojek *online*, sopir taksi, bus, angkot, dan pekerja harian lainnya akan berpotensi terjadinya pembiayaan kredit yang macet. Risiko kredit macet akan terus meningkat jika wabah virus ini berlanjut dan tidak segera ditangani. Perlu ada upaya mitigasi yang baik, untuk menghindari dampak yang cukup serius.

Dalam kasus penyebaran virus corona, maka ia menyeruak bukan hanya menjadi isu kesehatan saja, akan tetapi menjadi isu multidimensi yang bersinggungan dengan konteks sosial masyarakat. Telah banyak kegiatan yang terhenti akibat dampak penyebaran virus ini, salah satu yang cukup terasa ialah kantor dan sekolah. Walaupun terdapat upaya mengatasinya dengan aktivitas jarak jauh, tentu hal ini masih menuai serba keterbatasan, sebab masih banyak pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan langsung, seperti industri manufaktur, tekstil, produksi, pangan, kesehatan, perusahaan transportasi, dan sebagainya. Keputusan Pemerintah Pusat melalui Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang telah meniadakan ujian kelulusan Nasional (UN) dianggap dapat mengantisipasi penyebaran semakin masif, hingga kini segala upaya terus ditempuh. Jika situasi ini terus berlanjut, bisa dipastikan situasi perekonomian kian merosot. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam rangka meminimalisir dampak yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Upaya yang perlu dilakukan adalah, Pertama mendorong sisi konsumsi rumah tangga. Kebijakan harus bertumpu dan terfokus pada peningkatan ekonomi domestik. Agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil, demi mencegah terjadinya krisis, upaya untuk memberikan stimulus dalam aspek fiskal perlu diperhatikan, perlu prioritas. Dalam rentang waktu yang pendek, upaya pembelanjaan pemerintah harus mampu semaksimalnya mendorong daya beli konsumsi rumah tangga. Mempercepat realisasi belanja



kementerian ataupun Lembaga, terutama peruntukkan belanja bantuan sosial, kurangi segala macam belanja operasional lain yang tidak perlu seperti kunjungan luar negeri, dinas luar, perawatan fasilitas dan sebagainya, alihkan untuk keperluan belanja bantuan sosial. Mengingat masyarakat menengah ke bawah memiliki kecenderungan konsumsi tinggi, maka perlu diupayakan untuk memberikan bantuan tunai maupun non tunai kepada masyarakat menengah ke bawah, diperuntukkan bagi masyarakat yang tengah terdampak ekonomi akibat virus corona baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurunkan suku bunga pun bisa menjadi solusi agar tidak terjadi macet pembiayaan, adapun program Presiden Jokowi yang telah mencanangkan kartu prakerja merupakan bagian dari ikhtiar memberi kestabilan perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya para pekerja yang kehilangan pendapatannya oleh karena penyebaran virus ini. Hal ini tentu akan tetap memberikan daya beli kepada masyarakat.

Kedua, upaya mitigasi selanjutnya adalah pada sektor pariwisata dan transportasi, pemerintah harus bertindak cepat untuk memberikan subsidi berupa potongan harga, atau insentif kepada jasa transportasi udara, darat dan laut. Di sektor pariwisata, pemerintah juga harus memberikan stimulus pada setiap destinasi wisata, perhotelan, dan sebagainya dalam jangka waktu dekat agar tetap bisa bertahan dan menghindari defisit pendapatan.

Ketiga, jika kondisi semakin tidak terkendali, sektor keuangan menjadi sentral, yaitu memberi restrukturisasi kredit pembiayaan terhadap para pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha UMKM. Keempat, Gagasan untuk menjalankan pemotongan gaji ditambah tunjangan Pejabat pemerintah dapat menjadi alternatif, sebagai upaya untuk mengalokasikan pada kebutuhan masyarakat langsung, pemotongan gaji dan tunjangan 50% akan begitu terasa bagi seluruh lapisan masyarakat, terdapat total gaji seluruh pejabat pemerintah dan BUMN yaitu 5,3 T/tahun. Mengingat, gaji pokok Menteri senilai 5,4 juta/bulan dengan tunjangan 13,6 juta/bulan, dan memiliki dana taktis senilai 100-150 juta/tahun. Total kementerian berjumlah 34 Kementerian, maka per tahun mendapatkan 12,7 M. Kemudian untuk gaji pokok dan tunjangan Wakil Menteri senilai 11,5 juta/bulan, tunjangan perumahan 15juta/ bulan, jumlah wakil menteri yaitu 12 orang, maka dalam setahun mencapai 3,8 M. Selanjutnya ialah Staf Khusus Milenial, gaji pokok 51 Juta/bulan, dengan total staf khusus berjumlah 7 orang, maka keseluruhan 4,28 M/Tahun. Kemudian Kantor Staf Presiden, Staf Khusus Presiden, dengan gaji 51 juta/bulan, total KSP 80 orang, maka total 48,9 M/ tahun. Selanjutnya ialah gaji anggota DPR, 4,2 Juta/bulan, tunjangan kehormatan 5,58/bulan, tunjangan

komunikasi 15,5 juta/bulan, tunjangan fungsi peningkatan pengawasan dan anggaran 3,7 juta/bulan, bantuan langganan listrik dan telepon 7,7 juta/bulan, dana reses 1,2 M/tahun, tunjangan pemeliharaan rumah dan uang dinas 50,9 juta/ bulan, total jumlah anggota DPR 575 orang, maka keseluruhan mencapai 1,04 T/ tahun. Ditambah dengan pendapatan Komisaris dan Dewan Direksi BUMN, jika dipotong 50% maka 2,65 T dapat dimaksimalkan setara dengan 88 juta box masker, atau 147 juta *handsanitizer* gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, juga bisa diperuntukkan membeli keperluan APD lainnya yang masih minim persebarannya di seluruh nusantara.

Situasi memang sedang tidak menentu, rakyat tengah dalam kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan atas wabah yang mencekam ini. Namun, Bangsa ini bukanlah bangsa yang lemah, Bangsa kita telah teruji beberapa dekade lamanya. Walau situasi belum membaik, namun selalu ada secercah harapan, selalu tersimpan keyakinan. Dunia akan segera membaik, Indonesia akan dapat lekas pulih kembali. Akhir kata, semoga perlambatan yang terjadi ini dapat termitigasi dengan baik dan optimisme pembangunan tetap terjaga.

### Daftar Pustaka:

1. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020.
2. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020.
3. Kementerian Keuangan, Pemerintah ambil langkah mitigasi dampak ekonomi dari penyebaran virus corona, Siaran Pers SP- 9/KLI/2020
4. Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia, Dampak Ketidakpastian Global Terhadap Perekonomian Indonesia, 2020.
5. Muchamad Khatib Basri, Perekonomian dan virus corona, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Harian Kompas: 2020.
6. Mel, Update corona 27 Maret: 1046 Kasus, 87 meninggal, 46 Sembuh, CNN Indonesia: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200327125649-20-487460/update-corona-27-maret-1046-kasus-87-meninggal-46-semboh>, Diakses pada tanggal 27 Maret 2020.
7. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, LN Nomor 39, Tahun 2003, TLN Nomor 4279.

8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
9. Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19)

# TRANSISI PEMERINTAHAN DAERAH, GAYA KEPEMIMPINAN DAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMATERA BARAT

Asrinaldi<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada penyelenggaraan layanan publik di banyak negara. Awalnya layanan terhadap kesehatan yang kewalahan menangani pasien Covid-19 ini. Banyak rumah sakit tidak mampu menangani pasien yang bergejala sedang dan berat sehingga akhirnya meninggal dunia. Dari data Worldometer hingga tanggal 27 Oktober 2021 terdapat korban meninggal di seluruh dunia yang mencapai 4.978.828 orang dengan kasus mencapai 245.287.597 kasus.<sup>2</sup> Sementara di Indonesia korban kematian mencapai 143.270 orang dengan kasus yang ditemukan mencapai 4,241.090 kasus.<sup>3</sup> Indikator tingginya angka kematian dan angka infeksi yang tinggi adalah bukti bagaimana negara-negara di dunia kewalahan menangani virus SARS-CoV-2. Selain bidang kesehatan, pandemi ini juga membuat banyak pemerintahan di dunia tidak mampu memaksimalkan pelayanannya di bidang lain seperti ekonomi, sosial dan bahkan ketahanan keluarga. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar kondisi layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Walaupun begitu masyarakat terlanjur kecewa kepada pemerintah karena kebijakan penanganan Covid-19 yang dianggap lambat, tidak responsif dan bahkan kebijakan pemerintah yang kerap dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kritik kepada pemerintah datang silih berganti sebagai wujud kekecewaan masyarakat yang dianggap tidak mampu menangani pandemi Covid-19 ini. Beberapa kepala pemerintahan meminta maaf kepada rakyatnya karena kegagalannya menangani pandemi ini. Misalnya, pemerintah Jepang, melalui Perdana Menteri Yoshihide Suga mengakui kegagalannya memberikan layanan kesehatan dan perawatan medis yang memadai ketika Jepang dilanda gelombang ketiga penularan virus ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengakui kegagalan pemerintahannya menangani risiko

---

<sup>1</sup> Dosen Program Doktor Studi Kebijakan FISIP Universitas Andalas (Unand). E-mail: asrinaldi@soc.unand.ac.id

<sup>2</sup> Lihat <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (diakses tanggal 27 Oktober 2021)

<sup>3</sup> Lihat juga <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/> (Diakses tanggal 27 Oktober 2021)

penularan virus Corona ini. Begitu, Boris Johnson Perdana Menteri Inggris yang mengakui sulitnya mereka menurunkan angka kematian warganya akibat virus Corona ini.<sup>4</sup> Bagaimana di Indonesia?

Tidak jauh berbeda dengan pemimpin di banyak negara di dunia. Walaupun tidak diucapkan langsung oleh Presiden Jokowi, namun sejumlah kepala daerah dan menteri mengakui kegagalan pemerintah menangani pandemi ini setelah hampir dua tahun mereka bekerja keras menurunkan angka kematian. Misalnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta maaf atas kegagalan mereka mengendalikan Covid-19 dan belum mampu membuat keadaan menjadi lebih baik. Pada saat yang sama Menteri BUMN Erick Tohir juga mengucapkan permohonan maafnya karena ketidaksempurnaan pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia.<sup>5</sup> Kegagalan pemerintah ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor.

Jika diperhatikan persoalan yang dihadapi pemerintah pusat, sebenarnya merefleksikan masalah penanganan Covid-19 di daerah-daerah di Indonesia. Masalah koordinasi, manajemen krisis, ketidakpercayaan publik kepada pemerintah serta kesulitan anggaran menjadi faktor penting yang menyebabkan kegagalan penanganan Covid-19 di Indonesia. Tulisan ini mengelaborasi persoalan penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat, khususnya mendalami bagaimana pemerintah daerah mengendalikan semakin memburuknya kasus Covid-19 pada gelombang ke-2 sejak transisi pemerintahan di Sumatera Barat pasca Pilkada serentak tahun 2020. Tidak sedikit kritikan ditujukan kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah melalui media sosial maupun melalui media online lain yang menganggap lemahnya perhatian gubernur pada penanganan Covid-19.

Bahkan banyak yang membandingkan cara penanganan pandemi yang dilakukan Mahyeldi Ansharullah jauh berbeda dengan Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat yang digantikannya pada Februari 2021. Penanganan Covid-19 pada masa Gubernur Irwan Prayitno diakui berjalan dengan baik dengan didukung oleh kebijakan yang jelas dan alokasi anggaran yang memadai sehingga penanganan Covid-19 berhasil. Keberhasilan ini dibuktikan dengan pengakuan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena menjadi daerah yang berhasil menangani Covid-19 di tahun awal pandemi ini. Bahkan di masa Gubernur

---

<sup>4</sup> Baca <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210127151926-113-599100/para-pemimpin-dunia-yang-minta-maaf-atas-penanganan-pandemi> (Diakses pada 27 Oktober 2021).

<sup>5</sup> Lihat juga <https://kumparan.com/kumparannews/bukan-jokowi-ini-5-pejabat-yang-minta-maaf-terkait-covid-19-1wb2yqA39W2/4> (Diakses pada 27 Oktober 2021).

Irwan Prayitno, Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang pertama menyusun Perda No.6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Indonesia dalam rangka mencegah Covid-19. Ini berbeda jauh dengan Gubernur Mahyeldi di awal pemerintahan yang dijalkannya.

## **POLITIK KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KRISIS**

Jika diperhatikan di banyak negara, sejumlah persoalan umum hampir semua negara mengalami masalah dalam menangani pandemi Covid-19 tersebut. Misalnya, masalah koordinasi yang gagal dilaksanakan oleh pemerintah di Italia. Menurut Ruiu adanya kegagalan koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan di Italia ketika fase pertama Covid-19 ini merebak. Menurutnya komunikasi yang terjalin di antara pemangku kepentingan seperti pemerintah yang memiliki kuasa politik dengan akademisi serta kegagalan media menyampaikan pesan kepada publik menjadi penyebab membuat kepanikan dan kekacauan.<sup>6</sup> Sebagian ilmuwan melihat cara pemerintah mengelola informasi tentang Covid-19 dan mengomunikasikannya kepada masyarakat adalah salah satu aspek penting keberhasilan penanganan Covid-19 di sebuah negara. Apalagi dengan maraknya berita bohong (fake news) sehingga berdampak pada keefektifan strategi pemerintah menanggulangi Covid-19 tersebut.<sup>7</sup>

Selain masalah koordinasi dan pengelolaan komunikasi, pemerintah di banyak negara juga dihadapkan pada situasi yang sulit, terutama dalam manajemen krisis yang harusnya mereka lakukan dengan baik. Misalnya, bagaimana mereka bisa memobilisasi sumber daya publik seperti kerjasama dan dukungan dari masyarakat sipil. Hatley & Jarvis menemukan adanya persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah di banyak negara dari segi ini. Penelitian yang mereka lakukan justru melihat bagaimana pengaruh legitimasi politik dan institusional dalam merespons pandemi Covid-19 di Hongkong. Gabungan kapasitas pemerintah yang diperoleh dari legitimasi politik dan institusional serta dukungan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah Hongkong mengendalikan pandemi Covid-19 di fase awal merebaknya pandemi ini. Mereka memilih untuk tidak melakukan lockdown sebagaimana negara-negara yang ketakutan masuknya virus Corona ini di negara mereka. Satu hal yang menarik dari temuan mereka ini adalah bahwa kapasitas legitimasi politik dan kelembagaan menjadi hal

---

<sup>6</sup> Maria Laura Ruiu (2020), Mismanagement of Covid-19: Lessons Learned from Italy, *Journal of Risk Research*, DOI: 10.1080/13669877.2020.1758755.

<sup>7</sup> Selanjutnya rujuk Kris Hartley & Vu Minh Khuong (2020), Fighting Fake news in the Covid-19 Era: Policy Insights from an Equilibrium Model. *Policy Sciences*, DOI:10.1007/S11077-020-09405-z

penting dalam pengayaan terkait konsep kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Selama ini konsep ini belum mendapat perhatian serius dari banyak ilmuwan. Padahal dalam kondisi krisis, di saat masyarakat terancam keberadannya oleh pandemi ini pemerintah Hongkong bisa membangun kepercayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Begitu juga, tentu di tengah kondisi yang tidak menentu, terutama ketika sebuah daerah dilanda krisis, maka yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat. Pemimpin dalam kondisi itu akan membuat kebijakan yang sesuai dengan realita yang dihadapi. Tentu tidak mudah kebijakan tersebut dibuat karena adanya tekanan waktu, ketersediaan sumber daya, memahami kepentingan aktor yang terlibat dan tuntutan masyarakat. Oleh karenanya yang dibutuhkan dari pemangku kepentingan adalah bagaimana menerapkan politik kebijakan yang berasal dari pemimpin pemerintah yang juga menjadi aktor utama ketika formulasi kebijakan dibuat.<sup>9</sup> Sebagai pemimpin institusi publik yang memiliki fungsi untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan masyarakat, kepala pemerintahan harus memilih alternatif kebijakan yang dapat meminimalkan dampak kepada institusi dan masyarakat.

Politik kebijakan ini dapat dipahami sebagai pilihan strategi untuk membuat keputusan dan alternatif pilihan yang tersedia digunakan untuk pemecahan masalah. Politik kebijakan dalam proses formulasi kebijakan umumnya dilakukan oleh pemerintah sebagai badan publik. Bahkan pada umumnya dengan isu-isu tertentu pemerintah sebagai aktor utama cenderung mendominasi proses pembuatan kebijakan tersebut. Tidak jarang fungsi yang dimiliki pemerintah ini mengendalikan proses pembuatan kebijakan publik sehingga menjadikan sub-sub bagian dari lembaga pemerintah ini sebagai quasi-legislatif.<sup>10</sup> Apalagi di tengah pandemi Covid-19, pemerintah cenderung menjadi pembuat keputusan yang dominan karena tuntutan publik untuk meminta pemerintah menangani dan mencegah penyebaran virus Corona ini dalam masyarakat. Hal ini wajar karena pemerintah memang memiliki sumber daya seperti aparatur di bidang kesehatan, para pembuat kebijakan, dan sumber keuangan yang memadai.

---

<sup>8</sup> Kris Hartley & Darryl S. L. Jarvis, (2020), *Polymaking in a Low-Trust state: Legitimacy, State Capacity, and Responses to COVID-19 in Hong Kong*. Policy and Society, DOI: 10.1080/14494035.2020.1783791.

<sup>9</sup> Hamish McLean & Jacqui Ewart, (2020), *Political Leadership in Disaster and Crisis Communication and Management: International Perspectives and Practices* (Switzerland: Palgrave Macmillan).

<sup>10</sup> Quasi legislatif ini merujuk pada kewenangan dan kemampuan lembaga pemerintah atau lembaga publik lainnya di luar lembaga legislatif dalam membuat undang-undang atau aturan sebagaimana yang dimiliki lembaga legislatif pada umumnya. Selanjutnya baca Michael Kaeding, (2018). *Out of Balance? Practical Experience in European Union with Quasi-Legislative Acts*. The European Parliament in Times of EU Crisis. DOI:10.1007/978-3-319-97391-3\_8

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaannya dalam pembuatan kebijakan tersebut menjadi aspek penting dalam proses formulasi kebijakan. Pemangku kepentingan termasuk masyarakat akan dapat menilai di tahap awal, apakah kebijakan tersebut relevan dengan keinginan mereka, terutama dalam mengatasi kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara pemerintah sebagai aktor yang membuat kebijakan tentu akan mempertimbangkan lingkungan kebijakan sebagai faktor penting baik dalam proses formulasi maupun implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan baik. Misalnya, adanya ide tentang kebijakan yang berkembang dalam masyarakat; bagaimana institusi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses formulasi kebijakan dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar para pembuat kebijakan jelas ikut mempengaruhi konten kebijakan yang dibuat pemerintah.<sup>11</sup>

Di sisi lain, dalam keadaan krisis pemerintah dituntut dapat merespons situasi yang ada melalui politik kebijakan yang dilaksanakannya. Pemerintah menjaga agar tidak muncul kepanikan dalam masyarakat sehingga keadaan tidak semakin memburuk. Walaupun pemerintah, dalam kondisi tertentu juga tidak mengetahui secara pasti apakah kebijakan yang dibuat itu dapat melindungi masyarakat dari ketakutan yang mereka hadapi. Inilah keadaan krisis yang dihadapi sesungguhnya, yaitu ketika pemerintah gagal untuk mengidentifikasi apa yang terjadi dan bagaimana mencegah kondisi terburuk dari situasi yang akan dihadapi. Banyak kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola krisis disebabkan oleh ketidaktahuan mereka bagaimana mengelola krisis yang terjadi. Manajemen krisis yang baik dengan memanfaatkan kapasitas dari kepemimpinan, aparatur negara dan sumber daya yang tersedia akan membantu pemerintah mengendalikan krisis yang ada dalam masyarakat.<sup>12</sup> Akan tetapi, faktanya, seringkali pemerintah memang tidak siap menghadapi krisis yang datang tidak terduga sehingga berdampak pada pengelolaan krisis yang terlihat kacau dan mencemaskan masyarakat. Bahkan kegagalan manajemen krisis pemerintah ini seringkali dihubungkan dengan lemahnya pengetahuan kontekstual dan kemampuan reflektif pemerintah terhadap situasi di

---

<sup>11</sup> Paul Cairney, (2016), *The Politics of Evidence-Based Policy Making* (London: Palgrave Macmillan), hal. 6

<sup>12</sup> Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, (2020), *Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola*. In: *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).



sekitarnya.<sup>13</sup> Kegagalan ini juga berdampak pada keselamatan publik, potensi kerugian negara dari segi keuangan dan turunnya reputasi pemerintah.

Kondisi ini memang sudah dibuktikan ketika awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya virus Corona yang bermutasi menjadi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19. Hampir dua tahun pandemi ini berlangsung, beberapa masalah muncul di banyak negara. Mulai dari kegagalan sistem kesehatan di banyak negara mencegah meluasnya jangkitan virus di banyak negara, ketidakstabilan politik yang memunculkan tuntutan pemerintah yang berkuasa mundur, dan yang paling parah adalah semakin turunnya kapasitas ekonomi negara.<sup>14</sup> Keadaan yang sama juga terjadi di Indonesia, terutama setahun pertama pandemi Covid-19 terjadi. Justru yang dapat dilihat dari keadaan ini adalah kegagapan pemerintah untuk mengordinasikan bagaimana pandemi Covid-19 ini dapat ditangani dengan baik.

Tidak hanya di tingkat nasional, kegagapan pemerintah dalam menangani Covid-19 ini juga terjadi di daerah. Variabel penting dalam tata kelola krisis yang dilakukan pemerintah yang gagal dilaksanakan adalah pada dimensi koordinasi antar pemangku kepentingan yang tidak berjalan dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah memiliki cara pandang yang berbeda memahami situasi pandemi yang ada di sekitar mereka. Sementara aturan perundang-undangan yang bisa mereka jadikan acuan hanya Undang Undang (UU) No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Padahal UU ini baru terbit sehingga turunan aturan hukum untuk pelaksanaannya belum tersedia. Karenanya di awal penanganan Covid-19 ini pemerintah cenderung memberikan instruksi yang membuat pemerintah daerah kebingungan mengendalikan pandemi ini. Misalnya, di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang daerahnya terintegrasi dalam banyak hal sementara pemerintah daerah masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Padahal mobilitas orang, barang dan jasa di daerah ini sangat tinggi yang berpotensi meningkatkan angka penularan virus SARS-CoV-2 karena tidak adanya koordinasi yang baik antar level pemerintahan. Tercatat sejak awal kasus Covid-19 ini daerah Jawa dan Bali, termasuk di dalamnya daerah Jabodetabek adalah daerah penyumbang jumlah kasus yang

---

<sup>13</sup> Lihat Alexander Kouzmin (2008), *Crisis Management in Crisis? Administrative Theory & Praxis*, 30:2, 155-183. <http://dx.doi.org/10.1080/10841806.2008.11029631>

<sup>14</sup> Untuk pemahaman lebih mendalam silakan dibaca Gerald Delanty (2021), *Pandemics, Politics, and Society: Critical Perspectives on the Covid-19 Crisis* (Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH).

signifikan di Indonesia.<sup>15</sup> Pemerintah daerah pun gagal menggunakan politik kebijakannya di awal penanganan Covid-19 ini.

## **KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI SUMATERA BARAT DAN PERMASALAHANNYA**

Kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat teridentifikasi pertama kali pada 26 Maret 2020 yang menimpa lima orang warganya, yaitu dua ada di Kota Bukittinggi, satu orang di Kabupaten Tanah Datar, satu orang di Kota Padang dan satu orang di Kabupaten Pesisir Selatan. Kasus pertama justru terjadi di Bukittinggi yang bermula keikutsertaannya dalam kegiatan Jamaah Tabligh di Malaysia yang selanjutnya menulari istrinya.<sup>16</sup> Kemunculan kasus ini menyebabkan kepanikan dari warga Sumatera Barat karena banyaknya pemberitaan di media online dan media sosial tentang bahaya yang ditimbulkan oleh virus Corona tersebut. Melihat keadaan semakin memburuk ini, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat kebijakan yang relevan agar penanganan pandemi Covid-19 ini dapat dikendalikan.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 yang semakin memburuk, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB di Sumatera Barat ini membatasi beberapa pelayanan kepada masyarakat untuk mencegah penularan seperti kegiatan sekolah dan kegiatan pendidikan lainnya, aktifitas perkantoran di luar bidang kesehatan, kegiatan keagamaan, sosial dan budaya dan kegiatan yang mengundang kerumunan yang menggunakan fasilitas umum. Di awal implementasi Pergub ini terlihat belum efektif karena tidak semua kepala daerah di Sumatera Barat yang menindaklanjuti menjadi aksi nyata karena belum adanya kasus yang terdeteksi di daerah mereka. Koordinasi yang dilaksanakan juga masih sebatas rapat melalui aplikasi zoom meeting sehingga penyebaran Covid-19 ini semakin hari semakin meningkat. Selain itu, dorongan kepada pemerintah daerah melakukan pelacakan (tracing), pengujian (testing), dan perawatan (treatment) terhadap masyarakat di Sumatera Barat juga masih rendah sehingga menjadi bom waktu meledaknya kasus Covid-19. Terbukti empat bulan sejak kejadian pertama kasus Covid-19 di Sumatera Barat ditemukan, proses pelacakan dan pengujian sampel hanya mencapai 0,8% dari 5,5 juta penduduk atau sekitar 45 ribu orang

---

<sup>15</sup> lihat <https://www.republika.co.id/berita/qmkb3x409/jawabali-penyumbang-terbesar-kasus-covid-sejak-awal-pandemi> (Diakses pada 30 Oktober 2021)

<sup>16</sup> Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200426202230-20-497446/kasus-virus-corona-di-sumbar-didominasi-penularan-lokal> (Diakses 30 Oktober 2021).

melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR).<sup>17</sup> Ini sangat mencemaskan masyarakat yang merasa terancam dengan lingkungan sekitarnya yang tidak aman dari penyebaran Covid-19 ini.

Kejadian krisis non alam ini mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha mengelola kembali bagaimana penanganan pandemi Covid-19 ini dengan baik. Berbagai upaya dilakukan seperti melakukan koordinasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, terutama dalam pelaksanaan PSBB. Begitu juga membangun jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat terbawah seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, wali nagari (kepala desa) dan pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) serta wali jorong (di Nagari/Desa). Bagi pemerintah daerah kebijakan melibatkan semua jejaring dalam masyarakat ini menjadi penting mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola bencana non alam akibat virus Corona ini.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno mulai secara bertahap mengelola krisis non alam ini secara terstruktur dan sistematis. Menyadari bahwa menangani Covid-19 ini tidak akan dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, maka Gubernur Irwan Prayitno menggandeng semua pemangku kepentingan. Dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan tersebut, maka penanganan Covid-19 ini dapat dilakukan bersama sesuai dengan fungsi institusi dan personal yang terlibat. Misalnya, kesungguhan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang selalu menggunakan kajian ilmiah sebagai dasar pembuatannya (*evidence-based policy making*) dalam menangani Covid-19 tersebut. Salah satunya adalah dengan melibatkan Universitas Andalas sebagai institusi yang menyediakan data-data yang dibutuhkan sebelum kebijakan tersebut dibuat. Kajian yang dilakukan tidak hanya dalam bidang kesehatan, tapi juga sosial dan budaya yang erat kaitannya dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.<sup>18</sup> Ini adalah wajar karena sampai saat ini protokol kesehatan inilah yang menjadi strategi efektif untuk mencegah meningkatnya penularan Covid-19 ini dalam masyarakat.

Bahkan di masa Gubernur Irwan Prayitno, Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang pertama berhasil menyusun Peraturan Daerah (Perda) provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

---

<sup>17</sup> lihat <https://www.beritasatu.com/nasional/653109/bom-waktu-covid19-di-sumatera-barat> (diakses pada 30 Oktober 2021).

<sup>18</sup> Selanjutnya dapat dibaca <https://langgam.id/fisip-unand-realokasi-anggaran-covid-19-harus-jamin-kebutuhan-dasar-penduduk-sumbar/> (Diakses pada 3 November 2021).

guna menangani Covid-19. Melalui Perda ini pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah kasus baru di banyak daerah. Langkah ini sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengoordinasikan kebijakan penanganan Covid-19 dengan seluruh kabupaten/kota. Bahkan beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat juga meniru langkah yang dibuat pemerintah provinsi dengan membuat Perda adaptasi kebiasaan baru di daerah masing-masing.

Sementara itu, di tingkat pemerintahan terendah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang kental di nagari, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berusaha melibatkan Tungku Tigo Sajarangan, yaitu alim ulama, cerdik pandai dan ninik mamak yang menjadi panutan di Nagari menangani Covid-19 ini. Keterlibatan Tungku Tigo Sajarangan tersebut cukup efektif membangun kesadaran masyarakat yang selama ini tidak mematuhi protokol kesehatan ketiga berinteraksi.<sup>19</sup> Apalagi dalam persepsi masyarakat Sumatera Barat bahwa keberadaan virus SARS-CoV-2 ini tidak lain adalah konspirasi negara-negara maju. Persepsi tersebut memang menjadi temuan penting survei yang dilakukan oleh Spektrum Politika Institut pada September 2020 di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari survei tersebut ditemukan sebanyak 39,9% masyarakat Sumatera Barat meyakini bahwa Covid-19 ini adalah konspirasi sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka dalam mengikuti protokol kesehatan.<sup>20</sup>

Selain melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19, Gubernur Irwan Prayitno juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah mengelola krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Kapasitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terus ditingkatkan kemampuannya dari waktu ke waktu dengan berbagai cara. Metode lesson learned menjadi andalan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya dari segi kewenangan untuk mengendalikan keadaan krisis ini menjadi lebih baik, tapi juga dukungan finansial untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat. Pengendalian Covid-19 ini ada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, juga melibatkan Dinas Kesehatan yang mendapat penugasan khusus agar penanganan Covid-19 ini dapat dikendalikan. Untuk mendukung penanganan Covid-19 ini,

---

<sup>19</sup> Lihat <https://langgam.id/doni-monardo-tungku-tigo-sajarangan-ujung-tombak-lawan-covid-19-di-sumbar/> (Diakses pada 3 November 2020).

<sup>20</sup> Silakan dibaca <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005090348-20-554336/survei-39-persen-warga-sumbar-sebut-corona-konspirasi-global> (Diakses pada 30 Oktober 2021).

pemerintah daerah juga melibatkan ilmuwan dari berbagai latar belakang ilmu sebagai konsultan untuk mengendalikan pandemi ini. Sementara, untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan refocussing anggaran APBD tahun 2020 sebesar Rp541,2 miliar agar implementasi kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan.<sup>21</sup>

Strategi Gubernur Irwan Prayitno melepaskan dari jebakan kapasitas dalam menangani krisis yang kerap dituduhkan publik ke pemerintah daerah sudah dilakukan dengan baik. Munculnya jebakan kapasitas pemerintah dalam menangani bencana menjadi faktor utama kegagalan pemerintah di negara-negara berkembang. Jebakan kapasitas pemerintah tidak hanya pada kesiapan lembaga pemerintah menghadapi risiko bencana, tapi juga bagaimana memitigasi dampak bencana. Realita ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Tiwari tentang pentingnya institusi pemerintah menghadapi risiko bencana yang datang kepadanya tanpa harus mengharapkan bantuan kepada institusi lain seperti sumber daya manusia, finansial, teknologi dan pengembangan kapasitas mereka sendiri.<sup>22</sup>

Kebijakan yang diambil Gubernur Irwan Prayitno ini membuahkan hasil yang mengagumkan karena rata-rata angka tingkat positif Provinsi Sumatera Barat pada 6 bulan pertama sejak kasus pertama ditemukan hanya 1,8%. Angka ini jauh di bawah rata-rata angka yang ditetapkan WHO sebesar 5% untuk menyatakan suatu negara berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Usaha yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini mendapat apresiasi Presiden Joko Widodo bersama empat provinsi lainnya, yaitu Yogyakarta, Bangka Belitung, Aceh, dan Gorontalo.<sup>23</sup>

Memang pasca perayaan Natal dan Tahun Baru terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Misalnya, pertambahan kasus harian di Indonesia naik menjadi 11.278 kasus dengan kenaikan yang signifikan dari kasus sebelum liburan natal dan tahun baru yang hanya di angka 6.000 kasus per hari.<sup>24</sup> Begitu juga kunjungan wisata di Sumatera Barat yang terus meningkat pada liburan Natal dan tahun Baru menambah kekhawatiran pemerintah daerah di Sumatera Barat sehingga pada tanggal 18 Desember 2020, Gubernur Irwan Prayitno menerbitkan Surat Edaran

---

<sup>21</sup> <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1270> "Alokasi APBD Penanganan Pandemi Covid-19 di Sumbang Besar Rp541,2 miliar, DPRD Pertanyakan Keefektifan Penyaluran." (Diakses 3 November 2021).

<sup>22</sup> Lihat Asmita Tiwari, (2015), *The Capacity Crisis in Disaster Risk Management: Why Disaster Management Capacity Remains Low in Developing Countries and What Can Be Done* (Switzerland: Springer).

<sup>23</sup> Silakan dilayari <https://sumbar.antaranews.com/berita/373618/mempelajari-keberhasilan-pengendalian-covid-19-di-sumatera-barat> (Diakses pada 3 November 2021).

<sup>24</sup> Lihat <https://kabar24.bisnis.com/read/20210113/15/1342583/dua-pekan-pasca-nataru-kenaikan-kasus-covid-19-mengganas> (Diakses pada 3 November 2021).

No.05/ED/GSB/2020 tentang pengendalian kegiatan masyarakat untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pada libur hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Konsekuensi dari SE ini adalah pada penutupan semua objek wisata yang berpotensi dikunjungi dan menimbulkan kerumunan mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021.<sup>25</sup> Kebijakan ini adalah politik kebijakan pemerintah daerah yang bersifat antisipatif agar dapat mengendalikan Covid-19 ini. Pemerintah daerah provinsi menjadikan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota mengantisipasi semakin memburuknya Covid-19 di Sumatera Barat di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini sekaligus menggambarkan bagaimana Gubernur Irwan Prayitno melakukan koordinasi dan komunikasi di masa krisis bencana non alam. Apalagi banyak ilmuwan menemukan lemahnya kapasitas pemerintah dalam berkoordinasi dan berkomunikasi pada masa krisis karena bencana.<sup>26</sup>

Kesadaran pentingnya koordinasi dan komunikasi antar tingkatan pemerintahan ini menjadi perhatian pemerintahan Jokowi. Pengalaman pemerintah yang lemah dalam koordinasi dan komunikasi di awal penanganan Covid-19 justru berdampak pada semakin meningkatnya kasus Covid-19 di pertengahan tahun 2020. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar koordinasi dan komunikasi tetap berjalan dengan semua pemangku kepentingan. Misalnya, jajaran pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi dengan timnya juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi sehingga memungkinkan semua institusi pemerintahan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 secara cepat. Setiap institusi dengan mudah dapat menyampaikan tanggung jawab yang dilaksanakannya sesuai dengan kapasitasnya.<sup>27</sup>

Sayangnya, kebijakan penanganan Covid-19 di Sumatera Barat pada masa Gubernur Irwan Prayitno ini tidak sama dengan kepemimpinan Gubernur berikutnya, yaitu Mahyeldi Ansharullah. Walaupun kedua gubernur Sumatera Barat ini sama-sama berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun gaya kepemimpinan dan kebijakan yang dibuat dalam mengendalikan Covid-19 berbeda. Bahkan sejak Gubernur Mahyeldi Ansharullah dilantik pada 26 Februari 2021 justru angka tingkat positif Sumatera Barat terus meningkat.

---

<sup>25</sup> Baca <https://www.liputan6.com/regional/read/4445557/semua-destinasi-wisata-sumbar-tutup-saat-libur-tahun-baru> (Diakses pada 3 November 2021).

<sup>26</sup> Ismail Soujaa, Julius A. Nukpezah, and Abraham David Benavides, (2021), Coordination Effectiveness During Public Health Emergencies: An Institutional Collective Action Framework. *Administration & Society*. DOI: 10.1177/0095399720985440.

<sup>27</sup> Muslimin Mahmud, Bambang Irawan, Kisman Karinda, Joko Susilo, and Salahuddin, (2021), Analysis of the Intensity of Communication and Coordination of Government Officials on Twitter Social Media during the Covid-19 Handling in Indonesia, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10 (3):319-334.

Di sisi lain, banyak pihak juga menyayangkan kebijakan Gubernur Mahyeldi Ansharullah yang pasca pelantikan sebagai gubernur yang tidak memberi perhatian khusus pada penanganan Covid-19 ini. Bahkan kebijakan yang sudah dibuat pada masa gubernur sebelumnya tidak dapat dijalankan dengan baik. Misalnya, ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 tidak lagi menganggarkan biaya operasional untuk pemeriksaan sampel baru di Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.<sup>28</sup> Akibatnya pemeriksaan sampel Covid-19 terganggu karena ketersediaan dana yang ditalangi sendiri oleh laboratorium tersebut. Walaupun hal ini dibantah oleh Gubernur Mahyeldi, namun faktanya Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi ini sudah membiayai kegiatannya sendiri sejak Januari 2021.<sup>29</sup>

Tidak dianggarkannya biaya pemeriksaan ini menyebabkan masyarakat sipil Sumatera Barat bereaksi karena Gubernur tidak serius menangani pandemi Covid-19. Selain mengancam pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, koalisi masyarakat sipil yang dikenal dengan nama Kawal Covid-19 mengumpulkan sumbangan masyarakat untuk membantu operasional pemeriksaan sampel oleh laboratorium ini.<sup>30</sup> Masalah tidak sampai di situ saja. Ketika masyarakat Sumatera Barat mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menangani Covid-19 yang dianggap kurang serius, justru Gubernur dan Wakil Gubernur menerima kendaraan dinas baru untuk operasional yang harga kedua kendaraan tersebut mencapai Rp2 milyar lebih.<sup>31</sup> Kejadian ini mendapat kecaman publik Sumatera Barat dan bahkan kritikan ditujukan langsung kepada gubernur dan wakil gubernur yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Kritikan juga datang dari DPRD Provinsi Sumatera Barat karena pembelian kendaraan dinas tersebut.<sup>32</sup>

Ketidaksiannya Gubernur Mahyeldi menangani Covid-19 yang ditanyakan masyarakat sebenarnya terkonfirmasi dari penilaian pemerintah pusat yang memberi "rapor merah" kepada Pemerintah Provinsi Sumatera

---

<sup>28</sup> Lihat <https://covesia.com/archipelago/115150/labor-fk-unand-kekurangan-anggaran-hidayat-sebut-anggaran-ada-kemauan-gubernur-yang-belum/> (Diakses pada 4 November 2021).

<sup>29</sup> silakan baca <https://tekno.tempo.co/read/1491451/nol-apbd-untuk-laboratorium-penyakit-infeksi-unand-gubernur-ada-mekanismenya> (Diakses pada 4 November 2021).

<sup>30</sup> Baca juga <https://republika.co.id/berita/daerah/sumatra/qxay73487/donasi-untuk-laboratorium-unand-bentuk-keprihatinan-warga> (Diakses pada 4 November 2021).

<sup>31</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-dan-wagub-sumbar-beli-mobil-dinas-seharga-rp2-miliar-di-tengah-pandemi.html> (Diakses pada 4 November 2021).

<sup>32</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/4633695/gubernur-dan-wagub-sumbar-kompak-beli-mobil-dinas-baru-rp2-miliar-di-tengah-badai-pandemi> (Diakses pada 4 November 2021).

Barat.<sup>33</sup> Penanganan pandemi Covid-19 sejak gubernur dan wakil gubernur ini dilantik dilihat oleh epidemiolog sangat buruk. Walaupun pemerintah provinsi sudah melaksanakan kebijakannya dari hulu ke hilir, namun masalah koordinasi, komunikasi dan eksekusi program penanganan pandemi ini terlihat lebih buruk dibandingkan dengan pendahulunya Gubernur Irwan Prayitno.<sup>34</sup>

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengapa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak optimal mengimplementasi kebijakan dan alokasi anggaran terkait dengan penanganan Covid-19? Bagaimana kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah sebagai gubernur mengendalikan Covid-19 ini? Lalu, bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespons kritik dan kecaman masyarakat sipil yang menganggap Gubernur Mahyeldi Ansharullah tidak peduli yang ditunjukkan dengan meningkatnya kasus harian Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat? Apakah masalah “kegagalan” penanganan Covid-19 ini ada kaitannya dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah atau sesungguhnya adalah masalah kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah dalam menggerakkan sumber daya menangani Covid-19?

### **KEPEMIMPINAN YANG DEKAT DENGAN ULAMA**

Munculnya masalah dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat di masa Gubernur Mahyeldi Ansharullah ini adalah akumulasi dari lemahnya kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah yang terlalu mempertimbangkan kelompok pendukungnya. Akibatnya pembuatan keputusan sering terlambat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekecewaan masyarakat Sumatera Barat yang disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil semakin meningkat karena kurangnya perhatian gubernur Sumatera Barat dengan penanganan Covid-19 yang berbeda dengan gubernur Irwan Prayitno sebelumnya. Menariknya kritik dan kecaman ini lebih banyak disampaikan oleh kelompok politik yang tidak mendukung PKS dalam Pilkada 2020 sehingga menjadi kekuatan oposisi yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apalagi gaya kepemimpinan gubernur Mahyeldi yang lebih dekat dengan kaum ulama Sumatera Barat yang memang “tidak percaya” dengan keberadaan Covid-19 sehingga menyulitkan

---

<sup>33</sup> Silakan baca <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210809155337-20-678312/gubernur-sumbar-tanya-tolok-ukur-nilai-merah-rapor-jokowi> (Diakses pada 4 November 2021).

<sup>34</sup> <https://langgam.id/100-hari-mahyeldi-audy-epidemiologi-beri-rapor-merah-soal-penanganan-covid-19/> (Diakses pada 4 November 2021).



pemerintah daerah mengambil kebijakan agar tidak bertentangan dengan apa yang menjadi pendapat ulama.<sup>35</sup>

Memang dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat tidak lepas dari keberadaan para ulama yang selalu mengawasi kebijakan politik dan pemerintahan, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga nasional. Berbagai kebijakan pemerintah di tingkat lokal dan nasional, jika tidak sesuai dengan pendapat dan pemikiran para ulama akan dikritik dan bahkan ditolak. Misalnya, penolakan MUI Sumatera Barat yang menolak kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat meniadakan ibadah sholat Idul Ad'ha dan ibadah harian lainnya di masjid untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.<sup>36</sup> Bahkan MUI Sumatera Barat juga mengkritik kebijakan pemerintah yang "memaksa" masyarakat harus vaksin.<sup>37</sup> Sikap yang ditunjukkan MUI ini terkait dengan ketidakpercayaan mereka pada pandemi Covid-19.

Sikap kritis ulama ini turut menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah di Sumatera Barat termasuk Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam membuat kebijakannya. Dengan latar belakang Mahyeldi Ansharullah sebagai ulama yang juga dipanggil "buya" bagi sebagian masyarakat Sumatera Barat, tentu pendapat ulama menjadi salah satu bagian dari kebijakan yang dibuatnya. Apalagi dengan masih adanya ulama di Sumatera Barat yang tidak meyakini keberadaan Covid-19 ini sehingga menjadi kendala bagi pemerintah daerah di Sumatera Barat. Pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentu mempertimbangkan banyak pemangku kepentingan sebagai aktor yang terlibat. Bagaimanapun ulama di Sumatera Barat menjadi salah satu aktor yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan bagaimana menangani Covid-19.

## **AKTOR INFORMAL SEBAGAI BAGIAN KELOMPOK GUBERNUR**

Keberhasilan formulasi kebijakan bergantung kepada aktor-aktor yang terlibat. Aktor-aktor tersebut bisa berupa aktor formal, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan aktor informal yang berada di luar institusi pemerintah yang membuat kebijakan. Dalam proses

---

<sup>35</sup> Lihat <https://mimbarsumbar.id/banyak-ulama-dan-ormas-islam-percaya-hoaks-covid-19-rekayasa/> (4 November 2021).

<sup>36</sup> Baca <https://news.detik.com/berita/d-5634466/mui-sumbar-tolak-peniadaan-ibadah-di-masjid-selama-ppkm> (Diakses pada 4 November 2021).

<sup>37</sup> Lihat juga <https://republika.co.id/berita//qmvq320/ketua-mui-sumbar-minta-pemerintah-tak-paksakan-vaksinasi%2%A0> (Diakses pada 4 November 2021).

pembuatan kebijakan publik di pemerintahan daerah di masa kepemimpinan gubernur Mahyeldi Ansharullah, memang agak unik dibandingkan dengan Gubernur Irwan Prayitno. Sebagai ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Sumatera Barat, pola kerja Gubernur Mahyeldi memang melibatkan banyak pihak baik dari internal PKS maupun simpatisan di luar PKS. Masukan dari banyak pihak menjadi pertimbangan dan berimplikasi pada kebijakan pemerintah. Misalnya, di awal kepemimpinan Mahyeldi sebagai gubernur melibatkan banyak individu sebagai tim yang ikut menyukses kebijakan dan program yang dibuatnya. Tim ini dikenal dengan Tim Percepatan Pembangunan Sumbar Madani (TPSM) yang berisikan profesional, akademisi, aparatur pemerintah, dan praktisi kegiatan masyarakat.<sup>38</sup>

Walaupun di awalnya TPSM ini membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat, namun dalam perjalanannya mereka tetap dipertahankan. Memang setelah RPJMD Sumatera Barat periode 2021-2026 selesai dan mereka dibubarkan dalam waktu 3 bulan, namun keberadaan TPSM ini secara informal tetap ada disekeliling Gubernur Mahyeldi. Bahkan pengaruh personal dari TPSM kepada pembuatan kebijakan publik sangat terasa pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan. Bahkan terlihat TPSM ini memang memiliki tempat di istana Gubernur Mahyeldi untuk bekerja.<sup>39</sup> Keberadaan kelompok pendukung gubernur seperti ini tidak pernah ada di masa Gubernur Irwan Prayitno. Memang ini sangat paradoks. Di satu sisi institusi informal yang memunculkan aktor kebijakan seperti ini memang sangat membantu sepanjang muncul dari masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.<sup>40</sup> Namun, di sisi lain, ketika keberadaan institusi informal ini hanya untuk kepentingan kelompok tertentu dalam mempengaruhi kebijakan, jelas akan berdampak pada kinerja pemerintahan.

Iniilah yang terjadi dalam penanganan Covid-19, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Mahyeldi juga mempertimbangkan masukan dari institusi seperti TPSM ini yang dianggap memiliki keahlian di bidang kesehatan. Keberadaan TPSM dalam pembuatan kebijakan publik di Sumatera Barat memang berada pada posisi informal yang telah ikut menentukan

---

<sup>38</sup> Silakan baca <https://terbetik.com/2021/03/13/gubernur-bentuk-tim-18-untuk-percepatan-pembangunan-sumbar/> (Diakses pada 4 November 2021)

<sup>39</sup> Lihat <https://padangkita.com/gubernur-mahyeldi-dan-pks-harus-memimpin-aksi-bersih-bersih-orang-kepercayaan/> (Diakses pada 4 November 2021)

<sup>40</sup> Gretchen Helmke and David Levitsky, (2004), *Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. Perspectives on Politics*, 2(4): 725-740.

seperti apa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk dalam mengoordinasikan unit-unit pemerintahan yang ada guna menyelesaikan RPJMD.

### **KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN**

Masalah lain yang menyebabkan kebijakan penanganan Covid-19 di masa kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah bermasalah adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi di antara lembaga pemerintahan daerah. Apalagi lembaga pemerintahan daerah ini memiliki tanggung jawab langsung untuk melaksanakan urusan dan wewenang sesuai dengan UU No.23 tahun 2014. Namun, dalam pelaksanaannya, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Mencuatnya kasus surat rekomendasi permintaan sumbangan gubernur untuk membuat buku profil potensi Sumatera Barat adalah salah satu buktinya. Surat tersebut sebelumnya pernah juga diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal-PTSP. Namun dalam pelaksanaan selanjutnya justru dilakukan oleh Bappeda Sumatera Barat yang juga mengeluarkan surat permintaan sumbangan tersebut. Surat permintaan kontribusi dan sumbangan ini menghebohkan publik Sumatera Barat karena gubernur dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya. Karena surat tersebut diedarkan oleh sekelompok orang dari pihak swasta untuk menawarkan kerjasama kepada perusahaan, institusi pemerintah dan sejenisnya. Bahkan pihak swasta yang mengedarkan tersebut juga diperiksa oleh pihak kepolisian karena dicurigai menedarkan surat palsu. Namun pemerintah daerah mengakui surat yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat tersebut adalah asli. Mencuatnya kasus ini mendorong DPRD Sumatera Barat mengajukan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap surat gubernur bernomor 005/3984/V/Bappeda-2021 tertanggal 12 Mei 2021.<sup>41</sup>

Tidak adanya koordinasi dan komunikasi dalam penanganan pandemi Covid-19 juga terlihat dari kebijakan gubernur Mahyeldi. Ini terlihat dengan penilaian pemerintah pusat yang memberi nilai merah kepada pemerintah provinsi dalam menangani pandemi Covid-19.<sup>42</sup> Bahkan implementasi kebijakan yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya belum dilaksanakan dengan baik oleh gubernur dan perangkatnya. Ini dibuktikan tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait, terutama dalam menganggarkan operasional Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu

---

<sup>41</sup> Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5702921/heboh-surat-gubernur-sumbar-minta-sumbangan-merembet-ke-hak-angket> (Diakses pada 4 November 2021).

<sup>42</sup> Baca <https://www.liputan6.com/regional/read/4627595/tanggapan-gubernur-sumbar-diberi-rapor-merah-dalam-penanganan-covid-19> (Diakses pada 4 November 2021).

Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Bahkan DPRD menyanangkan sikap gubernur yang belum menganggarkan biaya pemeriksaan sampel untuk penanganan Covid-19.<sup>43</sup>

Dengan melihat kondisi di atas, jelas bahwa terdapat perbedaan nyata bagaimana politik kebijakan Gubernur Mahyeldi dalam menangani pandemi Covid-19 dengan gubernur sebelumnya. Sebagai gubernur dan kepala daerah, Mahyeldi lebih cenderung mempertimbangkan banyak hal, terutama aktor kebijakan yang terlibat. Aktor tersebut tidak hanya dalam konteks aktor formal, tapi juga aktor informal yang ada di lingkungan baik ketika kebijakan diformulasikan maupun diimplementasikan. Pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat gubernur Mahyeldi tidak terlepas dari masukan dari aktor informal yang berada di sekitarnya. Akibatnya kebijakan yang dibuat cenderung menjadi bias dan bahkan sulit dikoordinasikan. Begitu juga dengan karakter diri Mahyeldi yang diidentik sebagai "buya" membuat dirinya juga harus mempertimbangkan pendapat ulama. Hal ini yang berdampak besar pada kebijakannya menangani Covid-19.

## PENUTUP

Tulisan ini sudah menjelaskan bagaimana perbedaan penanganan Covid-19 di masa Gubernur Irwan Prayitno yang berhasil mengendalikan penularan virus Corona ini dengan Gubernur Mahyeldi pasca pelantikannya bulan Februari 2021. Keberhasilan Gubernur Irwan Prayitno tidak dapat diikuti dengan baik oleh Gubernur Mahyeldi di awal pemerintahannya. Walaupun Gubernur Mahyeldi sebelumnya adalah Walikota Padang, namun ketika menang dalam Pilkada sserentak 2020 terlihat "gagap" menyelenggarakan pemerintahan di Sumatera Barat. Ini terlihat dengan beberapa kebijakannya yang kontroversial tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan tapi juga, penanganan pandemi Covid-19. Setidaknya ini dapat dilihat enam bulan pemerintahannya.

Beberapa kebijakannya yang kontroversi ini adalah implikasi dari politik kebijakannya yang mengakomodir kepentingan banyak aktor-aktor informal yang ada di sekitarnya, terutama dalam membuat kebijakan penanganan Covid-19. Misalnya, dengan sebutan "buya" yang melekat kepada dirinya, Gubernur Mahyeldi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kelompok ulama di Sumatera Barat. Kelompok ulama di Sumatera Barat memang tidak menganggap serius pandemi Covid-19 ini sehingga kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan menegakan protokol kesehatan, terutama dalam

---

<sup>43</sup> Silakan lihat <https://news.detik.com/berita/d-5669136/lab-pcr-unand-tak-dapat-dana-pemprov-gerindra-tunjuk-hidung-gubernur-sumbar> (Diakses pada 4 November 2021).

melaksanakan ibadah di masjid selalu dipermasalahkan. Bahkan kebijakan pemerintah terkait dengan vaksin juga mendapat kritik dari ulama. Tulisan ini juga sudah menjelaskan selain keterlibatan aktor ulama ini, kecenderungan kepemimpinan Gubernur Mahyeldi melibatkan kelompoknya dalam membuat kebijakan dalam pemerintahannya juga berdampak pada kebijakan yang dibuatnya.

Hal yang paling krusial adalah masalah koordinasi dan komunikasi di antara institusi pemerintah daerah yang terlihat lemah di bawah kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah. Beberapa kebijakannya yang kontroversi tidak hanya dalam penanganan Covid-19, tapi juga dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang bermuara pada pengajuan hak angket DPRD Provinsi Sumatera Barat. Walaupun, pasca keberhasilan pemerintah pusat melaksanakan PPKM level 1-4 di Indonesia sejak bulan Juli 2021 juga berimbas pada keberhasilan Gubernur Mahyeldi mengendalikan Covid-19 di Sumatera Barat. Pemantauan yang ketat dan interaksi langsung Presiden Jokowi dengan Gubernur Mahyeldi dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat berdampak positif kepada turunnya angka positif Sumatera Barat, terutama pada bulan Oktober 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cairney, Paul (2016), *The Politics of Evidence-Based Policy Making*. London: Palgrave Macmillan.
- Delanty, Gerald (2021), *Pandemics, Politics, and Society: Critical Perspectives on the Covid-19 Crisis*. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH.
- Hartley, Kris & Khuong, Minh Vu (2020), *Fighting Fake news in the Covid-19 Era: Policy Insights from an Equilibrium Model*. Policy Sciences, DOI:10.1007/S11077-020-09405-z.
- Hartley, Kris & Jarvis, Darryl S. L. (2020), *Policymaking in a Low-Trust state: Legitimacy, State Capacity, and Responses to COVID-19 in Hong Kong*. Policy and Society, DOI: 10.1080/14494035.2020.1783791.
- Helmke, Gretchen, & Levitsky, David (2004), *Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda*. *Perspectives on Politics*, 2(4): 725-740.
- Kaeding, Michael, (2018). *Out of Balance? Practical Experience in European Union with Quasi-Legislative Acts*. *The European Parliament in Times of EU Crisis*. DOI:10.1007/978-3-319-97391-3\_8
- Kouzmin, Alexander (2008), *Crisis Management in Crisis? Administrative Theory & Praxis*, 30:2, 155-183. <http://dx.doi.org/10.1080/10841806.2008.11029631>

- Mahmud, Muslimin, Irawan, Bambang, Karinda, Kisman, Susilo, Joko, & Salahuddin (2021), Analysis of the Intensity of Communication and Coordination of Government Officials on Twitter Social Media during the Covid-19 Handling in Indonesia, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10 (3):319-334.
- McLean, Hamish & Ewart, Jacqui (2020), *Political Leadership in Disaster and Crisis Communication and Management: International Perspectives and Practices*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Ruiu, Maria Laura (2020), Mismanagement of Covid-19: Lessons Learned from Italy, *Journal of Risk Research*, DOI: 10.1080/13669877.2020.1758755.
- Soujaa, Ismail, Nukpezah, Julius A., & Benadevis, Abraham David (2021), Coordination Effectiveness During Public Health Emergencies: An Institutional Collective Action Framework. *Administration & Society*. DOI: 10.1177/0095399720985440.
- Tiwari, Asmita (2015), *The Capacity Crisis in Disaster Risk Management: Why Disaster Management Capacity Remains Low in Developing Countries and What Can Be Done*. Switzerland: Springer.
- Wawan Mas'udi, Wawan, & Winanti, Poppy S. (2020), Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In: *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.  
<https://www.worldometers.info/coronavirus/> (diakses tanggal 27 Oktober 2021)
- <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/> (Diakses tanggal 27 Oktober 2021)
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210127151926-113-599100/para-pemimpin-dunia-yang-minta-maaf-atas-penanganan-pandemi> (Diakses pada 27 Oktober 2021).
- <https://kumparan.com/kumparannews/bukan-jokowi-ini-5-pejabat-yang-minta-maaf-terkait-covid-19-1wB2yqA39W2/4> (Diakses pada 27 Oktober 2021).
- <https://www.republika.co.id/berita/qmkb3x409/jawabali-penyumbang-terbesar-kasus-covid-sejak-awal-pandemi> (Diakses pada 30 Oktober 2021)
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200426202230-20-497446/kasus-virus-corona-di-sumbar-didominasi-penularan-lokal> (Diakses 30 Oktober 2021).
- <https://www.beritasatu.com/nasional/653109/bom-waktu-covid19-di-sumatera-barat> (diakses pada 30 Oktober 2021)
- <https://langgam.id/fisip-unand-realokasi-anggaran-covid-19-harus-jamin-kebutuhan-dasar-penduduk-sumbar/> (Diakses pada 3 November 2021).
- <https://langgam.id/doni-monardo-tungku-tigo-sajaran-ujung-tombak-lawan-covid-19-di-sumbar/> (Diakses pada 3 November 2020).

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210005090348-20-554336/survei-39-persen-warga-sumbar-sebut-corona-konspirasi-global> (Diakses pada 30 Oktober 2021).
- <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1270> "Alokasi APBD Penanganan Pandemi Covid-19 di Sumbar Sebesar Rp541,2 miliar, DPRD Pertanyakan Keefektifan Penyaluran." (Diakses 3 November 2021).
- <https://sumbar.antaranews.com/berita/373618/mempelajari-keberhasilan-pengendalian-covid-19-di-sumatera-barat> (Diakses pada 3 November 2021).
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20210113/15/1342583/dua-pekan-pasca-nataru-kenaikan-kasus-covid-19-mengganas> (Diakses pada 3 November 2021).
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4445557/semua-destinasi-wisata-sumbar-tutup-saat-libur-tahun-baru> (Diakses pada 3 November 2021).
- <https://covesia.com/archipelago/115150/labor-fk-unand-kekurangan-anggaran-hidayat-sebut-anggaran-ada-kemauan-gubernur-yang-belum/> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://tekno.tempo.co/read/1491451/nol-apbd-untuk-laboratorium-penyakit-infeksi-unand-gubernur-ada-mekanismenya> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://republika.co.id/berita/daerah/sumatra/qxay73487/donasi-untuk-laboratorium-unand-bentuk-keprihatinan-warga> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-dan-wagub-sumbar-beli-mobil-dinas-seharga-rp2-miliar-di-tengah-pandemi.html> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4633695/gubernur-dan-wagub-sumbar-kompak-beli-mobil-dinas-baru-rp2-miliar-di-tengah-badai-pandemi> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210809155337-20-678312/gubernur-sumbar-tanya-tolak-ukur-nilai-merah-rapor-jokowi> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://langgam.id/100-hari-mahyeldi-audy-epidemiologi-beri-rapor-merah-soal-penanganan-covid-19/> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://mimbarsumbar.id/banyak-ulama-dan-ormas-islam-percaya-hoaks-covid-19-rekayasa/> (4 November 2021).
- <https://news.detik.com/berita/d-5634466/mui-sumbar-tolak-peniadaan-ibadah-di-masjid-selama-ppkm> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://republika.co.id/berita//qmveqp320/ketua-mui-sumbar-minta-pemerintah-tak-paksakan-vaksinasi%C2%A0> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://terbetik.com/2021/03/13/gubernur-bentuk-tim-18-untuk-percepatan-pembangunan-sumbar/> (Diakses pada 4 November 2021)

- <https://padangkita.com/gubernur-mahyeldi-dan-pks-harus-memimpin-aksi-bersih-bersih-orang-kepercayaan/> (Diakses pada 4 November 2021)
- <https://news.detik.com/berita/d-5702921/heboh-surat-gubernur-sumbar-minta-sumbangan-merembet-ke-hak-angket> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4627595/tanggapan-gubernur-sumbar-diberi-rapor-merah-dalam-penanganan-covid-19> (Diakses pada 4 November 2021).
- <https://news.detik.com/berita/d-5669136/lab-pcr-unand-tak-dapat-dana-pemprov-gerindra-tunjuk-hidung-gubernur-sumbar> (Diakses pada 4 November 2021).



# PROGRAM SEMBAKO SEBAGAI KEBIJAKAN DISTRIBUTIVE DALAM PENANGANGAN PANDEMIC COVID 19 DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN)

Harits Hijrah Wicaksana<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang terjadi sejak awal Maret 2020 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor-sektor lain, termasuk sosial-ekonomi. Dalam upaya menangani dampak tersebut, sejak Maret 2020 pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk, antara lain, mendukung daya beli masyarakat dan kegiatan usaha. Anggaran yang disediakan mengalami beberapa kali peningkatan seiring peningkatan intensitas dampak dan dinamika pengelolaan keuangan negara. Anggaran tersebut semula Rp405,1 triliun, kemudian terus bergerak naik hingga menjadi Rp695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesarnya adalah untuk program perlindungan sosial yang mencapai Rp203,9 triliun atau sekitar 29,3% dari total anggaran. Program perlindungan sosial yang dilaksanakan terdiri atas delapan program. Dua program dengan alokasi anggaran terbesar adalah Program Sembako sebesar Rp43,6 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun (Kemenko Perekonomian, 2020). Dalam rangka menangani dampak COVID-19, pemerintah meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta dan meningkatkan nilai bantuan sebesar 33% (dari Rp150.000 menjadi Rp200.000). Sementara itu, pada PKH, pemerintah meningkatkan jumlah KPM dari 9,2 juta menjadi 10 juta, meningkatkan nilai bantuan sebesar 25%, dan mengubah frekuensi pencairan menjadi per bulan (sebelumnya, per tiga bulan). Penyesuaian tersebut akan dilaksanakan pada April–Desember 2020.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017, dan pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program

---

<sup>1</sup> Dosen sekaligus Ketua STISIP Setia Budhi, Lebak, Banten. Email: haritshijrah@gmail.com

BPNT dikembangkan menjadi program Sembako yang semula KPM mendapatkan Rp.110.000/bulan kini naik menjadi Rp.150.000/ bulan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari komoditas yang dapat dibelanjakan yang sebelumnya beras dan atau telur, namun dalam Program Sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan vitamin mineral, selain itu pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan oleh KPM diharapkan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga mampu berpengaruh terhadap penurunan *stunting*.

Adapun Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program Sembako kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia Pemerintah berupaya untuk menyiapkan berbagai strategi dalam melakukan penanganan serta meminimalisir dampak akibat Virus Corona dengan menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2020 yang di dalamnya terdapat menambah bantuan dalam program kartu sembako. dari Rp 150.000 per bulan ditambah menjadi Rp 200.000 per bulan.

## KAJIAN PUSTAKA

Dalam banyak referensi kebijakan publik terdapat tipe-tipe kebijakan yaitu *distributive policy*, *competitive regulatory*, *protective regulatory*, dan *redistributive policy*. Sedangkan *distributive policy* dalam Wicaksana, et.al (2020) Adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya di mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa mengambil beberapa bentuk: Cash atau *in-kind* (hadiah, pinjaman dengan bunga lunak, penurunan pajak, dsb.) Subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dimaksudkan untuk mendatangkan efek: Positif (masyarakat mau melakukan aktivitas yang dikehendaki pemerintah) Negatif (masyarakat tidak melakukan aktivitas yang tidak disukai pemerintah). Persoalan yang muncul dalam pembuatan kebijakan distributif. Asumsi yang dipakai selama ini seolah antara kebijakan distributif yang satu dengan yang lain tidak berhubungan. Dalam kenyataannya anggaran pemerintah sangat terbatas, sehingga kebijakan distributif yang dibuat oleh pemerintah dapat

bersifat *zero sum game* di mana pembuatan kebijakan yang satu akan berimplikasi pada hilangnya kebijakan yang lain.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian gabungan, yaitu pendekatan secara kuantitatif deskriptif dan pendekatan kualitatif. Di mana dalam penelitian mengukur indeks kepuasan masyarakat penerima Program Bantuan Sembako. Untuk *locus* penelitian di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sehingga diharapkan dapat terdeskripsikan dalam kebijakan Program Sembako yang menjadi salah satu kebijakan yang diambil untuk penanganan pandemi Covid19 dilihat dalam dua pendekatan penelitian. Secara kuantitatif deskriptif dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat, sedangkan pendekatan kualitatif mencari *meaning* dalam penelitian dalam persepsi masyarakat terkait pelayanan yang diberikan dalam program bantuan sembako di Kabupaten Lebak ini. *Mixed Methods Research* menurut John W. Creswell (2014: 5) adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metoda inkuiri. *Mixed methods research* juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Populasi penelitian difokuskan pada responden yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lebak dengan jumlah 108.862 KK. Adapun teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *proportionate cluster area random sampling*. sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 399 untuk KPM dan 196 untuk agen. Sedangkan pendekatan metode kualitatif dalam pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang ditentukan dan dianggap peneliti dapat menjawab dalam rumusan penelitian ini. Informan yang ditentukan baik dari eksekutif (Dinas Sosial Kabupaten Lebak), Ketua DPRD Kabupaten Lebak, KPM, Agen e-warung, distributor/supplier, OKP, media dan informan lainnya yang dianggap dapat menjawab rumusan penelitian ini.

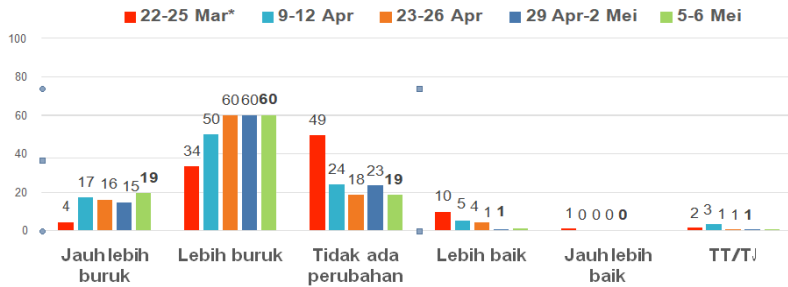
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pandemi COVID-19 sudah merebak sejak bulan Maret 2020 di Indonesia. Kebijakan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengurangi berbagai kegiatan masyarakat di luar rumah, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk

menangani dampak sosial-ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). Untuk menangani dampak sosial-ekonomi pada masyarakat paling miskin dan rentan miskin, dalam Perppu No 1 Tahun 2020 nomor 1 huruf b dan huruf d bahwa implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Perppu No 1 Tahun 2020 mengalokasikan anggaran khusus untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp.110 Triliun dalam berbagai bentuk kegiatan. Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Sosial (Bansos) Khusus Wilayah Jabodetabek. Sedangkan gugus tugas dalam implikasi JPS diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998. Berikut data hasil survei menurut Saiful Mujani keadaan rumah tangga sekarang dibanding sebelum adanya COVID-19:

Grafik 2 Keadaan Rumah Tangga Sekarang Dibanding Sebelum Adanya COVID-19



Sumber: Saiful Mujani (2020)

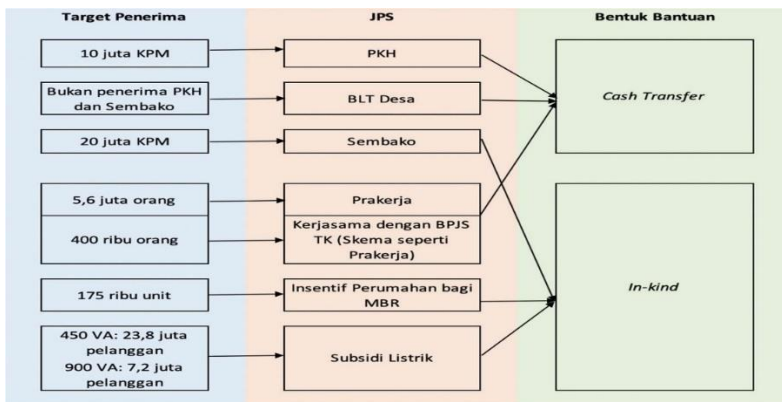
Penilaian warga secara nasional terhadap kondisi ekonomi rumah tangga masing-masing sekarang dibanding sebelum adanya Covid-19, negatif. Jauh lebih banyak yang menyatakan sekarang lebih buruk dibanding yang menyatakan lebih baik. Perbedaannya sangat signifikan, hampir tak ada yang menyatakan sekarang lebih baik.

Menteri Keuangan menekankan bahwa terdapat empat sektor yang paling terpuak akibat pandemi, yakni sektor rumah tangga, pekerja informal, UMKM dan korporasi. Dari keempat sektor tersebut, pekerja adalah yang paling rentan kehilangan pendapatan dalam jumlah yang besar. Lebih jauh, kelompok masyarakat yang paling rentan bisa diidentifikasi berdasarkan pekerjaan yang paling terpuak akibat COVID-19. Pertama, pekerja informal yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan *containment*. Kerja dari rumah (KDR) dan *physical distancing* menyebabkan penurunan permintaan terhadap jasa pekerja informal. Sederhananya, pekerja informal mencakup pekerja dan pengusaha yang tidak terikat kontrak, seperti sopir transportasi daring, sopir taksi, buruh harian, atau pedagang kaki lima. Per Agustus 2019, pekerja informal di Indonesia meliputi 55,72 persen dari total tenaga kerja. Sebagian besar pekerja informal mengandalkan upah harian untuk memenuhi kebutuhannya. Ini dapat mengindikasikan bahwa pekerja informal tidak memiliki tabungan sebagai jaring pengaman di tengah situasi saat ini. Kedua, kelompok masyarakat rentan selanjutnya adalah para pekerja yang di PHK di masa pandemi. Jumlah pekerja yang di PHK atau dirumahkan terus melonjak tajam setelah himbauan pertama KDR yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2020. Adapun sektor yang paling rentan terdampak COVID-19 di Indonesia adalah sektor-sektor yang terlibat pada rantai pasokan

global atau aktivitasnya memerlukan kehadiran atau interaksi fisik, meliputi sektor pariwisata, transportasi, restoran, retail, dan manufaktur.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan pada 7 April 2020, pekerja yang paling banyak di PHK dan dirumahkan datang dari sektor formal, di mana sebanyak 1.010.579 pekerja dirumahkan dan PHK oleh total 39.977 perusahaan. Sementara, 189.452 pekerja sektor informal di PHK dan dirumahkan oleh 34.453 perusahaan. Pemerintah perlu mencatat bahwa korban PHK dan dirumahkan tidak memiliki sumber pendapatan untuk waktu yang belum bisa ditentukan, setidaknya hingga perekonomian mulai bangkit. Dengan tidak adanya pendapatan, kelompok ini rentan masuk dalam kategori masyarakat miskin. Lalu seberapa efektifkah JPS ini dalam membantu memulihkan perekonomian untuk dunia usaha dan masyarakat yang berdampak? Berikut pemetaan tambahan JPS:

Gambar 3 Pemetaan Tambahan Jaring Pengaman Sosial



Sumber : CSIS Commentaries (2020)

1. Program Keluarga Harapan (PKH), Sebagai antisipasi melemahnya daya beli masyarakat akibat wabah COVID-19, pemerintah berencana untuk menambah penyaluran PKH dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Sasaran utama program ini adalah individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial; dengan kriteria tambahan seperti terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
2. Program Sembako, pada anggaran JPS, indeks bantuan program Sembako naik dari Rp 150.000,-/KPM menjadi Rp 200.000,-/KPM. Pemerintah juga menambahkan target penerima KPM dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Penambahan KPM ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disasarkan kepada 30 persen rumah tangga dengan kesejahteraan terendah di Indonesia. Untuk menampung pertambahan tersebut, pemerintah menambah anggaran program Sembako yang awalnya sebesar Rp 28,02 triliun menjadi Rp 43,73 triliun. Dalam mekanisme distribusinya, KPM akan menerima bantuan dalam bentuk saldo non tunai di Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Program Sembako bertujuan untuk mengurangi beban keluarga rentan dan miskin melalui bantuan bahan pangan. KPM dapat membeli bahan pangan di e-Warong menggunakan bantuan non-tunai yang diberikan dalam bentuk saldo *online* dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KPM dapat menentukan sendiri jumlah, varian, kualitas pangan serta waktu untuk belanja di e-Warong.

3. Kartu Prakerja, setelah diperluas fungsinya, melalui Prakerja, pemerintah menyasar pekerja yang di-PHK dan bisnis mikro yang kesulitan usaha. Untuk menjadi pemegang Kartu Prakerja yang sah, seseorang harus lulus melalui proses pendaftaran *online*, tes minat bakat, dan seleksi *batch* berdasarkan domisili. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta memperoleh insentif yang disalurkan melalui e-wallet atau rekening bank yang telah didaftarkan. Setiap peserta mendapatkan total bantuan sebesar Rp3.550.000. Dana ini terdiri dari *voucher* pelatihan senilai Rp1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebermanjaan yang secara total berjumlah Rp150.000. Selama masa wabah COVID-19, peserta hanya diperbolehkan mengambil pelatihan *online* di platform seperti Tokopedia, Bukalapak, *Skill Academy* by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.
4. Subsidi Listrik, Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembagian token listrik gratis bagi pelanggan prabayar golongan listrik 450 VA dan golongan subsidi 900 VA. Untuk golongan listrik 450 VA, pelanggan akan mendapatkan fasilitas gratis biaya listrik selama tiga bulan; sedangkan untuk golongan listrik 900 VA akan mendapat diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari biaya penggunaan listrik selama 3 bulan terakhir.
5. Insentif Perumahan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR), tujuan bantuan ini agar masyarakat mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau. Ada beberapa syarat agar seseorang bisa menerima manfaat ini, antara lain 1) WNI masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tidak memiliki rumah; 2) penghasilan maksimal Rp8.000.000 per bulan atau Rp8.500.000 untuk wilayah Papua dan Papua Barat; dan 3) belum pernah menerima bantuan pembiayaan perumahan (pembiayaan pemilikan dan pembangunan rumah) dari Pemerintah.  
Adapun total anggaran untuk program ini merupakan yang terkecil di banding program *social safety net* lainnya, yakni sebesar 1,5 Triliun. Insentif diberikan untuk 175.000 unit dalam bentuk penambahan subsidi bunga sebesar 0,8 Triliun dan subsidi uang muka sebesar 0,7 Triliun. Untuk subsidi selisih bunga, besaran bantuannya adalah lima persen untuk bunga konsumen dan 6-7 persen untuk bank pelaksana. Sementara itu, untuk bantuan uang muka, bantuan diberikan sebesar Rp 4.000.000 per unit.



Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari proses pengumpulan data baik data primer maupun sekunder, data primer tersebut diolah melalui alat bantu program komputer statistik SPSS versi 25 (Program *Statistical Product and Service Solution*). Validitas suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur dan mengungkapkan apa yang akan diteliti.

Besarnya nilai  $r$  tiap butir pernyataan dapat dilihat dari hasil analisis SPSS.25 pada kolom Koefisien Korelasi dan disandingkan dengan  $r_{\text{tabel}}$  dengan jumlah responden sebanyak 399 untuk instrumen pertanyaan pada KPM dengan nilai  $r_{\text{tabel}}$  0,0098, dan sebanyak 196 responden untuk pertanyaan pada Agen dengan nilai  $r_{\text{tabel}}$  0,1172. Apabila nilai  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  maka dinyatakan Valid, dan sebaliknya apabila  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$  maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Instrumen untuk KPM

Indikator Kuesioner	Koefisien Korelasi	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan Validitas
Pertanyaan 1	0,586	0,098	Valid
Pertanyaan 2	0,513	0,098	Valid
Pertanyaan 3	0,621	0,098	Valid
Pertanyaan 4	0,519	0,098	Valid
Pertanyaan 5	0,635	0,098	Valid
Pertanyaan 6	0,637	0,098	Valid
Pertanyaan 7	0,636	0,098	Valid
Pertanyaan 8	0,605	0,098	Valid
Pertanyaan 9	0,666	0,098	Valid

Sumber: Data hasil olahan tim penulis dari data angket (2020)

Dari tabel di atas pada kolom koefisien korelasi pertanyaan untuk KPM diketahui bahwa seluruh butir pernyataan/ $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan Valid.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen untuk Agen

Indikator Kuesioner	Koefisien Korelasi	$r_{\text{tabel}}$	Keterangan Validitas
---------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Pertanyaan 1	0,582	0,117	Valid
Pertanyaan 2	0,565	0,117	Valid
Pertanyaan 3	0,573	0,117	Valid
Pertanyaan 4	0,619	0,117	Valid
Pertanyaan 5	0,594	0,117	Valid
Pertanyaan 6	0,614	0,117	Valid
Pertanyaan 7	0,524	0,117	Valid
Pertanyaan 8	0,604	0,117	Valid
Pertanyaan 9	0,528	0,117	Valid

Sumber : Data hasil olahan tim penulis dari data angket (2020)

Dari tabel di atas pada kolom koefisien korelasi pertanyaan untuk Agen diketahui bahwa seluruh butir pernyataan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan Valid.

Setelah semua butir pada instrumen pertanyaan baik untuk KPM ataupun untuk Agen dinyatakan valid maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian reliabilitas. Untuk melihat tingkat reliabilitas data dengan menggunakan program SPSS.25, jika Cronbach Alpha  $> 0,6$  maka reliabilitas pernyataan dapat diterima. Hasil dari Uji Reliabilitas untuk pertanyaan baik untuk KPM ataupun untuk Agen dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen Pertanyaan	Nilai Uji	Cronbach Alpha	Jumlah Butir Pertanyaan	Reliabilitas
KPM	0,745	0,600	9	<i>Reliabel</i>
Agen	0.740	0,600	9	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data hasil olahan data angket Penulis menggunakan SPSS 25 (2020)

Dari tabel di atas nilai Cronbach Alpha untuk masing-masing instrumen pertanyaan  $> 0,6$ , maka setiap butir pernyataan baik untuk KPM dan Agen dinyatakan reliabel. Peneliti ini ingin menjawab mengenai rumusan masalah yaitu seberapa besar Survei kepuasan masyarakat (SKM) dan bagaimana kinerja pelayanan Agen Program Sembako Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut dihitung dengan cara berikut ini, penjumlahan dari tiap unsur yang telah dijumlahkan kemudian jumlah dari tiap unsur tersebut

dikalikan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang. Dan acuan penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini:

Tabel 4 Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konvensi Mutu, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,534	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permenpan Nomor 14 Tahun 2017

Pada prinsipnya perhitungan yang sudah dilakukan dan dihitung menggunakan Survei dan di sesuaikan dengan acuan dari tabel tersebut. Jika perolehan nilai Surveinya berkisar dari 1,00 – 1,75 (25 – 43,75) maka mutu pelayanannya “D” dan dikatakan tidak baik. Jika perolehan Surveinya berkisar dari 1,76 – 2,50 (43,76 – 62,50) maka mutu pelayanannya “C” dan dikatakan kurang baik. Jika perolehan Surveinya berkisar 2,51 – 3,25 (62,51 – 81,25) maka mutu pelayanannya “B” dan dikatakan baik. Jika perolehan Surveinya berkisar dari 3,26 – 4,00 (81,26 – 100,00) maka mutu pelayanannya “A” dan dikatakan sangat baik.

Selanjutnya pelaksanaan dalam sistem perhitungan pada penelitian dilakukan dengan dua metode pertama secara simultan dan kedua secara parsial. Secara simultan merupakan total keseluruhan dari jumlah responden baik KPM ataupun Agen dengan total sebanyak 595 responden yang tersebar di 28 Kecamatan di Kabupaten Lebak , dan serta secara parsial yang merupakan penilaian KPM terhadap Agen dengan jumlah responden sebanyak 399 responden yang tersebar di 28 Kecamatan di Kabupaten Lebak, ada pun untuk jumlah responden Agen sebanyak 196 responden yang tersebar di 28 Kecamatan di Kabupaten Lebak.

Dalam perhitungan metode simultan didapat jumlah perolehan kuesioner sebagai berikut :  $(3,11 \times 0,11) + (3,15 \times 0,11) (3,04 \times 0,11) (3,05 \times 0,11) (3,13 \times 0,11) (3,22 \times 0,11) (3,06 \times 0,11) (3,32 \times 0,11) =$  nilai survei adalah 3,10. Perhitungan selanjutnya adalah melakukan konversi sebagaimana tertuang

dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 di mana nilai survei x nilai dasar =  $3,10 \times 25 = 77,59$  dan menurut Mutu pelayanan memperoleh mutu “ B “ sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan baik Agen ataupun supplier pada Program Sembako dapat dikatakan Baik.

Setelah melakukan penghitungan dengan metode simultan maka penulis melakukan perhitungan dengan metode parsial di mana perhitungan pertama dilakukan terhadap agen dengan responden KPM, dengan jumlah perolehan kuesioner yang didapat adalah sebagai berikut  $(3,12 \times 0,11) + (3,18 \times 0,11) + (3,07 \times 0,11) + (3,10 \times 0,11) + (3,15 \times 0,11) + (3,15 \times 0,11) + (3,22 \times 0,11) + (3,11 \times 0,11) + (3,19 \times 0,11) +$  = nilai Survei adalah 3,11. Sama halnya dengan metode simultan di mana perhitungan selanjutnya adalah dengan melakukan konversi sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 di mana nilai survei x nilai dasar =  $3,11 \times 25 = 74,67$  dan menurut Mutu pelayanan memperoleh mutu “ B “ sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan Agen pada Program Sembako dapat dikatakan Baik.

Adapun untuk perhitungan metode parsial yang kedua dilakukan kepada supplier dengan respondennya adalah agen , sebagaimana telah di analisis sebelumnya di mana perolehan kuesioner yang didapat adalah sebagai berikut :  $(3,10 \times 0,11) + (3,11 \times 0,11) + (2,95 \times 0,11) + (2,96 \times 0,11) + (3,10 \times 0,11) + (3,09 \times 0,11) + (3,20 \times 0,11) + (2,97 \times 0,11) + (3,58 \times 0,11) =$  nilai Survei adalah 3,08, setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai dasar =  $3,08 \times 25 = 77,24$  dan menurut Mutu pelayanan Supplier Program Sembako memperoleh mutu “ B “ sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan supplier Program Sembako dapat dikatakan “Baik.”

Dengan nilai survei dapat diketahui bahwa pelayanan yang dilakukan oleh agen ataupun supplier adalah sama sama “Baik”, selanjutnya untuk melihat secara rinci penulis akan memaparkan dominasi nilai terbesar dan nilai terkecil berdasarkan KPM dan Agen, serta berdasarkan Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lebak. Untuk KPM, Dari 9 indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam penelitian ini diketahui Instrumen 4 mengenai Biaya/Tarif Pelayanan yang memiliki dominasi nilai terbaik, di mana dari 399 responden menilai sebesar 81,91% adalah “Wajar,” selanjutnya perbaikan perlu dilakukan pada instrumen 9 mengenai Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan Terhadap Agen, di mana 16,00% responden menilai “Tidak adanya penanganan pengaduan, saran, dan masukan terhadap agen”. Sedangkan pada Agen Instrumen 1

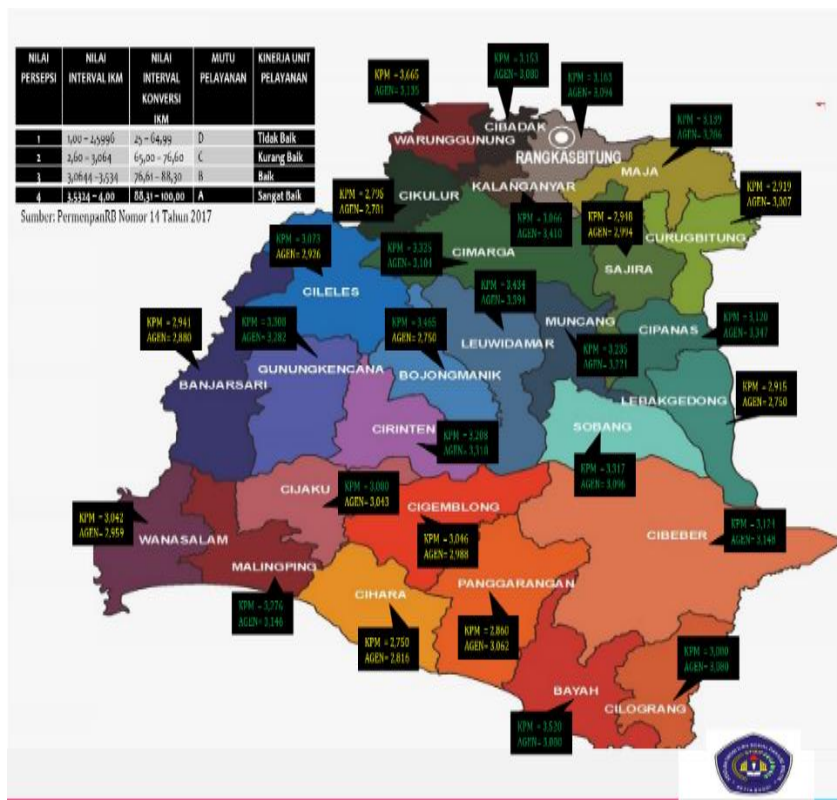
mengenai Persyaratan Pelayanan yang memiliki dominasi nilai terbaik, di mana dari 196 responden menilai sebesar 83,67 % adalah “Sesuai”, selanjutnya dalam perbaikan perlu dilakukan pada instrumen 9 mengenai Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan Terhadap Agen, di mana 459% responden menilai “Tidak adanya penanganan pengaduan, saran, dan masukan terhadap supplier” (Wicaksana, *et al.*, 2020).

Pada sisi lain, kepercayaan publik secara luas akan memengaruhi kebijakan dan kondusivitas publik. Ketika publik tidak lagi memiliki kepercayaan (*trust*) kepada para pelaku kebijakan (*policy makers*), akan sulit bagi kebijakan tersebut untuk diimplementasikan secara benar. Daya dukung publik akan rendah, dan yang kemungkinan terjadi adalah apatis dan apriori terhadap kebijakan, dan lebih jauhnya lagi tidak ada kepatuhan atau ketaatan sebagaimana diharapkan. Dalam situasi seperti ini, segala bentuk kebijakan yang dibangun akan selalu dipermasalahan. Permasalahan lain adalah ketika pihak *inner public* tidak memiliki kepercayaan terhadap publiknya (*outer public*). Publik (*outer*) akan selalu dianggap sebagai pihak yang harus selalu diatur secara formal, publik yang tidak disiplin, rendah kualitas tanggung jawabnya, individualistis dan egosentris, dan sebagainya. Situasi seperti ini tentunya akan menjadikan para pembuat kebijakan terjebak pada pemikiran formalistis, detail, dan rigid dalam memformulasikan kebijakan. Dampak yang muncul adalah detailnya muatan kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan rigiditas dan kekakuan dalam implementasinya. Kecenderungan ketidakpercayaan dari kedua belah pihak dalam proses formulasi kebijakan publik ini hendaknya tidak dibiarkan mengalir mengikuti arus tanpa adanya upaya penghentiannya. Dalam memformulasikan suatu kebijakan, hendaknya tidak didasarkan pada adanya motif “negatif”. Kebijakan harus dirumuskan dengan suasana objektif sebagai akibat dari adanya kebutuhan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, tentang sesuatu hal yang menjadi kepentingannya. Pemerintah dan masyarakat harus saling “mengintrospeksi” diri agar kepercayaan di antara keduanya dapat tercipta dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya dapat menunjukkan dan mengembangkan strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan publik yang tinggi. Pemerintah yang kuat, birokrasi yang profesional, masyarakat yang terdidik, akan menjadi dorongan dan spirit yang kuat bagi terbangunnya kebijakan publik yang efektif.

Berikut penulis jabarkan sebaran penilaian survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Lebak, baik penilaian survei berdasarkan keluarga penerima manfaat dan penilaian atas agen e-warong. Sehingga kita dapat

mengetahui dan dapat memberikan perubahan bagi daerah-daerah yang dinilai masih mendapatkan nilai “C /cukup.

Gambar 4  
Hasil Survey Berdasarkan Keluarga Penerima Manfaat  
dan Penilaian Atas Agen E-Warong



Sumber: Wicaksana, *et al.* (2020)

## SIMPULAN

Berdasarkan data-data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Program Sembako di Kabupaten Lebak, maka Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, Walaupun penentuan harga disesuaikan pada mekanisme pasar, namun pada dasarnya e-warong / agen dapat memilih supplier, tetapi sebelumnya harus berkoordinasi dengan TSKS, dan terdapat hubungan yang berbanding lurus artinya kualitas bahan pangan yang diberikan oleh supplier yang akan berdampak terhadap e-warong, dan tidak dapat dipungkiri hal tersebut akan berdampak juga terhadap KPM; Kedua, Dalam perhitungan

metode simultan didapat jumlah hasil 77,59 dan menurut Mutu pelayanan memperoleh mutu “B” sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan baik Agen ataupun supplier pada Program Sembako dapat dikatakan Baik. Rekomendasi serta saran yang coba ditawarkan oleh penulis yaitu: pertama, ketidakmerataan e-warong pun akan mempengaruhi kinerja penilaian, walau pun pada dasarnya telah e-warong / agen berbeda setiap desa dan disesuaikan dengan jumlah penerima, namun harus diperhatikan faktor lainnya mulai dari signal serta letak geografis; Kedua, Peningkatan perbaikan dari perencanaan, penyusunan, bimbingan, pengawasan hingga pada evaluasi. Pada penelitian ini ditekankan lebih pada aspek bimbingan serta pengawasan, hal ini sangat penting agar tidak terjadi beberapa pelanggaran yang telah ditetapkan oleh pedoman umum sembako tahun 2020; Ketiga, mendorong supplier untuk memiliki sertifikat mutu ISO 9001:2015, sehingga ke depan supplier mampu mengidentifikasi standar kualitas untuk pelaksanaan proyek dan bagaimana memenuhinya. mengimplementasikan rencana jaminan kualitas agar proyek memenuhi semua *requirement* dan memonitor hasil pelaksanaan proyek apakah memenuhi standar kualitas atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Suara Bebas.
- Abdurrahman, Oemi. 1995. *Dasar-dasar Public Relation*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
- Agustino, Leo. 2005. *Politik dan Otonomi Daerah*. Serang: UNTIRTA PRESS
- \_\_\_\_\_. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- \_\_\_\_\_. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit PT. Dunia Pustaka Jaya dan Pusat Studi Sunda.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy-Making*. USA: Penerbit Lay Holt, Rinchart and Winston.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Bruce Mitchell, 1997. *Resource And Environmental Management*, “terjemahan Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan/, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi tahun 2000”. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Cooley, W.W & P.R. Lohnes. 1976. *Evaluation Research in Education*, New York: Irvington Publisher Inc.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design. Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: Kik Press



- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliff: Prentice-Hall, Inc.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Edward III, Goerge C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Gronoroos Christian. 1990. *Service Management nad Marketing: A Moment of truth*. Singapore Maxwell Macmillan International.
- Hasibuan, Melayu S.P. 1984. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hill, Michael. 2005. *The Public Policy Process*. England: Pearson education Limited
- Howlet, Michael and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford University Press.
- Howlet, Michael. 2011. *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. New York: Routledge 270 Madison Avenue.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Ivancevich dkk. 2000. *Manajemen Kualitas dan kompetitif*. Jakarta: Erlangga
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Massachusse: Duxbury Press.
- Lestary. J, Barany, et all. 2020. *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?* CSIS Commentaries.
- Lester, James P, Joseph, Stewart. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach*. Wadsworth, Stamford, USA.
- Lisa E. Gralinski and Vineet D. Menachery. *Return of the Coronavirus: 2019-nCoV*. 24 Januari 2020.
- Lukman, Samparan. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA LAN Press
- Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi, 2005. *Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moenir A.S. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nazir, Mohamad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nigro, Filex A., and Lloyd G. Nigro, 1984. *Modem Publik Administration*, Six Edition. New York: Harper & Row Publishers.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

- \_\_\_\_\_. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Kovergensi, dan Kimia Kebijakan* (edisi kelima, revisi). Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kebijakan Membangun Karakter Bangsa (Di Era Digital, Disruptif, dan Kaos)*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Osborne, David dan Peter Plastrik. 2000. *Memangkas Birokrasi; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: PPM & CV Teruna Grafika
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Patton, M. Quinn. 1997. *Utilization focused evaluation: The new century text*. Thousand oaks, CA: Sage.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosenbloom, David H., 1993. *Public Administration, Understanding Management, Politics, and in the Publik Sector*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Rossi, Peter H. and Howard E Freeman, 1985. *Evaluation A Sytematic Approach*, Third Edition, Sage Publication, Berely Hills
- Ross, M. G. (1967). *Community Organization: Theory, Principles And Practice*. New York: Harper & Row Publishers.
- Rusli, Budiman, 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Isu-Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Bandung: Lepsindo.
- Rutman, Leonard (ed.). 1977. *Evaluation Research Methods- a basic Guide*. London: Sage Publication.
- Saefullah, H.A. Djadja. 2007. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Prespektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.
- Saiful Mujani. 2020. *Wabah COVID-19: Efektivitas Bantuan Sosial*. Jakarta.
- Simon, Christoper A. 2007. *Public Policy: Preferences and Outcomes*. New York: Pearson Longman.
- Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Smith, Kevin B and Christopher W. Larimer. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. Philadelphia: Westview Press.
- Soemarwoto, Otto. 2014. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Steers. Richard M, 1985. *Efektifitas Organisasi*. Terjemahan Magdalena Yamin Jakarta: Erlangga
- Stilman II, Richard J., 1984. *Public Administration Concept and Cases*. Boston: Houghton Mifflin Co.

- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Sulaiman, Fatah dkk, 2020. *Menuju Normal Baru*. Serang: Untirta Press
- Toyib, Yusid dan Riant Nugroho. 2018. *Transformasi Public Private Partnership Indonesia: Urgensi PPP Dalam Penyediaan Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vedung, Evert. 2004. *Public Policy and Program Evaluation*. New Jersey: Transaction Publishers, New Brunswick.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weimer, David L and Vining, Aidan R. Vining. 1998. *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Weiss, C.H. 1998. *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*. 2nd edition Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Wicaksana, Harits Hijrah dkk. 2020. *Survey Kepuasan Masyarakat Program Sembako di Kabupaten Lebak 2020*. Rangkasbitung – Lebak : LPPM STISIP Setia Budhi
- \_\_\_\_\_. 2020. *New Normal: Perspektif Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Serang: UNTIRTA PRESS
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Zeithaml, Valirie A., & Mary Jo. (2003). *Service Marketing Integrating Customer Focus Across The Firm*. New York: McGraw-Hill Companies.

#### Jurnal

- Jin, D. H., & Kim, H. J. (2018). Integrated understanding of big data, big data analysis, and business intelligence: A case study of logistics. *Sustainability* (Switzerland), 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103778>
- Joshi, P. R., & Islam, S. (2018). E-government maturity model for sustainable E-government services from the perspective of developing countries. *Sustainability* (Switzerland), 10(6). <https://doi.org/10.3390/su10061882>

- Singh, S. (2016). Modernisation challenges: Some factors that affect e-government development in South Africa. *Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG, 2016-Janua, 205–213.*
- Zhou P, Yang X, Wang X, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature* 579. 2020;270–3.

Sumber Lain:

- Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020. No. 40/05/Th. XXIII, 05 Mei 2020.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.Pan/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 2005. SANKRI, Buku III – Landasan dan pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara. Jakarta: LAN.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Penyakit Virus Corona 2019. Volume 40, Nomor 2, April 2020.
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- World Health Organization. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. 10 Januari 2020.
- World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 16-24 Febuari 2020.

#### Online

- <https://COVID19.go.id/peta-sebaran> (Online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 23.15 WIB)
- <https://COVID19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-coronavirus/menteri-kesehatan-tetapkan-132-rumah-sakit-rujukan-COVID-19/#.X3qzGgzaM8> (Online pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pukul 11.30 WIB).
- <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/pendidikan-era-new-normal-belajar-dari-study-from-home> (Online pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pukul 13.40 WIB).
- <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal> (Online pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pukul 09.45 WIB).
- <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg> (Online pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pukul 11.00 WIB).
- <https://worldhealthorg.shinyapps.io/COVID/> (online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 01.03 WIB).

- <https://worldhealthorg.shinyapps.io/COVID/> (online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 07.00 WIB).
- <https://worldhealthorg.shinyapps.io/COVID/> (Online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 19.15 WIB).
- <https://worldhealthorg.shinyapps.io/COVID/> (Online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 20.57 WIB).
- <https://worldhealthorg.shinyapps.io/COVID/> (Online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 21.30 WIB).
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/redam-kesulitan-ekonomi-akibat-COVID-19-pemerintah-lakukan-upaya-ini/> (Online pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pukul 11.00 WIB).
- <https://www.kemkes.go.id/article/view/20052900001/vaksin-COVID-19-belum-ditemukan-pemerintah-siapkan-skenario-new-normal.html> (Online pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pukul 11.00 WIB).
- [https://www.kominfo.go.id/content/detail/25881/penggunaan-internet-naik-40-saat-bekerja-dan-belajar-dari-rumah/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/25881/penggunaan-internet-naik-40-saat-bekerja-dan-belajar-dari-rumah/0/berita_satker) (Online pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pukul 14.00 WIB).
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> (Online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 23.10 WIB).
- <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-COVID-19-final-report.pdf> (online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 00.48 WIB)
- <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/new-infographics/new-normal> (Online pada tanggal 5 Oktober 2020, pada pukul 10.00 WIB).
- <https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-COVIDtimeline> (Online pada tanggal 4 Oktober 2020, pada pukul 23.05 WIB).

# ELEKTABILITAS KEPALA DAERAH & PANDEMI COVID-19

Jonah Silas<sup>1</sup>; Muchamad Indra Purnama<sup>2</sup>; Teddy Nurzaman<sup>3</sup>

## PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO)<sup>4</sup>, wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai macam produk kebijakan, seperti, Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik secara makro maupun mikro (kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan), pemberlakuan jam malam, penutupan ruang-ruang publik (pusat perbelanjaan, taman, sarana olahraga dan sebagainya), hingga pada penutupan sementara kegiatan sekolah dan perkantoran non-esensial, menjadi upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19.

Kehadiran undang-undang otonomi daerah, telah memberikan kewenangan terhadap para kepala daerah dalam merumuskan program atau peraturan yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Tulisan ini akan fokus mengkaji berbagai program atau peraturan daerah pada tiga provinsi, yakni, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya menangani pandemi covid-19. Pemilihan lokus penelitian didasarkan pada fenomena kenaikan elektabilitas tiga kepala daerah di tengah masa krisis pandemi covid-19, di antaranya, Ridwan Kamil (Gubernur Provinsi Jawa Barat), Ganjar Pranowo (Gubernur Provinsi Jawa Tengah), dan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta). Kenaikan elektabilitas tiga kepala daerah tersebut dapat dilihat pada grafik hasil survey di bawah (1.1 & 1.2)

---

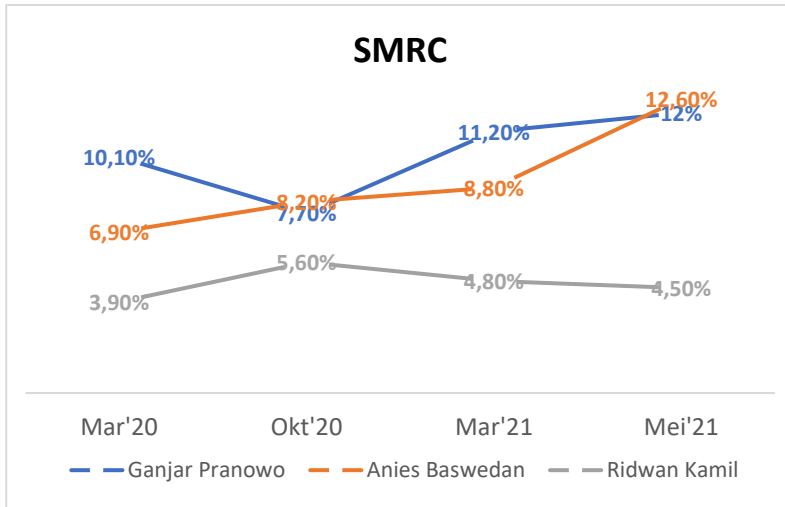
<sup>1</sup> Peneliti *Indonesian Politics Research & Consulting* (IPRC). Email: johansilas@gmail.com

<sup>2</sup> Peneliti *Indonesian Politics Research & Consulting* (IPRC). Email: indrapurnama@gmail.com

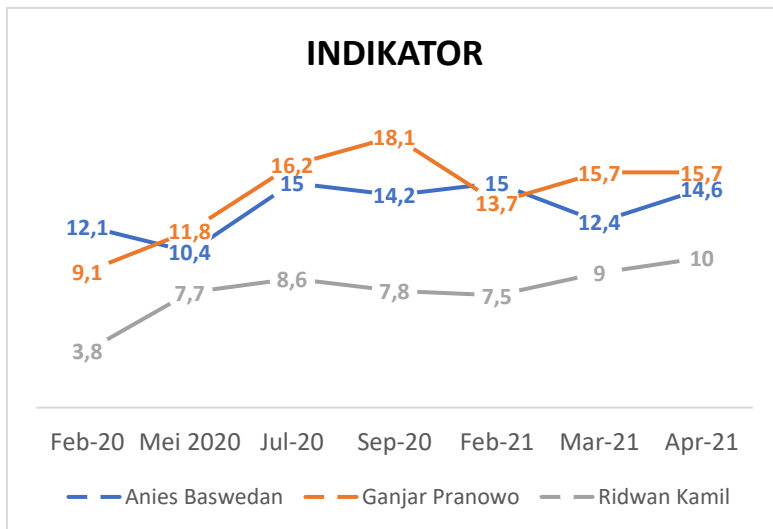
<sup>3</sup> Peneliti *Indonesian Politics Research & Consulting* (IPRC). Email: teddynurzaman@gmail.com

<sup>4</sup> Pernyataan tersebut langsung disampaikan oleh Dirjen WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pada bulan maret lalu. Widyaningrum, G, L., (2020, Maret 12). WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global. National Geographic Indonesia. Retrieved from <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>.

Grafik 3 Hasil Survei SMRC Periode Maret 2020 – Mei 2021



Grafik 4 Hasil Survei Indikator Periode Februari 2020 – April 2021





Dua hasil survei tersebut menunjukkan secara keseluruhan tren elektabilitas tiga kepala daerah yang mengalami kenaikan selama masa pandemi covid-19 (dalam kurun waktu Januari 2020 – Mei 2021). Ganjar Pranowo misalnya, pada survei SMRC, kenaikannya berkisar pada angka 5,7% (perbandingan antara bulan Maret 2020 dengan bulan Mei 2021), sedangkan pada survei Indikator, kenaikannya berkisar pada angka 6,6% (perbandingan antara bulan Februari 2020 dengan April 2021). Ridwan Kamil, pada survei SMRC, mengalami kenaikan tren elektabilitas berkisar pada 1,6% (perbandingan antara bulan Maret 2020 dengan bulan Mei 2021), sedangkan Anies Baswedan mengalami kenaikan tren elektabilitas yang cukup signifikan berkisar 5,7% (perbandingan antara bulan Maret 2020 dengan bulan Mei 2021).

Pada hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator, periode Februari 2020 hingga April 2021, Ganjar Pranowo mendapatkan kenaikan angka elektabilitas sebesar 6,6% (perbandingan antara Februari 2020 dengan April 2021), Ridwan Kamil mengalami kenaikan sebesar 6,2% (perbandingan antara Februari 2020 dengan April 2021), lalu Anies Baswedan mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 6,6% (perbandingan antara Februari 2020 dengan April 2021), setara dengan kenaikan yang dialami oleh Ganjar Pranowo.

Tren kenaikan elektabilitas yang dialami oleh tiga kepala daerah tersebut pada masa krisis pandemi covid-19, tentunya menarik untuk dicermati, khususnya pada aspek program-program yang dibuat oleh tiga kepala daerah tersebut. Para aktor politik, baik pemilih maupun politisi, pada setiap rangkaian tindakannya akan selalu dipandu oleh kepentingan dan manfaat bagi dirinya. Bagi para politisi dalam hal ini adalah kepala daerah, akan selalu memiliki kecenderungan untuk memilih kebijakan yang memiliki efek kepada memenangkan dukungan pemilih (Hamdi, 2015).

Elektabilitas menjadi salah indikator sejauh mana peluang keterpilihan politisi pada kontestasi pemilihan umum yang akan datang. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, tulisan ini akan melihat apa-apa saja program tiga kepala daerah dalam menangani krisis pandemi covid-19, dan bagaimana program tersebut dapat memberikan insentif kenaikan tren elektabilitas dirinya masing-masing.

## **PEMBAHASAN**

Peran kepala daerah ialah untuk memperkuat dalam menciptakan kebijakan penanganan Covid-19 yang responsif. Kepala daerah berperan penting dalam penguatan kapasitas keamanan kesehatan karena memiliki kendali penuh terhadap alur pengendalian dan penanganan Covid-19. Beberapa kepala

daerah menunjukkan keseriusannya dalam penanggulangan covid, beberapa inovasi diberikan agar memudahkan masyarakat untuk menjangkau setiap program pemerintah yang disediakan. Misalnya saja di Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan inovasi pada penanggulangan covid19 seperti pembuatan Aplikasi Pikobar untuk memudahkan masyarakat Jawa Barat dalam menerima akses informasi seputar covid19, mulai dari ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit hingga ketersediaan tabung oksigen. Tidak hanya itu, Ridwan Kamil juga membuat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah hingga pemerintah dengan pengusaha ataupun Lembaga-lembaga lainnya dalam menangani pandemi covid-19, serta dampak yang dihasilkannya. Misalnya, di Jawa Barat terdapat satgas BUMD yang dibentuk oleh Ridwan Kamil untuk mengurus persoalan kelangkaan tabung oksigen.

Kepala daerah memiliki upaya dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 yang menimbulkan kebijakan pembatasan mobilitas. Selain menerapkan kebijakan 3T dan 3M, sejumlah negara juga memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas manusia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang sangat cepat. Kebijakan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti zonasi daerah berdasarkan tingkat infeksi maupun larangan meninggalkan rumah, berkumpul, dan bepergian antardaerah maupun larangan masuk ke negara lain. Ridwan Kamil misalnya selaku Gubernur melakukan metode pengklasifikasian zona darurat Covid-19. Ridwan Kamil membagi kota-kota dalam zona merah untuk kasus aktif terbanyak dan risiko penularan tinggi, zona oranye untuk risiko penularan sedang dan zona hijau untuk risiko penularan rendah. Ridwan Kamil menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah siaga satu sejak kemunculan Covid-19. Ia juga menutup daerah wisata dan membatasi pendatang dari Jabodetabek. Adapun peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur No 443/Kep.415-Hukham/2020 dan Pergub No 45 Tahun 2020 mengenai sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Daerah Provinsi Jawa Barat. Anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi kasus Covid-19 pada 2020 ialah mencapai Rp1.423 Triliun. Adapun alokasi anggaran diperuntukkan dana bantuan sosial, sektor kesehatan hingga pemulihan ekonomi di masa pandemi. Gerakan lain yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ialah dengan melakukan Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hanafi, Ridho Imawan, dkk. 2020. Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan dan Pangung Elektoral. Puspenpol LIPI.

Selain Ridwan Kamil, Anies Baswedan juga menunjukkan keseriusannya dalam menangani Pandemi19 di DKI Jakarta, Anies Baswedan selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta pada awal kemunculan Corona mengeluarkan Surat Edaran Dinas Kesehatan No 18/SE/2020 mengenai kewaspadaan terhadap Corona Virus. Selanjutnya, setelah penemuan kasus pertama di Jakarta pada 2 Maret 2020, Anies dengan segera membentuk Tim Tanggap Covid-19 dengan dasar hukum Keputusan Gubernur No. 291/2020 dan dengan itu pula Anies menghentikan kegiatan di sektor perkantoran dan menetapkan status darurat bencana. Pada awal Juni 2020, Anies menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan statusnya diperbarui setiap 2 minggu sekali. Anies Baswedan juga mengetatkan peraturan mengenai PCR sehingga per 20 Agustus 2002, jumlah tes PCR telah mencapai 53.097 tes. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalokasikan Rp10,7 Triliun rupiah untuk penanganan pandemi.

Lain Jakarta dan Jawa Barat, lain pula ragam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Gubernur No 360/3 Tahun 2020 tentang Pentapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Selain itu, Ganjar juga melakukan percepatan penanganan Covid-19 dengan pembentukan Satgas *Jogo Tonggo* yang dibentuk pada setiap tingkatan Rukun Warga<sup>6</sup>. Adapun tugas dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* adalah menghidupkan jaring ekonomi melalui berbagai metode, salah satunya adalah menghidupkan UMKM. Metode lain yang dilakukan Ganjar dalam menanggulangi Covid-19 ialah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ialah sebesar Rp1,4 triliun di tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada 1,8 juta kepala keluarga terdampak Covid-19.

Hasil yang ditunjukkan dari setiap inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah tidak hanya berdampak bagi persoalan covid, akan tetapi juga memiliki dampak terhadap popularitas. Gaya kepemimpinan kepala daerah akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan elektabilitas di tingkat daerah atau nasional. Ketiga pemimpin daerah, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan memiliki kesamaan dalam gaya memimpin yakni mengedepankan sifat tegas dan komunikatif. Ridwan Kamil memilih untuk mengedepankan

---

<sup>6</sup> Lihat Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui "Satgas Jogo Tonggo".

inovasi digital dalam melakukan pelayanan publik. contohnya ialah saat Ridwan Kamil menciptakan aplikasi e-RK (elektronik Remunerasi Kinerja) yakni aplikasi yang digunakan untuk mengisi laporan kerja bagi Aparatur Sipil Negara sehingga kinerja dapat dipantau. Selain itu, Ridwan Kamil lebih memiliki sifat *open relation* termasuk kepada masyarakat Jawa Barat dan memiliki sifat responsif. Melalui berbagai platform digital termasuk sosial medianya, Ridwan Kamil terbuka terhadap berbagai aduan dan kritikan. Penggunaan platform digital juga mencirikan sifatnya yang adaptif terhadap perkembangan dunia digital dan juga kalangan anak muda. gaya kepemimpinan transformatif juga tercermin dalam keputusannya membuat berbagai inovasi pelayanan publik yang terbuka untuk masyarakat seperti desa digital, TRK, Sambara, Si Rampak Sekar dan lainnya. Program Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat sebagai langkah mempermudah jangkauan masyarakat dalam melakukan transaksi pajak sehingga lebih efisien dan efektif.

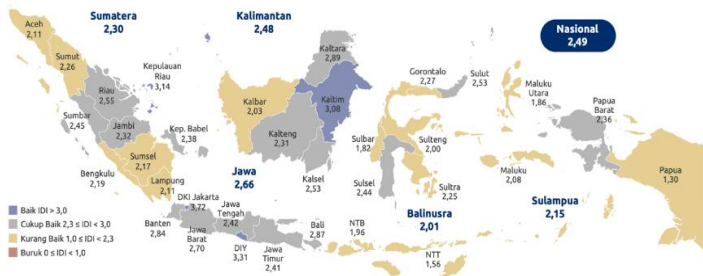
Ganjar Pranowo cenderung memanfaatkan media sosial dan teknologi digital lainnya untuk membuka ruang publik bagi masyarakat. Perkembangan inovasi ekonomi dan keuangan digital yang pesat telah menumbuhkan berbagai platform digital yang menawarkan berbagai inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, kolaborasi, dan berbagi digitalisasi tersebut memberikan peluang kepada UMKM untuk beradaptasi dan bertransformasi untuk bisa bertahan dan bangkit bagi pelaku usaha di Jawa Tengah. Salah satu kebijakan yang di bangun Ganjar Pranowo dalam pandemi Covid-19 adalah terjadinya akselerasi penggunaan digital dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, kegiatan produksi, maupun transaksi investasi di Provinsi Jawa Tengah.

Selain Proses digitalisasi ala Ganjar Pranowo yang berhasil mengangkat elektabilitas dirinya juga turut melakukan kegiatan “blusukan” di tengah masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan merupakan bentuk komunikasi terbuka. Pada awal pelantikannya, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan korupsi. Hal tersebut berimbas pada struktur birokrasi yang lebih menerapkan *good governance*. Ganjar Pranowo menekankan metode berpikir dan pelayanan publik yang efektif, efisien, modern dan cepat tanggap. Secara terbuka, kerap kali Ganjar Pranowo melakukan rapat di ruang publik atau fasilitas umum dan mengundang pejabat daerah lainnya serta perwakilan dari masyarakat. Sosial media Ganjar Pranowo juga digunakan sebagai salah satu tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik juga saran. Ia juga meyakinkan masyarakat bahwa ia dapat dengan

mudah dekat dan bergaul dengan semua kalangan tanpa batasan status sosial maupun usia.

Sementara itu, Anies Baswedan memiliki karakteristik sendiri dalam memimpin ibukota Jakarta. Selama pandemi Covid-19, Anies dinilai tanggap dalam membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal tersebut dibuktikan dengan keputusannya membatasi jam operasional kendaraan umum dan juga membatasi jumlahnya. Adapun kendaraan umum yang dimaksud ialah Trans Jakarta dan Moda Raya Terpadu (MRT). Anies juga dinilai menerapkan gaya kepemimpinan *behavioral* atau berkenaan dengan norma-norma. Hal tersebut dibuktikan dengan penutupan tempat prostitusi di Jakarta. Anies juga dinilai cukup memperhatikan kesejahteraan warga DKI Jakarta terkhusus kebutuhan ruang publik dan fasilitas umum. Selama masa kepemimpinannya, ia membuka beberapa taman dan meningkatkan layanan transportasi umum sehingga warga tertarik untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Gambar 5 Tingkat Digitalisasi di Indonesia



Sumber: Laporan Ekonomi Bang Indonesia (2020)

Program digitalisasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan menunjukkan angka keberhasilan tertinggi di pulau Jawa sebesar 3,72%, kondisi tersebut memberikan peluang kepada UMKM untuk tumbuh, Pandemi Covid-19 sebagai kejadian luar biasa mendorong Pemerintah memberikan dukungan luar biasa untuk membantu penyelamatan dan pemulihan UMKM melalui program stimulus. Sementara itu, UMKM juga makin banyak yang menerapkan digitalisasi dan terus mengeksplor peluang dari digitalisasi dan mengadopsi model bisnis berbasis digital agar dapat tumbuh. Anies Baswedan mencontohkan beberapa usaha proaktif yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi para pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 dengan memberikan perizinan secara jemput bola. Kebijakan jemput bola Anies Baswedan tidak menunggu pelaku usaha datang dan juga memberikan kredit kepada pelaku usaha dengan minim syarat dan ketentuan agar usaha

dapat tetap berjalan pada masa pandemi, kebijakan inovasi tersebut berhasil mengantarkan gubernur DKI Jakarta untuk memperoleh insentif elektabilitasnya dalam survei-survei kepuasan kinerja yang dilakukan oleh Lembaga survei.

## PENUTUP

Dalam menangani situasi Pandemi, pemerintah daerah memperlihatkan responsnya kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan. Kepala daerah tersebut juga menyikapi pandemi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan virus hingga mengatasi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Setiap kepala daerah memiliki capaian dan tingkat keberhasilannya masing-masing. Hal ini tentu dapat menjadi Indikasi keberhasilan pada momentum elektoral tahun 2024 mendatang. Di beberapa survei nasional, ketiga kepala daerah yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta yakni Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengalami kenaikan elektabilitas yang signifikan. Salah satu faktor pendorongnya adalah inovasi kebijakan menangani pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- National Geographic Indonesia. Retrived from Hanafi, Ridho Imawan, dkk. 2020. *Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan dan Panggung Elektoral*. Puspenpol LIPI.
- Huyogo Symbolon, "Daftar Terbaru Zona Merah, Oranye, dan Kuning Covid-19 di Jawa Barat," 07 Agustus 2020,
- Humas Prov. Jawa Tengah, "Jateng Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Corona," 28 Maret 2020, [https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=4174](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4174), diakses pada 19 Agustus 2020.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4325126/daftar-terbaru-zona-merah-oranyedan-kuning-COVID-19-di-jawa-barat>, diakses pada 31 Agustus 2020.
- Inang Jalaludin Sofihara, "Anggaran Penanggulangan Covid-19 Pemprov Jabar Sudah Terserap Rp1,423 Triliun," 1 Juli 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/16575561/anggaranpenanggulangan-COVID-19-pemprov-jabar-sudahterserap-rp-1423?page=all>, diakses pada 31 Agustus 2020.
- Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020

tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui “Satgas Jogo Tonggo”.  
<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>.

SIARAN PERS HM.4.6/220/SET.M.EKON.3/08/2021 Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bergantung Pada Efektivitas Penanganan Covid-19 <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3220/menko-airlangga-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-bergantung-pada-efektivitas-penanganan-covid-19>

<https://nasional.tempo.co/read/1521036/survei-poltracking-catat-3-capres-2024-terkuat-ganjar-prabowo-anies><https://nasional.tempo.co/read/1521036/survei-poltracking-catat-3-capres-2024-terkuat-ganjar-prabowo-anies>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Jakarta Tanggap Covid-19,” <https://corona.jakarta.go.id/id>, diakses pada 29 Agustus 2020

Bank Indonesia, laporan perekonomian indonesia tahun 2020, Jakarta 2021

# NEGARA & KEBIJAKAN

PENANGANAN PANDEMI COVID-19

"Ada banyak cara merespon Pandemi Covid-19. Salah satunya dilakukan melalui dokumentasi pemikiran seperti yang ada dalam buku ini. Selain terus bergulat dalam pencarian kebenaran, intelektual harus aktif terlibat dalam pendokumentasian jalannya sejarah."

-Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si. M.T. (Ketua Komisi II DPR RI)

"Akademisi memiliki cara pandang yang khas dalam melihat realitas. Buku ini adalah contoh dari cara pandang yang demikian. Saya menyambut baik terbitnya buku ini. Selamat"

-Firman Manan, M.A. (Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research and Consulting)

"Buku ini bagian dari wujud optimisme, di tengah berbagai kesulitan pada masa Pandemi. Akademisi harus tetap berpikir jernih dalam melihat setiap kebijakan publik"

-Irhah Ahmady (Direktur Perkumpulan Arus Publik Indonesia)

PT. Tubagus Lima Korporat  
Jl. Tubagus Ismail VIII Nomor 5 Bandung

